



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

RPKD

KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022-2026





BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR **43** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan berkelanjutan tentang penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya dibutuhkan rencana penanggulangan kemiskinan yang sistematis, terpadu dan terintegrasi untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi melalui pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Kabupaten/Kota menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 960);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
10. Tim

10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategis penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2026 dalam bentuk arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan lokasi prioritas beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas Program;
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI : Penutup;
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Desember 2023 M
01 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 Desember 2023 M
02 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR: 493

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

**KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022-2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
2022**

RPKD KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Nagan Raya dapat melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dokumen RPKD Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2026 ini merupakan dokumen perencanaan khusus dalam hal pengurangan kemiskinan daerah, yang dapat dijadikan bahan untuk disinergikan daalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara menyeluruh, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Penyusunan RKPD ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Nagan Raya,

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Terutama penajaman

aspek sasaran, program dan sinergi program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Nagan Raya, Oktober 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NAGAN RAYA**



RAHMA TULLAH, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19860324 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II KONDISI UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.1 Apek Geografis	9
2.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	9
2.1.2. Topografi	12
2.1.3. Geologi	13
2.1.4. Hidrologi	14
2.1.5. Klimatologi	15
2.1.6. Penggunaan Lahan	17
2.2. Aspek Demografis	19
2.2.1. Jumlah Penduduk	19
2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	21
2.2.3. Penyebaran Penduduk	22
2.2.4. Komposisi Penduduk	23
2.3. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan	24
2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3.2. Produk domestik regional brutto (PDRB)	27
2.3.3. Struktur Ekonomi	29
2.3.4. Pendapatan Perkapita	31
2.3.5. Indeks Pembangunan Manusia	33
2.3.6. Ketimpangan	35
2.4. Aspek Pembangunan Lainnya	36
2.4.1. Bidang Pendidikan	36
2.4.2. Bidang Kesehatan	43
2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	51
2.4.4. Bidang Sosial	54
2.3.5. Bidang Ketenagakerjaan	56
2.3.6. Bidang Pangan	57
2.3.7. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	57

2.3.8. Bidang Parawisata.....	59
2.3.9. Bidang Pertanian.....	60
2.5. Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemsikinan.....	62

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Penanggulangan Kemiskinan	72
3.1.1. Pengertian Kemiskinan.....	73
3.1.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	80
3.2. Gambaran Umum Kemiskinan Daerah.....	85
3.3. Indikator Kemiskinan Daerah.....	87
3.3.1. Jumlah Penduduk Miskin	87
3.3.2. Persentase Penduduk Miskin (P0).....	91
3.3.3. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	96
3.3.4. Indek Keparahan Kemiskinan (P2).....	99
3.3.5. Garis Kemiskinan	102
3.4. Kemiskinan ekstrem.....	105
3.4.1. Gambaran Umum Kemiskinan Ekstrem	105
3.4.2. Karakteristik Kemiskinan Ekstrem.....	109

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1. Penyusunan Teori Perubahan (<i>Theory of change</i>).....	122
4.1.1. Logika Program (ToC) Bidang Ketenagakerjaan	124
4.1.2. Logika Program (ToC) Bidang Pendidikan	129
4.1.3. Logika Program (ToC) Bidang Kesehatan.....	134
4.1.4. Logika Program (ToC) Bidang Infrastruktur	143
4.1.5. Logika Program (ToC) Bidang Pertanian	148
4.1.6. Logika Program (ToC) Bidang Ketahanan Pangan	157
4.1.7. Logika Program (ToC) Bidang Sosial	164
4.2. Analisis Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	171
4.3.1. Kinerja Pendapatan Daerah	172
4.3.2. Kinerja Belanja Daerah	173
4.3.3. Kinerja Pembiayaan	174

BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1. Menentukan Kecamatan Prioritas	178
5.2. Menentukan Desa Prioritas	181
5.2.1. Kecamatan Darul Makmur.....	181
5.2.2. Kecamatan Beutong.....	183
5.2.3. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang.....	184
5.2.4. Kecamatan Kuala.....	185
5.2.5. Kecamatan Kuala Pesisir	187
5.2.6. Kecamatan Seunagan	188
5.2.7. Kecamatan Seunagan Timur	190

5.2.8. Kecamatan Suka Makmue	192
5.2.9. Kecamatan Tadu Raya	193
5.2.10 Kecamatan Tripa Makmur	194
BAB VI PENUTUP	197
DAFTAR PUSTAKA.....	199



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya	10
2.2. Jumlah Desa Dan Kemukiman Menurut Kecamatan.....	11
2.3. Rekapitulasi Status Desa dalam Kab. Nagan Raya	11
2.4. Sebaran Sumber Air Baku di Kab. Nagan Raya	15
2.5. Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kab. Nagan Raya.....	16
2.6. Kondisi Kondisi Curah Hujan dan jumlah hari hujan di Kab. Nagan Raya tahun 2020	16
2.7. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya ..	18
2.8. Penyebaran Jumlah Penduduk Kab. Nagan Raya menurut Kecamatan tahun 2021	22
2.9. Sarana Pendidikan menurut kecamatan di kabupaten nagan raya tahun 2021-2022.....	40
2.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 .	41
2.11. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020 .	44
2.12. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021	49
2.13. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2021.....	50
2.14. Daftar Lokasi Fokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	52

2.15.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km).....	54
2.16.	Akses Sanitasi Kab. Nagan Raya Tahun 2018-2021	55
2.17.	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	56
2.18.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	57
2.19.	Perkembangan jumlah penyandang PMKS di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021	58
2.20.	Produksi Beras Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2021	60
2.21.	Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	61
2.22.	Daftar Objek Wisata Kab. Nagan Raya Tahun 2021	62
2.23.	Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga Tahun 2021	73
2.24.	Program Perberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas.....	74
3.1.	Perkembangan Persentase Kemiskinan 2005-2022	93
3.2.	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1 – 4).....	114
3.3.	Penggunaan jenis fasilitas BAB oleh rumah tangga miskin dan miskin ekstrem menurut kecamatan dalam Kab. Nagan Raya.....	127
3.4.	Penyebaran rumah tangga miskin menurut status kepemilikan dalam Kab. Nagan Raya	129
4.1.	Deskripsi 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan pekerjaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	156
4.2.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021	159

4.3.	Persentase Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021	160
4.4.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya Tahun 2017-2021	161
4.5.	Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2021	162
5.1.	Persandingan Jumlah D1 dan nilai IDM / IKM	165
5.2.	Menentukan Lokasi Kecamatan Prioritas	171
5.3.	Penentuan Desa Prioritas Di Kec.Darul Makmur.....	172
5.4.	Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong.....	174
5.5.	Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang.....	176
5.6.	Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Kuala	177
5.7.	Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Kuala Pesisir..	178
5.8.	Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Seunagan	179
5.9.	Penentuan Desa Prioritas di Kec. Seunagan Timur.....	181
5.10.	Penentuan Desa Prioritas di Kec. Suka Makmue	183
5.11.	Penentuan Desa Prioritas di Kec. Tadu Raya.....	184
5.12.	Penentuan Desa Prioritas di Kec Tripa Makmur	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota	3
1.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan	4
2.1. Peta Adiministrasi Kabupaten Nagan Raya	9
2.2. Peta Kemiringan Kabupaten Nagan Raya	12
2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Nagan Raya	13
2.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya	17
2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya 2017 – 2021	20
2.6. Laju Jumlah Penduduk Kab. Nagan Raya 2017 – 2021 ..	21
2.7. Pesentase sebaran penduduk Kab. Nagan Raya menurut Kecamatan tahun 2021.....	23
2.8. Piramida penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut usia dan jenis kelamin tahun 2021	24
2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (Persen) Tahun 2017-2021	26
2.10. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Kab. Nagan Raya tahun 2017-2021	27
2.11. PDRB ADHB Kab. Nagan Raya tahun 2017-2022.....	28
2.12. PDRB ADHK Kab. Nagan Raya tahun 2017-2022.....	29
2.13. Struktur Ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 .	30
2.14. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2021	33

2.15.	Perkembangan Niai Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	36
2.16.	Posisi Relatif IPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ..	35
2.17.	Perkembangan Indek Gini di Kabupaten Nagan Raya 2017-2021	37
2.18.	Jumlah penghafal Al-Quran, Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017-2021.....	39
2.19.	Tren Prevalensi Stunting menurut SSGI di Kab. Nagan Raya tahun 2019-2021	51
2.20.	Tren Prevalensi Stunting menurut Data (e-PPGBM) di Kab. Nagan Raya tahun 2019-2021	52
2.21.	Kompisis Penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut kelompok lapangan usaha Tahun 2021	59
2.22.	Produksi Beras Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2021	60
2.23.	Kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021 .	64
3.1.	Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	95
3.2.	Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022.....	98
3.3.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Pedesaan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	99
3.4.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021	100
3.5.	Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	104

3.6.	Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Keperahan Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	107
3.7.	Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Keperahan Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022	110
3.8.	Sebaran Penduduk Miskin Ekstrem Dalam Kab. Nagan Raya Tahun 2022	115
3.9.	Tingkat Pendidikan Terakhir Kepala Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Nagan Raya	119
3.10.	Angka Putus Sekolah Anak-Anak Dalam Tangga Miskin Pada Berbagai Jenjang Usia Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	121
3.11.	Jumlah Kepala Rumah Miskin Dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kecamatan	123
3.12.	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Miskin Menurut Kec. di Kabupaten Nagan Raya.....	125
4.1.	ToC Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Nagan Raya.....	132
4.2.	ToC Bidang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	138
4.3.	ToC Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya	143
4.4.	ToC Bidang Infrastruktur Dasar Kab. Nagan Raya.....	152
5.1.	Pemetaan Kecamatan Prioritas.....	172
5.2.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Darul Makmur...	174
5.3.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong	175
5.4.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang.....	176
5.5.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Kuala.....	177
5.6.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Kuala Pesisir.....	178
5.7.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Seunagan.....	179

5.8.	Pemetaan Desa Prioritas di Kec. Seunagan Timur	181
5.9.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Suka Makmue ...	183
5.10.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Tadu Raya.....	184
5.11.	Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Tripa Makmur ...	186





Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2022-2026

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah melalui periode panjang sejarah pengentasan kemiskinan, Sekitar tahun 1960-an, Indonesia menjadi salah satu negara termiskin di dunia, GNP per kapita Indonesia pada saat itu sekitar US \$ 50, kira-kira setengah dari India, Bangladesh dan Nigeria, selain itu kemiskinan juga tersebar luas di seluruh negeri, diperkirakan kemiskinan saat itu sekitar 60% dari populasi atau 70 juta orang Indonesia hidup dalam kemiskinan absolut (World Bank, 1990). Namun beberapa dekade setelah itu, Indonesia mengalami catatan yang sangat impresif dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama masa kepemimpinan orde baru diyakini berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Papanek, 2004).

Persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 40,42 persen atau sebanyak 54,20 juta Pada tahun 1976, angka ini kemudian mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 12,31 persen atau sekitar 22,50 juta pada tahun 1996 (Badan Pusat Statistik, 2017). Catatan impresif ini telah menempatkan Indonesia pada saat itu sebagai salah satu macan Asia, di mana Bank Dunia kemudian memasukkan Indonesia dalam daftar "*The High Performing Asian Economies (HPAEs)*" sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Namun sayangnya, prestasi ini kemudian tersapu oleh gelombang krisis multidimensi pada pertengahan tahun 1997 dimana tingkat kemiskinan kembali meroket hingga mencapai 24,20 persen atau sekitar 49,50 juta jiwa penduduk Indonesia tenggelam dalam kemiskinan, bahkan jumlah ini hampir menyamai jumlah penduduk miskin Indonesia pada dekade 1970-an.

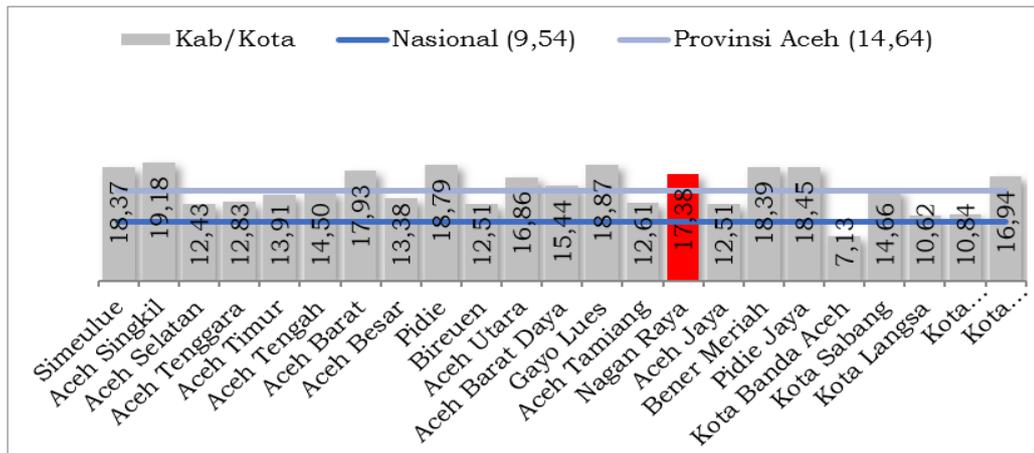
Untuk mengurangi dampak sosial yang merugikan dan peningkatan kemiskinan akibat krisis tersebut, pemerintah memperkenalkan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan seperti kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada tahun 1998. Kebijakan tersebut mencakup program darurat seperti program darurat ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 Indonesia ikut menandatangani dokumen tujuan pembangunan milenium atau disebut dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang kemudian disempurnakan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global ini kemudian Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan memastikan substansi yang terkandung dalam dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan selaras dengan rencana pembangunan nasional.

Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Bahkan pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem harus dapat dilalukan pada tahun 2024 sekitar enam tahun lebih cepat dari target pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi pengentasan kemiskinan yang diwujudkan melalui berbagai program pembangunan baik dalam skala nasional, regional, maupun daerah.

Berdasarkan data yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2022 sebesar 9,54 persen, sementara tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya sebesar 14,64 dan 17,38 persen Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Nagan Raya berada pada zona merah, yaitu di bawah rata-

rata Nasional dan Provinsi Aceh, bahkan persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya menempati peringkat ke-8 tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-Aceh sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2022

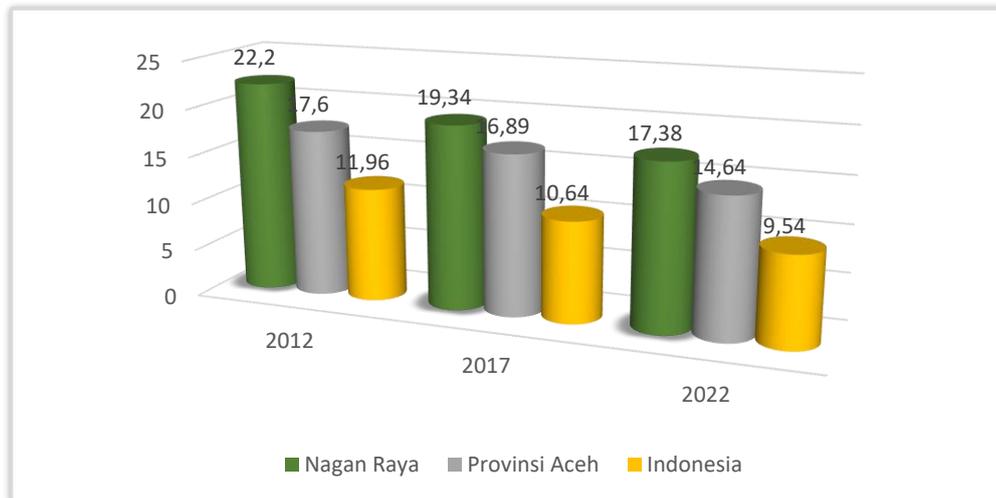


Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Tahun 2022

Namun demikian, jika kita melihat perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya selama satu dekade terakhir terus menunjukkan penurunan, bahkan kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya jauh lebih baik dari rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh. Pada tahun 2012 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya mencapai 22,20 persen atau sekitar 32.720 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2017 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 19,34 persen atau sekitar 31.060 ribu jiwa, kemudian tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan kembali hingga mencapai 17,38 persen atau sekitar 29.630 ribu jiwa. Secara keseluruhan dalam satu dekade terakhir (2012-2022) penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sekitar 4,82 persen (22,20-17,38). Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Nasional yang hanya sekitar 2,42 persen (11,96-9,54) dan rata-rata Provinsi Aceh sekitar 2,96 persen (17,6-14,64). Informasi lebih rinci tentang kinerja penurunan

tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2012-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Tahun 2022

Namun demikian, meskipun secara agregat persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan, namun ada kecenderungan laju penurunannya melambat, selain itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya secara konsisten masih berada di atas provinsi Aceh dan Nasional. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap strategi penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan sehingga dapat menciptakan akselerasi dalam penurunan kemiskinan. Upaya ini tentu saja membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, disamping itu juga dibutuhkan penguatan konsep dan strategi penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran, penguatan kerjasama lintas sektor serta melakukan beragam intervensi yang terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*).

Untuk memudahkan pelaksanaan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai sebuah

dokumen perencanaan strategis yang memiliki tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud penulisan RPKD Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah Daerah dalam setiap dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2022-2026 di Kabupaten Nagan Raya

Sedangkan tujuan penyusunan RPKD Kabupaten Nagan Raya ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran kondisi umum kemiskinan Kabupaten saat ini dan memberikan arah dan tujuan penanggulangan kemiskinan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai panduan untuk mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai jenjang pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya serta pihak-pihak lainnya.
- c. Menetapkan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya secara terpadu, dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPKD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;

13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia No 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM

BAB V : LOKASI PROGRAM

BAB VI : PENUTUP

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026

BAB II

KONDISI UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1 Kondisi Demografis
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan
- 2.4 Aspek Pelayanan Publik
- 2.5 Informasi Sosial Budaya Yang Berkaitan Dengan Isu Kemiskinan
- 2.6 Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan



BAB II

KONDISI UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Aspek Geografis

2.1.1. Luas dan batas wilayah adminitrasi

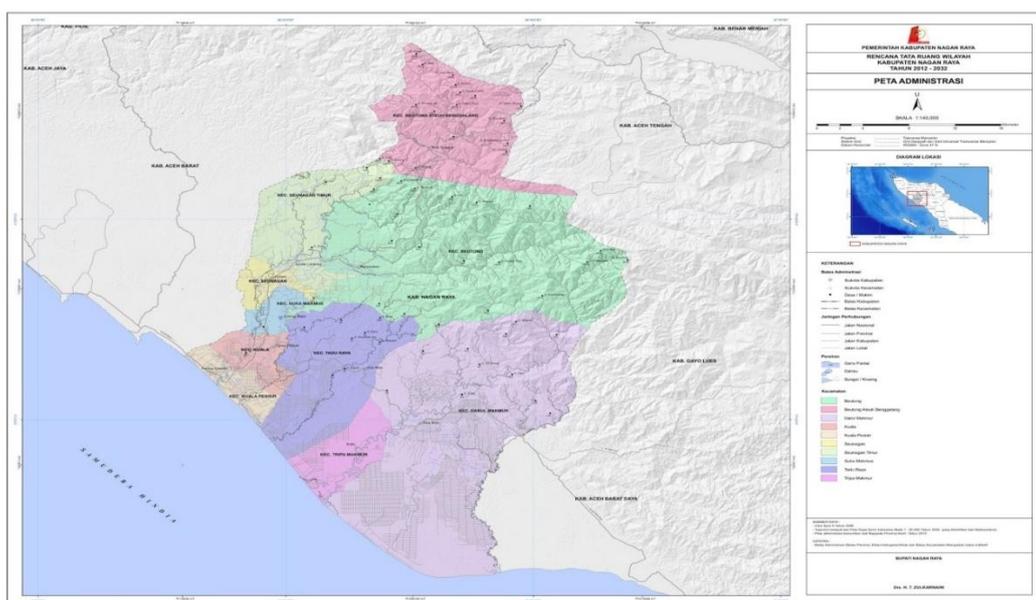
Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah pantai barat selatan Aceh dengan ibukota Suka Makmue. Kabupaten ini terbentuk dari hasil pemekaran berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut yang terletak dalam koridor bagian barat Provinsi Aceh yaitu pada jalur Barat-Selatan, dan secara geografis berada pada posisi 03o 43' 50" – 04o 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96o 11' 23" – 96o 47' 58" Bujur Timur (BT) berupa daratan dengan luas wilayah 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang strategis (*geo- strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional bagian;
2. Dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Barat Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan bagian barat dari Pulau Sumatera dan juga penghubung Ibukota Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara tepatnya berada pada lintasan pesisir barat selatan;
3. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Electric Power (NREP) di Kecamatan Kuala Pesisir yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RT/RW Kabupaten Nagan Raya, 2015–2035

Secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.027,93 Km² atau 29,06% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 Km² atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Nagan Raya menurut kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah
1	Darul Makmur	Alue Bilie	1,0027,93	29.00
2	Tripa Makmur	Kabu	189.41	5.34
3	Kuala	Ujong Fatihah	120.89	3.41
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76.34	2.15
5	Tadu Raya	Alue Bata	347.19	9.79
6	Beutong	Babussalam	1,017.32	28.70
7	Beutong Ateuh Benggalang	Kuta Teungoh	405.92	11.45
8	Seunagan	Jeuram	56.73	1.60
9	Suka Makmue	Lueng Baro	51.56	1.45
10	Seunagan Timur	Keude Linteung	251.61	7.10
	Nagan Raya	Suka Makmue	3,544.90	100.00

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2022

Sementara itu Kabupaten Nagan Raya secara administrasi juga terdiri dari 30 kemukiman dan 222 desa yang tersebar di seluruh kecamatan. Informasi lebih rinci tentang jumlah kemukiman dan desa dalam Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.2. Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman
Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kemukiman	Gampong/Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Darul Makmur	5	40
3	Tripa Makmur	2	11
4	Kuala	2	17
5	Tadu Raya	2	22
6	Beutong	4	24
7	Beutong ateuh Banggalang	1	4
8	Seunagan	5	35
9	Suka Makmue	2	19
10	Seunagan Timur	4	34
	Jumlah Total	30	222

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Status Gampong di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 222 Gampong memiliki beberapa tingkatan status. Pada tahun 2020 terdapat 37 Gampong yang meningkat statusnya menjadi 2 tingkatan, 7 Gampong meningkat 1 tingkatan, 175 Gampong statusnya tetap dan 3 Gampong statusnya turun setingkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Status Desa dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020

No	Status Desa	Tahun	
		2019	2020
1	Maju	15	16
2	Berkembang	72	109
3	Tertinggal	119	90
4	Sangat Tertinggal	16	7
Jumlah		222	222

Sumber: Kemendes, 2021

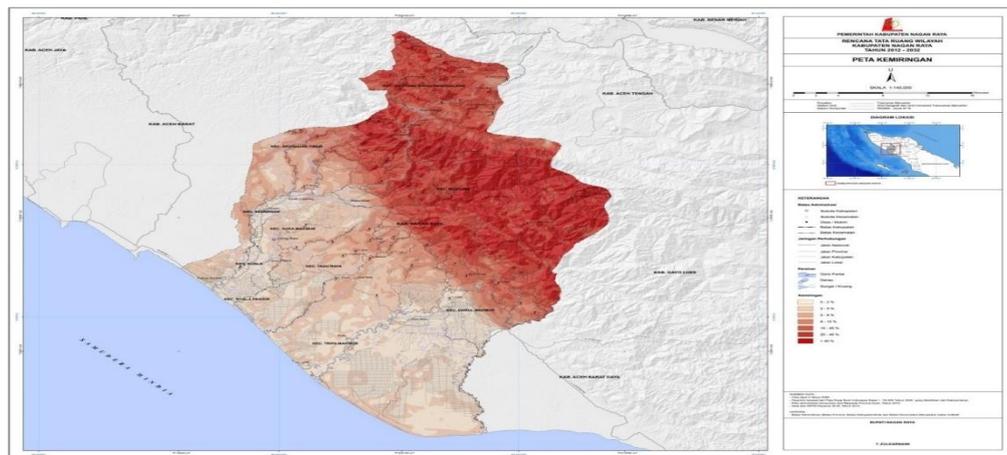
2.1.2. Topografi

Secara topografis wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sbegai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

4. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas \pm 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas \pm 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas \pm 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015-2035

2.1.3. Geologi

Secara geologis jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah *Alluvial*, *Podsolik* coklat, *Grumosol*, *Regosol*, *Podsolik* merah kuning, *Andosol*, *Rock Out Crops*, *Renzina*, *Litosol*, *Mediteran*, *Organosol*, dan *Podsolik*. Jenis tanah ini pada umumnya relatif subur, mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan. Akan tetapi mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi. Pemanfaatan tanah di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya lebih banyak di sektor primer khususnya pertanian, perikanan dan perkebunan dimana sektor-sektor ini merupakan basis ekonomi di Kabupaten Nagan Raya sampai dengan saat ini. Jenis tanah secara visual dapat di lihat secara lebih detail pada peta jenis tanah berikut ini.

tekanan penduduk yang besar, das krueng Seunagan melintasi 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu Kecamatan Beutong, Seunagan Timur, Seunagan, Suka Makmue, Kuala dan Kuala Pesisir.

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016

2.1.5. Klimatologi

Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,1^o C sampai 27,8^o C. Suhu terendah terjadi di Bulan Oktober yaitu 22,9^o C dan suhu tertinggi terjadi di Bulan Maret yaitu 32,8^o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75 – 91 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2021 untuk Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juli yaitu 739 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan juni yaitu 152,0 mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember sebesar 21 hari dan terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 10 hari. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 81,8 % dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 40,9 %. Sementara jumlah hari hujan di sepanjang tahun 2021 paling banyak terjadi

pada bulan Oktober, November dan Desember. Sedangkan untuk bulan Februari, Maret dan Agustus jumlah hari hujan paling sedikit selama tahun 2021. Untuk mengetahui kondisi suhu udara, kelembapan, curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari di Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Kondisi Suhu dan Kelembaban di Kabupaten Nagan Raya

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23.7	27.3	31.9	87	75	98
Februari	23.6	27.4	32.1	75	87	98
Maret	23.8	27.8	32.8	72	85	96
April	23.9	27.2	32.3	77	89	97
Mei	23.9	27.2	32.3	76	88	96
Juni	23.4	27.0	32.2	72	84	94
Juli	23.1	26.5	31.9	75	87	96
Agustus	23.2	27.0	32.5	73	86	96
September	23.1	26.5	31.6	78	89	96
Oktober	22.9	26.1	31.3	81	90	98
November	23.5	26.4	31.0	83	91	97
Desember	23.2	26.4	31.0	83	91	97

Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2022

Tabel 2.6 Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	579.0	15	81.8
Februari	242.0	12	73.6
Maret	337.0	12	77.2
April	595.0	19	67.5
Mei	385.0	19	67.5
Juni	152.0	10	67.5
Juli	739.0	18	62.7
Agustus	249.0	14	61.8
September	250.0	17	40.9

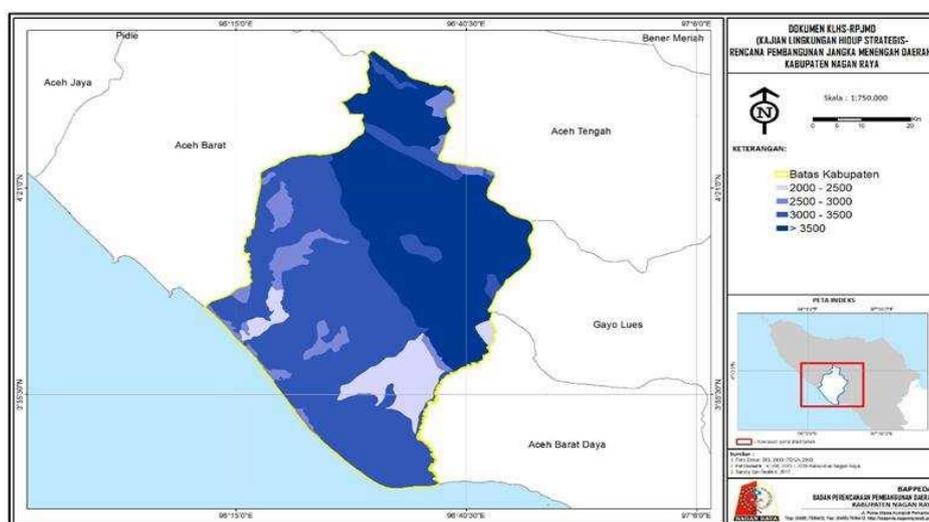
Oktober	459.0	20	47.2
November	444.0	21	47.7
Desember	307.0	21	56.3

Sumber : Nagan Raya Dalam Rangka Tahun 2022

2.1.6. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya. Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Berikut ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya



Sumber : RT/RW Kabupaten Nagan Raya 2015 – 2035

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan

dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh hutan, perkebunan dan pertanian lahan kering. Sesuai dengan kondisi penggunaan lahan untuk Bandara sebesar 103,25 Ha atau 0,03%, danau sebesar 114,89 Ha atau 0,03 %, hutan sebesar 163.459,49 Ha atau 46,11 %, industri sebesar 334,80 Ha atau 0,09 %, perkebunan sebesar 54.417,29 Ha atau 15,35 %, perkebunan masyarakat 32.964,54 Ha atau 9,30%, pemukiman sebesar 8.517,18 Ha atau 2,40%, pertanian lahan kering 61.520,71 atau 17,35%, rawa sebesar 13.271,65 Ha atau 3,74%, sawah 12.777,64 Ha atau 3,60%, sungai 2.194,20 Ha atau 0,62% dan tanah terbuka 4.815,49 Ha atau 1,36 % dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut dan gambar berikut ini.

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya

No	Keterangan	Luas Lahan	Persentase Luas Lahan
		(Ha)	(%)
1	Bandara	103,25	0,03
2	Danau	114,89	0,03
3	Hutan	163.459,49	46,11
4	Industri	334,80	0,09
5	Perkebunan	54.417,29	15,35
6	Perkebunan Masyarakat	32.964,54	9,30
7	Pemukiman	8.517,18	2,40
8	Pertanian Lahan Kering	61.520,71	17,35
9	Rawa	13.271,65	3,74
10	Sawah	12.777,64	3,60
11	Sungai	2.194,20	0,62
12	Tanah Terbuka	4.815,49	1,36
Jumlah		354,491.13	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Sementara itu untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas 24.759,2 Ha yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Darul Makmur dengan luas 2.241,3 Ha; (Sawah 94,3 Ha, Tegalan 2.147 Ha);
- b. Kecamatan Tripa Makmur dengan luas 1.500,8 Ha; (Sawah 77,8 Ha, Tegalan 1.423 Ha);
- c. Kecamatan Kuala dengan luas 2.236,2 Ha; (Sawah 822,2 Ha, Tegalan 1414 Ha);
- d. Kecamatan Kuala Pesisir dengan luas 863,7 Ha; (Sawah 146,7 Ha, Tegalan 717 Ha);
- e. Kecamatan Tadu Raya dengan luas 3.539,1 Ha; (sawah 326,1 Ha, Tegalan 3213 Ha);
- f. Kecamatan Beutong dengan luas 3.539,1 Ha; (Sawah 1.536,9 Ha, tegalan 4.368 Ha);
- g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan luas 961,9 Ha; (Sawah 342,9 Ha, 618 Ha)
- h. Kecamatan Seunagan dengan luas 1.757,1 Ha; (Sawah 1044,1 Ha, Tegalan 713 Ha) ;
- i. Kecamatan Suka Makmue dengan luas 2.247,1 Ha; (sawah 1.541,1 Ha, Tegalan 706 Ha);
- j. Kecamatan Seunagan Timur dengan luas 3.507,3 Ha; (sawah 1.694,3 Ha, Tegalan 1813 Ha).

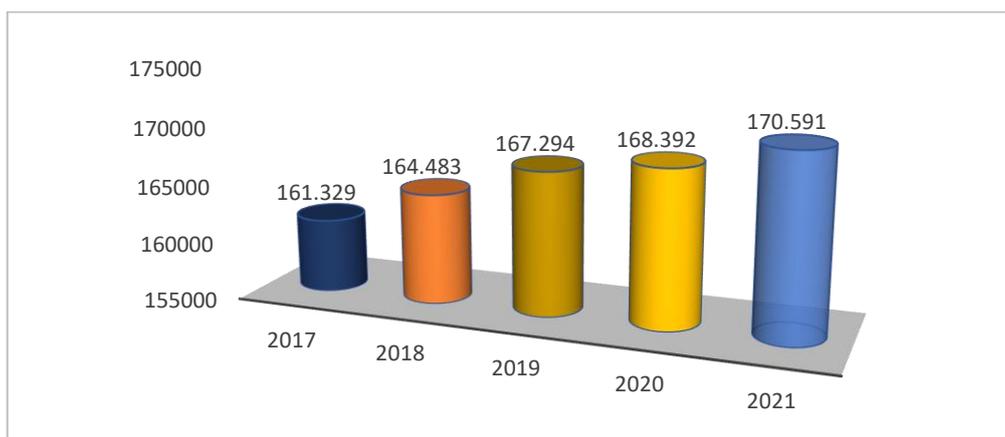
2.2. Aspek Demografis

2.2.1. Jumlah Penduduk

Dalam pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk dengan segala dinamikanya mempunyai peranan penting dalam pembangunan, apalagi kalau kita melihat struktur penduduk Indonesia saat ini yang mayoritas berusia muda (usia produktif). Ini merupakan bonus demografi yang akan membawa berkah bagi pembangunan bila kita mampu mengubah mereka menjadi *human capital* dengan produktifitas yang tinggi. Namun demikian jika limpahan *human resources* ini tidak mampu kita ubah menjadi

human capital maka kita akan kehilangan momentum dalam pembangunan bahkan bonus demografi ini kemudian dapat menjadi beban dalam pembangunan kita.

Kabupaten Nagan Raya memiliki struktur penduduk yang serupa nasional, di mana pada tahun 2021 sekitar dari 69 persen penduduknya berusia muda. Sementara dari sisi jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan, tercatat hingga tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya ada sekitar 170.591 jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat secara lebih rinci perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas kita melihat jumlah penduduk Nagan Raya Tahun 2021 tercatat sebesar 170.591 jiwa. Jumlah ini meningkat dari Tahun 2017 dengan jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada saat itu sebesar 161.329 jiwa. Penambahan jumlah penduduk yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 3.154 orang, sedangkan penambahan jumlah penduduk yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 hanya sekitar 1.098 orang, secara rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ada sekitar 2.315

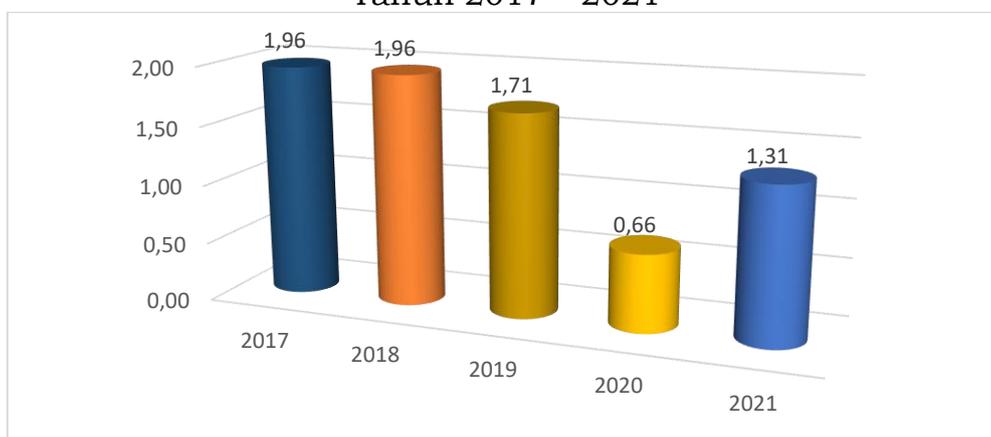


orang penduduk di Kabupaten Nagan Raya bertambah setiap tahunnya.

2.2.2. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas kita dapat melihat bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017- 2021 berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 laju pertumbuhan penduduk stagnan di angka 1,96 persen, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,25 persen. yaitu dari 1,96 persen menjadi 1,71 persen. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan kembali menjadi 0,66 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 1,31 persen. Sementara laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nagan Raya yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,96 persen, sedangkan lanju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sekitar 0,66 persen. Dalam lima tahun terakhir secara rata-rata



laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nagan Raya adalah 1,52 persen pertahun.

2.2.3. Penyebaran penduduk

Jika kita melihat dari distribusinya, penyebaran penduduk Kabupaten Nagan Raya yang paling banyak ada di Kecamatan Darul Makmur, Kuala dan Kuala pesisir. Informasi lebih rinci tentang jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan tahun 2021

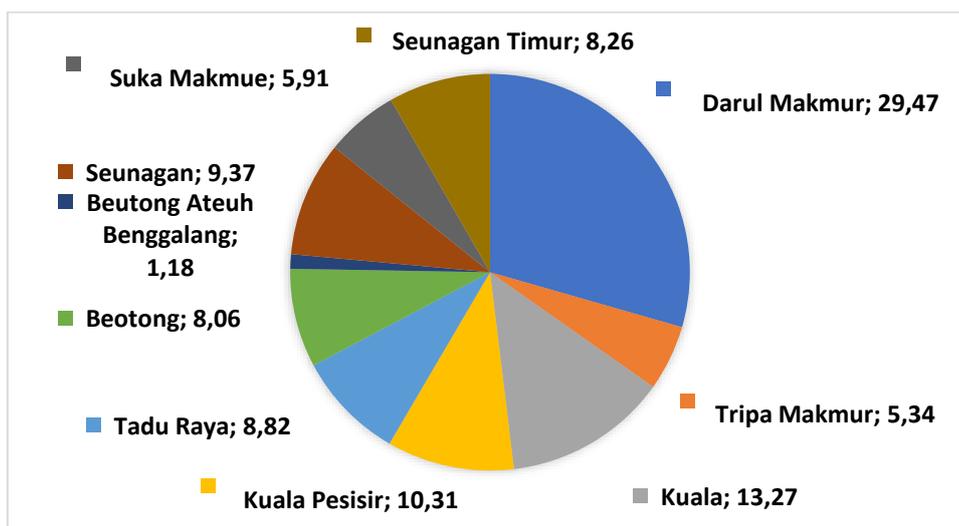
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
1	Darul Makmur	50.281	1,76	102,68
2	Tripa Makmur	9.108	0,77	102.09
3	Kuala	22.637	1,28	102.41
4	Kuala Pesisir	17.594	1,48	104.75
5	Tadu Raya	15.049	2,16	101.81
6	Beutong	13.746	0,33	103,07
7	Beutong Banggalang	2.011	1,06	103.96
8	Seunagan	15.988	0,40	100,65
9	Suka Makmue	10.085	1,55	97,86
10	Seunagan Timur	14.092	0,82	99,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas penyebaran jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Darul Makmur yaitu sebesar 50281 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,76 persen pada tahun 2021. Sedangkan penyebaran jumlah penduduk yang terendah terdapat di kecamatan Beutong Banggalang yaitu sekitar 2011 jiwa. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen. Sementara itu penyebaran penduduk menurut persentase pada tahun yang sama yang paling tinggi terdapat terdapat di Kecamatan Darul Makmur yaitu sekitar 29,47 persen, sedangkan kecamatan Beutong Ateuh Banggalang merupakan kecamatan yang terendah penyebaran penduduk sekitar

1,18 persen. Gambar di bawah ini akan memberikan informasi lebih rinci tentang perentase penyebaran penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2021:

Gambar 2.7 Persentase sebaran penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan tahun 2021



Sumber: BPS 2022

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penyebaran penduduk masih timpang dilihat menurut kecamatan, ada kecamatan yang memiliki penduduk cukup padat dan ada juga yang memiliki penduduk jarang. Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 29,6 % penduduk berdomisili di Kecamatan Darul Makmur, sebaran terbanyak kedua sebesar 13,3 % berada di Kecamatan Kuala, dan berikutnya adalah Kecamatan Kuala Pesisir sebesar 10,3 %. Sedangkan tiga kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu Kecamatan Suka Makmue 5,9 %, Tripa Makmur 5,3 % dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sebesar 1,2 %.

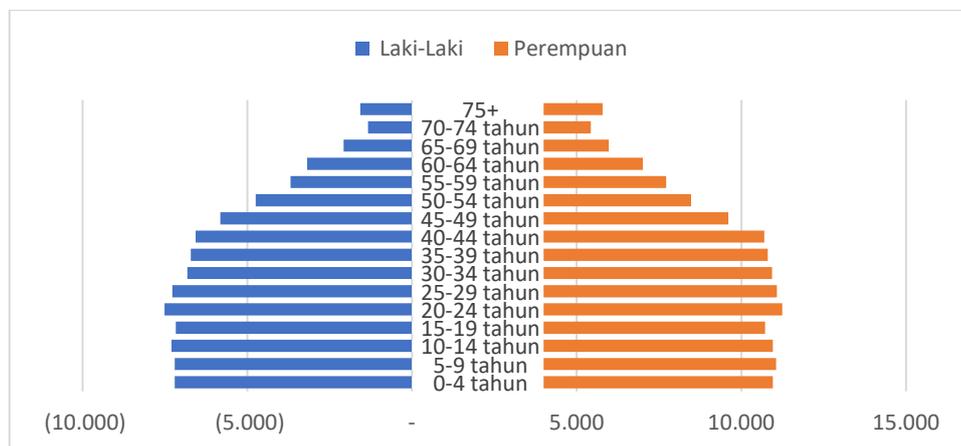
2.2.4. Komposisi penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin suatu wilayah dapat digambarkan dalam bentuk grafik piramida penduduk. Grafik Piramida penduduk merupakan gabungan dari dua buah diagram batang secara horizontal, dimana satu sisi menunjukkan jumlah penduduk perempuan dan sisi satunya



menunjukkan jumlah penduduk laki – laki, dimana kedua diagram tersebut berada pada interval umur penduduk 5 tahunan.

Gambar 2.8 Piramida penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut usia dan jenis kelamin tahun 2021



Sumber: BPS 2022

Gambar di atas merupakan grafik piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021. Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh penduduk dengan umur 15 – 64 tahun yang merupakan usia /usia produktif/usia kerja yang mencapai 117.749 jiwa (69,05 persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 170.591 jiwa. Grafik piramida penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2021, juga menunjukkan jumlah angka kelahiran dan usia muda/usia dewasa lebih tinggi dibandingkan dengan usia tua/tidak produktif. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada usia muda atau usia produktif yang dapat menjadi bonus demografi yang dapat menjadi berkah bagi pembangunan daerah ini di masa yang akan datang. Upaya pemerintahan daerah untuk mengubah human resources ini menjadi human capital menjadi penting agar

2.3. Aspek Ekonomi dan kesejahteraan

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka



panjang sebuah negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah yang secara teknis nilainya sama dengan pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB). Dengan kata lain pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) sering diterjemahkan sebagai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi jika kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, kita dapat memperhatikan perkembangan produk domestik regional brutto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama lebih dari satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya terus menunjukkan peningkatan. Untuk mengetahui gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (Persen) Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

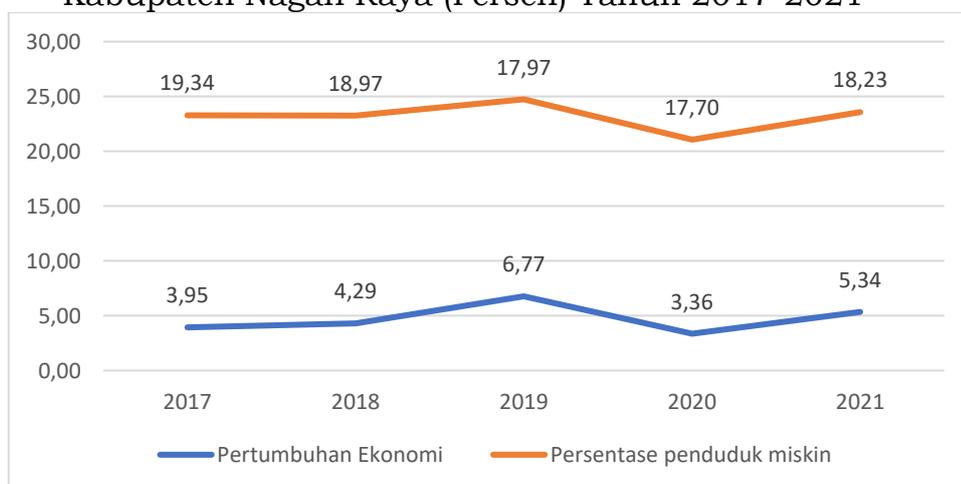
Dalam lima tahun terakhir (2017-2021) laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan, kecuali untuk tahun 2020 Laju pertumbuhannya mengalami penurunan dari 6,77 persen pada tahun 2019 menjadi 3,36 persen pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas.



Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir sebesar 4,74 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,77 persen, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 3,36 persen.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya masih belum bersifat inklusif, hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh BPS selama lima tahun terakhir dimana pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan, ketika ekonomi tumbuh justru kemiskinan juga ikut meningkat, ini artinya jenis aktivitas ekonomi yang tumbuh tidak dapat memberi dampak langsung pada masyarakat banyak yang seharusnya dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan, sektor lapangan usaha yang tumbuh bukan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, hal ini dapat kita amati dari kontribusi sektor primer yang mengalami penurunan lebih cepat setiap tahun dibandingkan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor lainnya. Dinamika hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.9 Hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya (Persen) Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

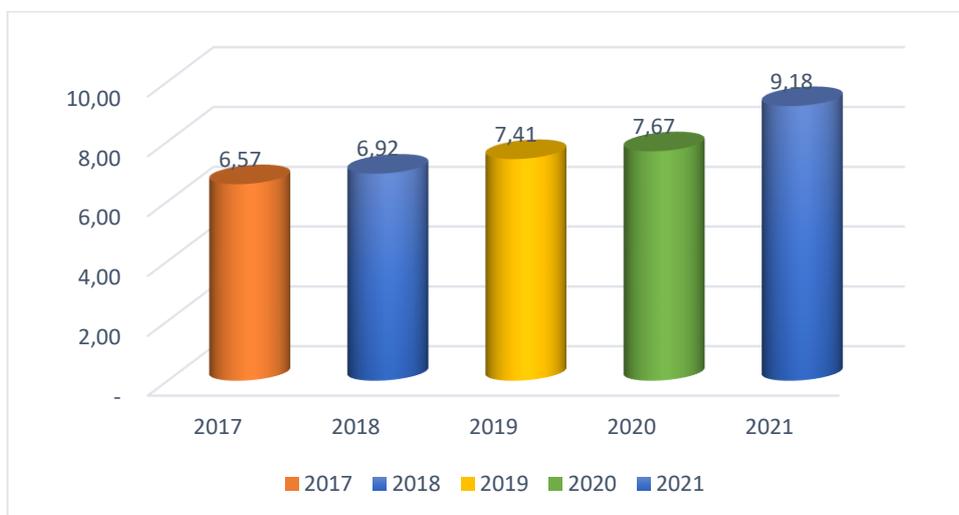


2.3.2. Produk domestik regional brutto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu. Meski besaran PDRB ADHB tidak dapat digunakan sebagai perbandingan ukuran pertumbuhan output perekonomian, karena ada pengaruh harga (*inflasi*) namun indikator ini menjadi penting untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu PDRB ADHK didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, PDRB ADHK sering digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10 PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (triliyun)



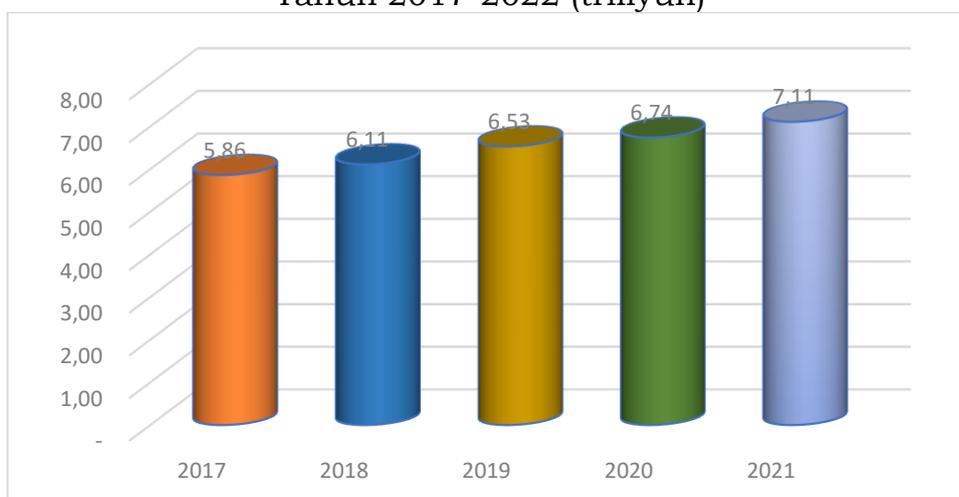
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022



Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara nominal nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini selain disebabkan oleh peningkatan output perekonomian juga di sebabkan oleh peningkatan faktor harga yang kemudian berkontribusi dalam menentukan besaran nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya sebesar 6,57 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan mencapai nilai 9,18 triliun rupiah pada tahun 2021 dan secara rata-rata terjadi peningkatan pertahun sebesar 0,94 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Peningkatan besaran nilai PDRB ini menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya.

Sementara itu pola peningkatan yang serupa juga terjadi pada nilai PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir (2017-2021). Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,86 triliyun kemudian terus meningkat hingga mencapai 7,27 triliyun pada tahun 2022. Untuk melihat gambaran lebih rinci tentang perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terkehir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.11 PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (triliyun)



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022

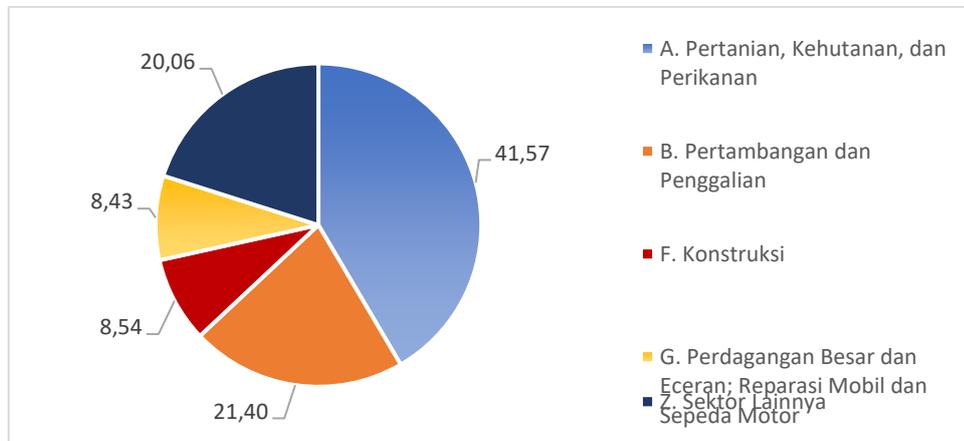


Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat disepanjang tahun pengamatan PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan, secara rata-rata terjadi peningkatan sekitar 0,28 triluyun pertahun dalam enam tahun terakhir (2017-2022). Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,48 triliyun sementara peningkatan terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya sekitar 0,16 triliyun. Jika kita bandingkan dengan peningkatan PDRB ADHB yang besarnya jauh melebihi peningkatan PDRB ADHK ini mengindikasikan peningkatan harga menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan peningkatan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.3. Struktur ekonomi

Untuk melihat struktur perkeekonomian suatu daerah kita dapat mengamati perkembangan kontribusi sektor usaha pada PDRB ADHB daerah tersebut. Pergeseran struktur ekonomi suatu daerah juga dapat diamati dari perkembangan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB nya. Jika kita melihat struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa sektor primer memegang peranan penting dalam struktur ekonominya. Gambar berikut ini akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021.

Gambar 2.12 Struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya 2021



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022



Pada tahun 2017 kontribusi sektor primer dalam struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya mencapai sebesar 54,18 persen kemudian meningkat hingga mencapai 62,97 persen pada periode 2021. secara rata-rata pada periode 2017-2021 lebih dari 56,06 persen perekonomian Kabupaten Nagan Raya di sumbang oleh oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian). Sementara itu pada tahun 2021 lapangan usaha yang memberi peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 41,57 persen, kontribusi sektor ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 45,89. Lapangan usaha penyumbang *share* terbesar kedua adalah pertambangan dan penggalian, sumbangan sektor ini dalam perekonomian mencapai 21,40 persen pada tahun 2022, sumbangan sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 8,29 persen.

Sementara Lapangan usaha penyumbang *share* terbesar ketiga adalah lapangan usaha kontruksi yaitu sebesar 8,43 persen, kontribusi sektor ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 9,68 persen. Sedangkan lapangan usaha penyumbang *share* terbesar ke empat adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 8,43 persen pada tahun 2022, kontribusi sektor ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 11,76 persen. Sementara sektor usaha lainnya memberikan kontribusi relative kecil terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya yang hanya mencapai dibawah 5 persen pada pada tahun 2021.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan

seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Dengan demikian berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya hingga tahun 2021 masih didominasi oleh sektor primer yang menyumbang lebih dari 60 persen dari total perekonomian dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 40 persen dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 21,40 persen dari total perekonomian. Dengan kata lain kedua sektor lapangan usaha ini memegang peranan besar dalam struktur ekonomi Kabupaten Nagan Raya.

Semakin meningkatnya kontribusi kategori sekunder dan tersier dalam pembentukan struktur perekonomian menunjukkan semakin majunya perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Hal ini karena semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap kategori primer yang sebagian besar hanya memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, kategori sekunder masih perlu ditingkatkan lagi karena kategori ini dapat meningkatkan kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat

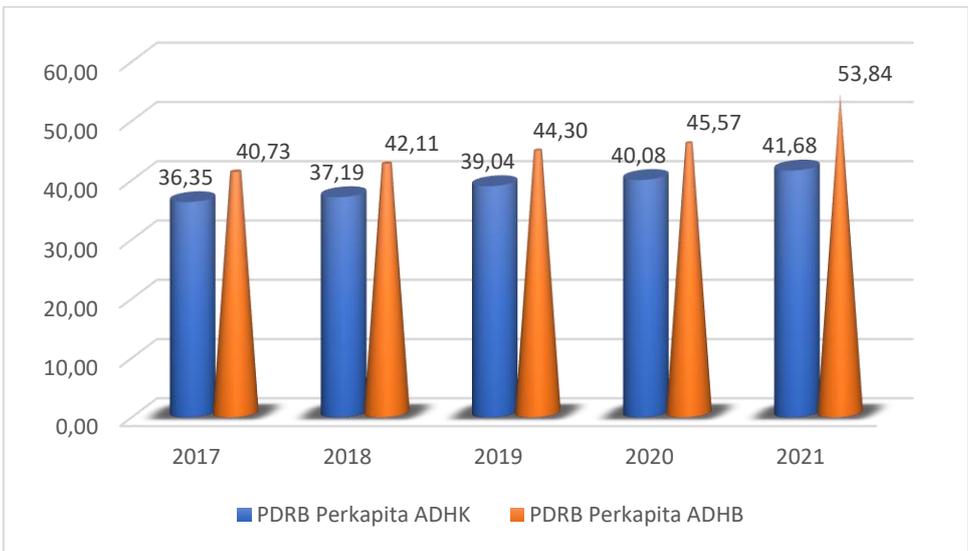
2.3.4. Pendapatan perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB ADHK dengan jumlah penduduk dalam tahun yang bersangkutan. Berdasarkan data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 36,35 juta rupiah, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 41,68 juta rupiah pada tahun 2021.

Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya tersebut

juga sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir. Hingga tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya sebanyak 170.016 jiwa. Untuk melihat perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Nagan Raya (jutaan rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terkahir. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana terjadi peningkatan sekitar 1,85 juta rupiah atau tumbuh sekitar 4,97 persen dari tahun sebelumnya. Sementara peningkatan terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sekitar 0,83 juta rupiah atau sekitar 2,29 persen. Secara rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Nagan Raya meingkat sebesar 1,33 juta rupiah pertahun ada sekitar 3,48 persen.

2.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia sering digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan secara umum. Bahkan tidak jarang ukuran

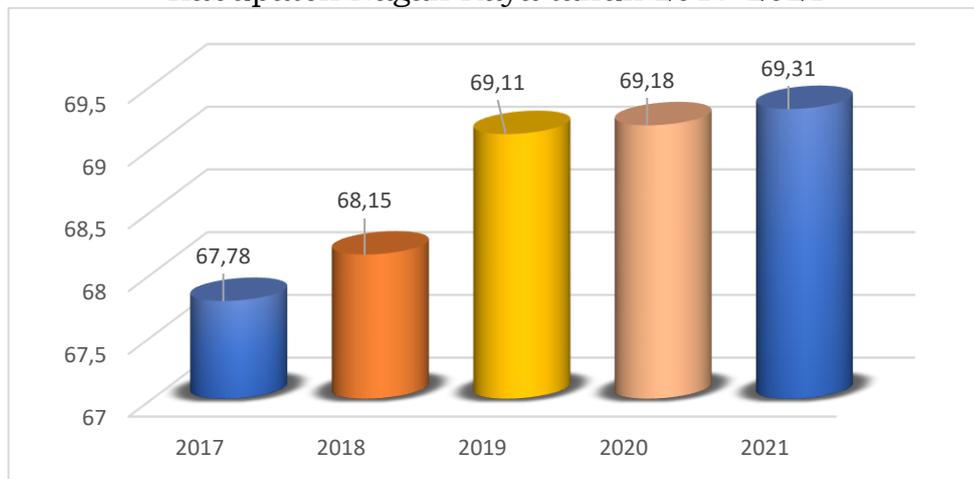


keberhasilan pembangunan sebuah negara kemudian dilihat dari seberapa mampu negara tersebut meningkatkan kesejahteraan penduduknya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penduduknya untuk menikmati umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini kemudian diukur dengan sejumlah indikator yang menjadi indeks komposit yang kemudian dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penggunaan indikator untuk setiap dimensi tersebut Dimensi-dimensi yang digunakan tersebut adalah dimensi kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) dalam tahun, kemudian dimensi pendidikan yaitu pengetahuan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dalam tahun, selanjutnya adalah dimensi pengeluaran yaitu standar hidup yang layak yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita pertahun yang disesuaikan dalam rupiah. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Dari data yang di publikasi oleh Badan Pusat Statisti setiap tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 67,78 kemudian meningkat menjadi 68,15 pada tahun 2018. Nilai IPM kembali terjadi peningkatan menjadi 69,11 pada tahun 2019 dan 69,18 pada tahun 2020. Hingga tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 69,31 atau terjadi peningkatan sebesar 1,53 poin dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk melihat perkembangan nilai IPM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.

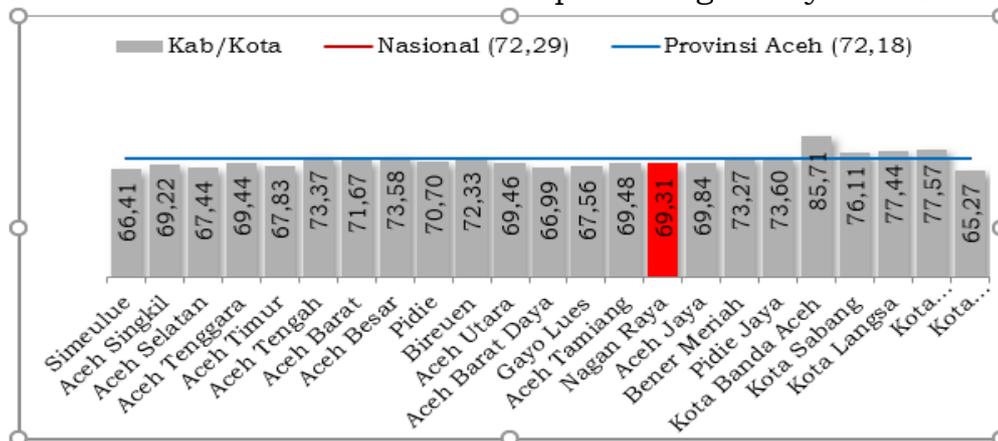
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022

Meskipun terjadi peningkatan, namun capaian nilai IPM Kabupaten Nagan Raya tersebut masih jauh dari rata-rata IPM Provinsi Aceh dan Nasional. Untuk melihat posisi relatif IPM Kabupaten Nagan Raya tahun 2021, kita dapat melihat informasi dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.14 Posisi relatif IPM Kabupaten Nagan Raya tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Nagan Raya sebesar 69,31 masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional yang telah menyentuh angka 72,18 dan 72,29. Bahkan Kabupaten Nagan Raya menempati posisi yang relatif rendah dalam capaian IPM dibandingkan dengan



Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, dimana Kabupaten Nagan Raya menduduki peringkat ke-15 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada, dan masih berada di bawah perolehan nilai IPM Kabupaten tetangga seperti Aceh Barat dengan nilai IPM sebesar 71,67, Aceh Jaya dengan nilai IPM sebesar 69,84. Namun posisi Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki nilai IPM hanya sebesar 66,99.

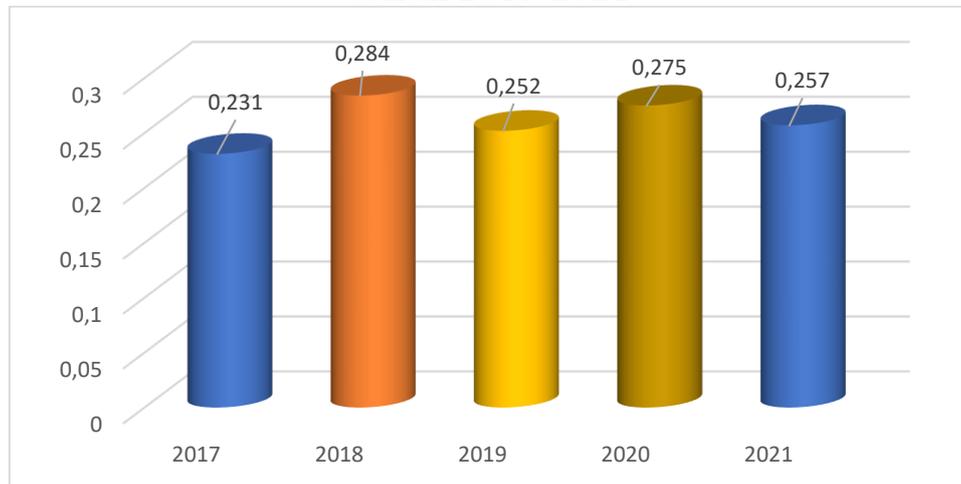
2.3.6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu wilayah sehingga menyebabkan perbedaan pada tingkat kemakmuran mereka. Untuk mengukur ketimpangan yang dialami umumnya menggunakan ukuran tertentu seperti Indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks gini akan mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan diantara penduduk dalam satu wilayah secara menyeluruh. Indeks sering dinyatakan dalam angka yang kisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Menurut (Todaro dan Smith, 2006), seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Selama lima tahun terakhir Indeks gini Kabupaten Nagan Raya cenderung berfluktuatif. Untuk melihat perkembangan indeks gini

Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa capaian IPM Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Misalnya Pada tahun 2017 indek gini Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,231 sebelum mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 0,284. Kemudian pada tahun 2019 nilai indeks ini kemudian menurun Kembali menjadi 0,252 sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 0,275 pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 Indek gini Kabupaten Nagan Raya mengami penurunan Kembali menjadi 0,257. Secara umum selama lima tahun terakhir indek gini Kabupaten Nagan Raya dikatagorikan kedalam tingkat ketimpangan rendah dan berada dibawah indeks gini Aceh dan Nasional.

2.4. Aspek Pembangunan lainnya.

2.4.1. Bidang Pendidikan

2.4.1.1. Pendidikan Islami

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di

Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah Lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Jumlah Penghafal Al-Qur`an, Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an	23 orang	23 orang	40 orang	70 orang	80 orang
2	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun	82%	83%	85%	90%	90%
3	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia >21 tahun	79%	80%	82%	85%	87%
4	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah	10%	10%	11%	57%	85%

Sumber: Dinas Syari'at Islam Kabupaten Nagan Raya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat perkembangan capaian Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir terus terjadi peningkatan. Jumlah penghafal Al-Quran pada tahun 2017 sebanyak 23 orang kemudian terus mengalami

peningkatan hingga menjadi 80 orang pada tahun 2021. Angka melek Al-Quran juga mengalami peningkatan baik di berbagai jenjang usia, kemudian persentase dayah yang memenuhi stadarisasi juga mengalami peningkatan dari 10 persen pada tahun 2017 menjadi 85 persen pada tahun 2021. Secara keseluruhan capaian indikator aspek pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

2.4.1.2. Pendidikan Umum

Pendidikan umum merupakan Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mempunyai jumlah sekolah SD terendah adalah kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Tripa Makmur dan Suka Makmue. Hal ini selaras dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, dimana Kecamatan Tripa Makmur dan Suka Makmue merupakan kecamatan miskin ekstrim prioritas tahun 2022-2023.

Tabel 2.9 Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021/2022

Kecamatan	Sekolah		
	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Darul Makmur	34	13	5
Tripa Makmur	5	1	1
Kuala	13	6	2
Kuala Pesisir	11	4	1
Tadu Raya	20	4	2
Beutong	18	4	2
Beutong Ateuh Banggalang	2	1	-
Seunagan	17	3	2
Suka Makmue	6	2	1
Seunagan Timur	11	2	1
Nagan Raya	137	40	17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya

Jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana SD, pada tahun 2021/2022 terdapat bangunan SD/MI/Sederajat sebanyak 137 unit dengan total murid 14.769 siswa, hal ini menunjukkan tidak tercukupinya sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan jumlah murid yang mengikuti pendidikan SD. Bila dilihat dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasar kecamatan, masih terdapat 2 (dua) kecamatan dengan jumlah sekolah yang dimana hanya memiliki (1) satu sekolah masing-masing yaitu kecamatan Tripa Makmur dan Beutong Ateuh Banggalang.

Hal yang sama juga terlihat pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana terdapat 4 (empat) kecamatan yang masing-masing memiliki 1 (satu) jumlah sekolah, namun hal tersebut selaras dengan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, kecamatan Tripa Makmur, Suka Makmeu dan Seunagan Timur merupakan lokasi prioritas pada tahun 2022-2027, juga terdapat satu kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMA yaitu kecamatan Betoung Ateh Banggalang hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah murid sehingga mengharuskan mereka mengikuti sekolah di luar kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

2.4.1.3. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/ RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 adalah sebanyak 50 unit dengan jumlah siswa 2287 orang. Pada tahun 2018 jumlah siswa TK/RA bertambah menjadi 2.506 orang, kemudian pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 2,582 orang. Berdasarkan data tahun 2017, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan

yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Rasio PAUD di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Jenis	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA	50	50	50	50	47
2	Siswa	2287	2506	2582	2482	4735
3	Penduduk Usia 4-6 tahun	9595	9787	9983	8575	8436
4	Rasio 9%)	4,2	3,91	3,87	3,45	1783
5	Rasio Ketersediaan Sekolah per 10. 000 penduduk	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya

2.4.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang Pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang Pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI sebesar 109,30 persen, turun menjadi 107,85 persen pada tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada tahun 2019, tercatat APK tingkat

SMP/MTs sebesar 103,50 persen dan menurun menjadi 100,24 persen tahun 2020. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA, capaian APK pada tahun 2019 sebesar 81,57 persen dan meningkat menjadi 85,15 persen tahun 2020

Tabel 2.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	APK	
	2019	2020
SD/MI/Sederajat	109,3	107,85
SMP/MTS/Sederajat	103,5	100,24
SMA/SMK/MA/Sederajat	81,57	85,15

Sumber: Nagan Raya dalam angka 2021

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan Batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut

2.4.1.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2019-2020 bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM sebesar 99,70 persen tahun 2019, dan turun menjadi 99,34 persen. APM SMP/MTs tahun 2019 sebesar 86,02 persen sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,64 persen. Untuk APM SMA/SMK/MA pada tahun 2019 sebesar 68,39 persen dan pada

tahun 2020 naik menjadi 68,60. Sedangkan untuk perguruan tinggi belum ada data.

Tabel 2.11. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	APM	
	2019	2020
SD/MI/Sederajat	99,7	99,34
SMP/MTS/Sederajat	86,02	86,64
SMA/SMK/MA/Sederajat	68,39	68,6

Sumber: Nagan Raya dalam angka 2021

Selama ini, kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, karena aspek tersebut merupakan salah satu aspek yang paling mudah diamati, diukur, dan dibandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai aspek lain, seperti : aspek sosial, budaya, pendidikan, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, agama, dan budi pekerti. Ada berbagai hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya.

Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan



bahwa hal itulah salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan dalam dunia kerja, Pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya.

Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat Pendidikan yang rendah ini. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga

2.4.2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Indikator-indikator di bidang kesehatan yang sering dikaitkan dengan status kemiskinan. Orang miskin cenderung memiliki tingkat kesehatan yang buruk, akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas dan juga memiliki tingkat harapan hidup yang rendah. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai derajat kesehatan suatu daerah diantaranya adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian neonatal, angka kematian ibu, angka harapan hidup dan stunting

2.4.2.1. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

Pada tahun 2017 di Kabupaten Nagan Raya jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.926. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2021

sebanyak 52 Angka Kematian Bayi (AKB) dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 2.734 bayi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kesehatan harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

2.4.2.2. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sector kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 yaitu sebesar 36.9 %. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 19.6%. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama.

Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai

fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.

2.4.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 sebesar 7.8 % dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 13.89% per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

2.4.2.4. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan

maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat drastis. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 99.8%, dan semakin meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 438.91%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang. Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

2.4.2.5. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada di setiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu. Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin.

Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita. Hal ini berarti banyak

posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan Raya sampai Tahun 2021 sebanyak 257 unit dengan jumlah Balita 18.582 dengan rasio posyandu per satuan balita 14.80 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.12.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	257	257	257	257	275
2	Jumlah balita	7.455	5.846	3.680	18.402	18.582
	Rasio posyandu persatuan balita satuan balita	34,47	43,96	69,84	69,84	14,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

2.4.2.6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan Kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000- 50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah 0,08, rasio

Poliklinik tahun 2020 adalah 0,05, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,26. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

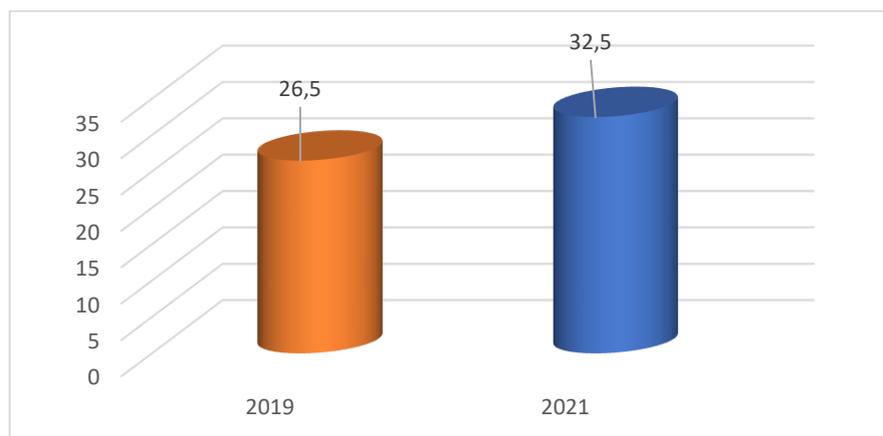
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2022

2.4.2.7. Stunting

Kabupaten Nagan Raya di tetapkan sebagai Kabupaten prioritas penanganan stunting atau menjadi kabupaten lokasi fokus (lokus) stunting pada tahun 2020, berdasarkan data estimasi stunting integrasi survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi stunting Kabupaten Nagan Raya sebesar 26.46 %. Pada Tahun 2020 Kabupaten Nagan Raya menetapkan sebanyak 10 desa lokasi fokus (Lokus) penanganan stunting, Pada Tahun 2021 sesuai dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) preavalensi stunting Kabupaten Nagan Raya sebesar 32,5 %, artinya selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 revalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Gambar berikut akan merangkum perkembangan prevalesi stunting di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir.

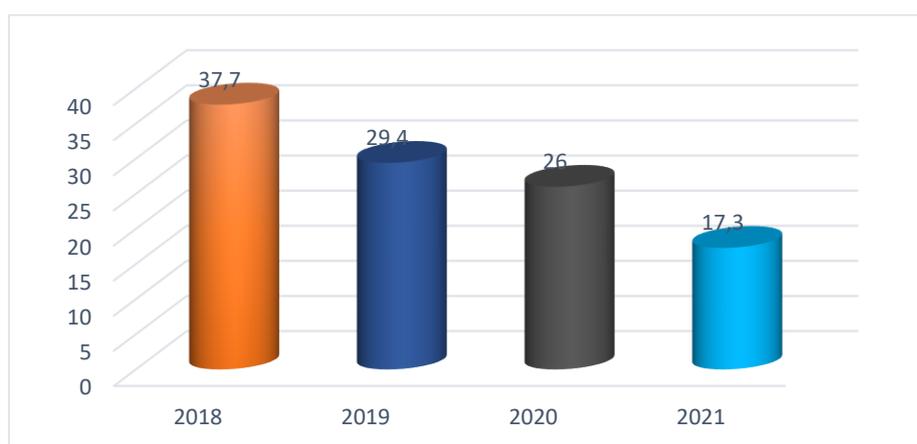
Gambar 2.19. Trend Prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 dan 2021



Sumber: Data SSGI Kemenkes RI

Sementara berdasarkan pengukuran yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya dengan metode Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2018 sebesar 37.7 %, pada Tahun 2019 sebesar 29.4 %, pada Tahun 2020 sebesar 26 % dan pada Tahun 2021 sebesar 17.3 %, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 terus mengalami penurunan. Gambar Berikut akan menampilkan trend prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya

Gambar 2.20. Trend Prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021



Sumber: Data (e-PPGBM) Dinkes Kab. Nagan Raya



Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan 30 gampong sebagai lokus penanganan stunting sesuai dengan Tabel 2.53. berikut:

Tabel 2.14
Daftar Lokasi Fokus Intervensi Kegiatan Pencegahan
Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PERSENTASE STUNTING (%)
1	Tripa Makmur	Neubok yee PK	54,05
2	Tripa Malkmur	Lueng Keubu Jagat	48,28
3	Beutong	Kuta Jeumpa	47,62
4	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Tengoh	47,37
5	Tadu Raya	Rantau Selamat	46,24
6	Kuala Pesisir	Cot Rambong	43,24
7	Kuala Pesisir	Arongan	42,86
8	Darul Makmur	Simpang Deli Kilang	42,11
9	Seunagan	Parom	40
10	Darul Makmur	Suka Ramai	40
11	Kuala	Gunong Reubo	39,39
12	Darul Makmur	Suak Palembang	39,34
13	Seunagan	Kuta Aceh	38,89
14	Darul Makmur	Makarti Jaya	38,1
15	Tripa Makmur	Panton Pange	38,1
16	Seunagan	Paya Undan	37,93
17	Suka Makmue	Alue Kambuek	36,59
18	Suka Makmue	Alue Gajah	36,36
19	Darul Makmur	Alue Rambot	35,77
20	Kuala	Blang Bintang	35,05
21	Tripa Makmur	Ujong Krueng	34,78
22	Beutong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	34,38
23	Kuala Pesisir	Lueng T. Ben	33,33
24	Darul Makmur	Serba Guna	33,01
25	Kuala	Alue Ie Mameh	32,47
26	Kuala	Blang Baro	28,57
27	Darul Makmur	Blang Baro	28,33
28	Darul Makmur	Ujong Lamie	26,45
29	Kuala Pesisir	Kuala Baro	24,24
30	Kuala Pesisir	Pulo	16,67

Sumber: Dinkes Kab. Nagan Raya 2022

Dari Tabel diatas gampong yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 dengan prevalensi berkisar antara 16.67% sampai dengan 54.05%, Gampong Neubok Ye PP dengan prevalensi stunting sebesar 54.05 % dan Gampong Leung Keubu Jagat dengan prevalensi stunting sebesar 48.28 % terletak di Kecamatan Tripa Makmur merupakan Gampong dengan prevalensi dengan prevalensi stunting sebesar 16.67 % terletak di kecamatan Kuala Pesisir merupakan gampong yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting dengan prevalensi terendah.

2.4.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.3.1. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2021, kondisi baik jalan kabupaten 246,124 Km mengalami peningkatan sepanjang 153.91 km dari kondisi awal tahun 2017. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2021 (Km)

Kondisi Jalan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	92,212	118,906	272,27	274,609	246,124
Sedang	59,611	60,316	191,492	409,037	446,925
Rusak Ringan	53,459	52,443	189,171	213,183	198,946
Rusak Berat	719,139	692,756	271,488	27,592	32,426
Jumlah	924,421	924,421	924,421	924,421	924,421

Sumber : Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2022

2.4.3.2. Sanitasi

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2018 sebesar 52,00 %. Pada tahun 2021 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 73,48 %. Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat pesat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30,08 %, namun pada tahun 2020 tidak ada pendataan, sehingga data tahun 2020 disamakan dengan tahun 2019. Untuk tahun 2021 meningkat sebesar 8,63 %. Secara umum dari tahun 2018 hingga tahun 2021 rata-rata peningkatan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya sebesar 12,90 % hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat, masih kurangnya pemicuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2021

URAIAN	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%)	52,00	67,64	67,64	73,48
Pertumbuhan (%)	-	30,08	0	8,63

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

2.4.3.3. Irigasi

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2021 terdiri dari 1 daerah irigasi kewenangan pusat (DI Jeuram) seluas ±6.000 Ha dan 37 daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang melayani hampir seluruh Kabupaten

Nagan Raya menjadi kewenangan daerah seluas ±1.583 Ha Adapun Kondisi Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Jaringan Irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagiaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2017-2021 total panjang jaringan irigasi mengalami kenaikan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2017 sebesar 72.712 meter mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 73.212 meter, sedangkan luas lahan budidaya pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 1.602 Ha. Karena luas lahan budidaya tidak mengalami perubahan, sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2017 adalah 45.39 persen sedikit meningkat menjadi 45.70 persen pada tahun 2021. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2021

No	Jaringan Irigasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	72.712	72.712	73.212	73.212	73.212
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
Rasio Jaringan Irigasi		45,39	45,39	45,70	45,70	45,70

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2022

2.4.3.4. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi: Kecamatan Suka Makmue; Kecamatan Kuala; Kecamatan Kuala Pesisir; Kecamatan Darul Makmur; Kecamatan Seunagan; Kecamatan Beutong; Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang; dan Kecamatan Tadu Raya. Berikut akan di tampilkan table yang menyajikan informasi lebih rinci tentang rasio ruang terbuka hijau Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.18 Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha
2	Luas Kawasan Budidaya	-	-	-	-	-
	Rasio Ruang Terbuka Hijau	0,0093	0,00931	0,00932	0,00933	0,00934

Sumber : DLH Kab. Nagan Raya, 2022

2.4.4. Bidang Sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah berupaya keras dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) serta penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.19 Perkembangan jumlah penyandang PMKS di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021

NO	URAIAN	Tahun/Jumlah (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Dengan Kecatatan	42	43	44	49	55
2	Anak Yatim dan Piatu	706	708	710	750	
3	Anak Terlantar	1	2	7	7	3
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	5	11	16	8
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	768	768	768	768
6	Korban Tindak Kekerasan	-	-	1	2	
7	Lanjut Usia Terlantar	-	-	1		
8	Penyandang Disabilitas	-	-	298	-	2592
9	Tuna Susila	-	-	1	-	
10	Pengemis	-	-	-	-	2
11	Gelandangan	-	-	-	-	-
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	3
13	Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	-	-	-
14	Fakir Miskin	-	-	6.692	-	6014
15	Rumah Tidak Layak Huni	-	-	223	-	-
16	Keluarga Rentan	-	-	943	-	-
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	13	-	-
18	Korban Bencana Alam	-	-	81	-	-
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-
20	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-	-	-

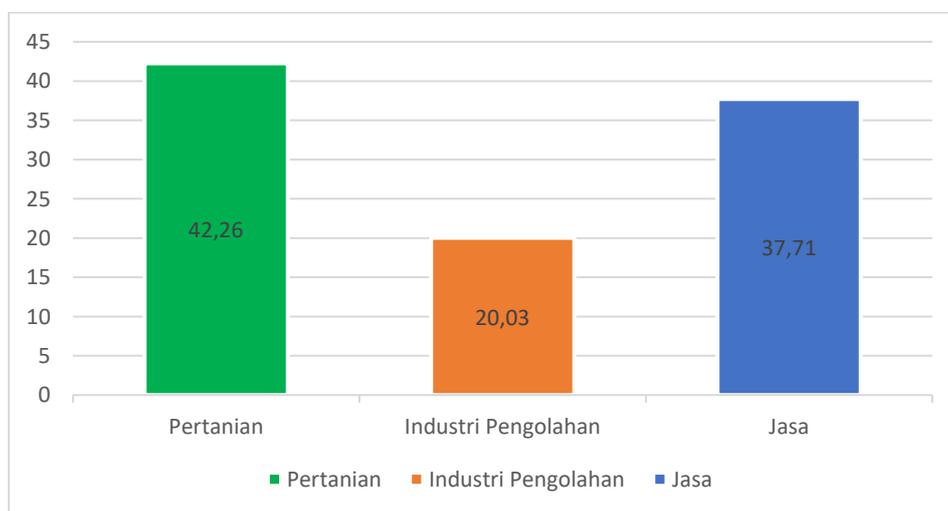
Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2022

Secara umum penduduk Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai perlindungan dan jaminan bagi keluarganya setelah meninggal dengan program asuransi bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, fakir miskin dan keluarga rentan di Kabupaten Nagan Raya, menjadi perhatian Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan perlindungan sosial melalui santuan kematian. Dengan kebijakan program asuransi kematian bagi masyarakat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhannya

2.4.5. Bidang Ketenagakerjaan

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan Angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2021, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen. Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industri pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen. berikut ini akan ditampilkan komposisi jumlah penduduk yang berkerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.21 Kompisis Penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut kelompok lapangan usaha Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat bahwa sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Nagan Raya. komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja adalah di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industri



pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen.

2.4.6. Bidang Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2017-2021 terjadi surplus beras dan pangan. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.20. Produksi Beras Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Beras (kg)	102,892,900	111,537,205	32,950,130	77,759,140	76,100,100
2	Kebutuhan Beras (kg)	19,493,760	19,493,760	20,120,640	18,669,388	19,100,100
3	Surplus Beras (kg)	90,339,140	92,043,445	12,829,490	59,089,752	57,000,000

Sumber: Dinas Pertanian NR 2022

2.4.7. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meskipun dari jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami penurunan, namun jumlah koperasi yang aktif yang ada di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif tercatat 85 unit, kemudian meningkat menjadi 95 unit pada tahun 2021 artinya dalam lima tahun terakhir terdapat penambahan sekitar 10 unit koperasi. Sementara itu jumlah koperasi yang dilakukan pembinaan juga mengalami peningkatan. Untuk melihat kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21 Jumlah dan Status Koperasi
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	194	170	141	138	143
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	85	85	87	90	95
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	109	85	54	48	48
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Unit	20	20	25	25	30
5	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	9.519	8.964	5.859	7.084	7.213

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Nagan Raya, 2022

Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat terutama di tingkat gampong. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota.

Selain itu, Kabupaten Nagan Raya juga memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan peningkatan jumlah industri. Pada tahun 2017, terdapat 3.198 unit industri tradisional di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah industri tersebut mengalami peningkatan sebanyak 5.130 unit pada tahun 2021. Penyumbang terbanyak pada industri ini di tahun 2021 adalah industri makanan dan tembakau sebanyak 1437 unit. Posisi berikutnya di tempati oleh industri barang lainnya yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing-masing sebanyak 1.250 unit. Industri yang berkembang pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas

industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah.

2.4.8. Bidang Parawisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya.

Tabel 2.22 Daftar Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS OBJEK WISATA	JUMLAH OBJEK WISATA
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	5
		Panorama Gunung Singgah Mata	
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Masjid Dayah	
		Makam Teungku Di Seumot	
2	Kuala Pesisir	Wisata Pantai Indah Naga Permai	2
		Wisata Pantai Seunagan	
3	Tripa Makmur	Wisata Pantai Suak Dama	3
		Arung Jeuram Krueng Tripa	
		Situs Kerajaan Islam Ujong Raja	
4	Tadu Raya	Danau Laut Tadu	2
		Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani	
5	Seunagan Timur	Makam Habib Muda Seunangan	1
6	Kuala	Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh	1
7	Suka Makmue	Taman Makam Pahlawan	1
8	Darul Makmur	Air Terjun Alue Waki	1
9	Beutong AB	Batee Meucureh Cut Nyak Dhien	1
10	Seunagan	Makam Indatu Kuta Aceh	1
Jumlah			18

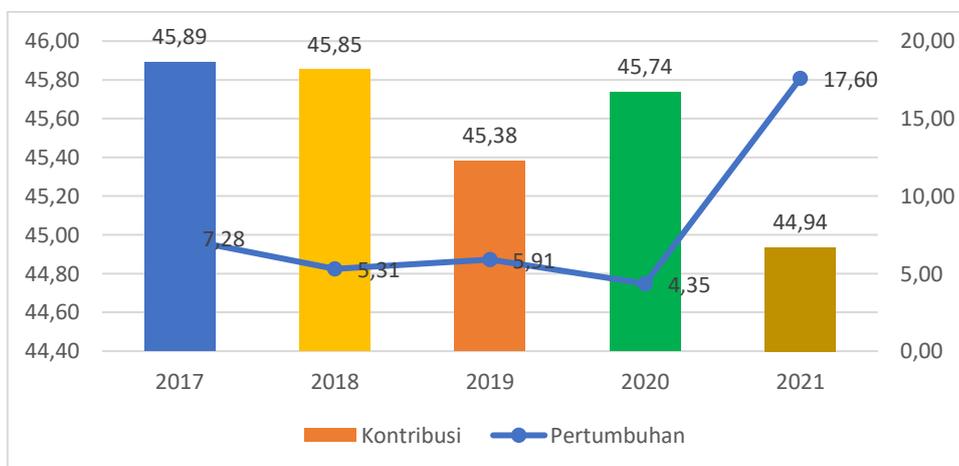
Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlumengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

2.4.9. Bidang Pertanian

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya tidak banyak mengalami perubahan, sektor pertanian secara luas termasuk sektor kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya tercatat ada sekitar angka 44-45 persen. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini dalam PDRB Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 45,89 persen kemudian mengalami penurunan terus menerus hingga pada tahun 2021 kontribusi sektor ini hanya sebesar 44,94 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,95 poin. Perkembangan sektor pertanian dalam arti luas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.6. Kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat menyaksikan bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan terjadinya kenaikan kontribusi sektor lain terutama sektor pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 8,29 persen kemudian meningkat menjadi 21,40 persen. Disamping itu penurunan kontribusi sektor pertanian juga disebabkan oleh penurunan produksi pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Sementara itu laju pertumbuhan sektor pertanian cukup berfluktuasi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2021 laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 17,60 persen, angka ini jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 7,28 persen, kemudian menurun menjadi 5,31 persen pada tahun 2018 sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 5,91 persen pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2020 kembali sektor ini kembali mengalami penurunan menjadi 4,35 persen sebelum meningkat menjadi 17,60 persen pada tahun 2021.

Sektor pertanian dalam arti luas menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Nagan Raya, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pertanian menerapkan strategi dengan memposisikan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan diantaranya melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian yang diarahkan agar mampu mendongkrak PDRB sektor pertanian. Peran sektor pertanian secara konvensional ditunjukkan oleh besarnya persentase Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir.

2.5. Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemsikinan

2.5.1. Regulasi Daerah ttg Penanggulangan Kemiskinan

Sampai Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah selesai memparipurnakan Qanun Tentang penanggulangan kemiskinan daerah. Hal ini merupakan suatu hal yang harus mendapat respon cepat dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya mengingat bahwa regulasi tentang penanggulangan kemiskinan baik berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah (qanun) merupakan suatu hal yang merupakan landasan hukum serta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Qanun Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sudah pada tahapan selesai diparipurna, saat ini qanun dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Setda Provinsi Aceh untuk registrasi Qanun. Selain qanun regulasi Daerah tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Nagan Raya. Tujuan penyusunan SPKD Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya bersama para stakeholder.
2. Upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG'S).
3. Pengintegrasian dokumen perencanaan dan anggaran daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya secara bertahap, berkelanjutan, komprehensif, dan sinergi.

Sesuai dengan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Strategi dan Program. Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Nagan Raya, merupakan dasar penyusunan RPJMK bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam SPKD juga tertuang dalam RPJMK, dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan Kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.

2.5.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, seperti yang dilaksanakan di Kabupaten/kota lainnya dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar program dan kegiatan yang dimaksud terdiri dari;

1. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa program bersasaran (klaster 1, 2 dan 3);
2. Program regular pada sektor-sektor yang merupakan dimensi kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, dan ketahanan pangan.

2.5.2.1. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (*targeted program*). Program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang sudah dijalankan di daerah, baik program nasional maupun program daerah sendiri sebagai mana tercantum pada tabel berikut Program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif artinya program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program penanggulangn kemiskinan kepada mereka yang

membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penaggualangan kemiskinan.

a. Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga Dan Rumah Tangga (Kluster I)

Program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dan rumah tangga bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya bisa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

b. Program Pemeberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas (Kluster II)

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemeberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulanagn kemiskinan. Pada tahap ini masyarakat miskin mulai menyadari kamampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Kelompok miskin ini di anggap yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilkinya walaupun terdapat keterbatasan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro dan Kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tabel 2.7

Klaster 1. Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga Tahun 2021

	PROGRAM NASIONAL					PROGRAM DAERAH		
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Program Rastra/ Bantuan Pangan	Bantuan Langsung Tunai/BLT DD	Program Jaminan Kesehatan (KIS)	Program Jaminan Pendidikan (KIP)	Program Santunan Kematian	Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	Program Jaminan Kesehatan Aceh
Jenis Transfer	Tunai	Non Tunai (bantuan pangan)	Tunai	Non Tunai pelayanan kesehatan	Tunai	Tunai	Tunai	Non Tunai/ pelayanan Kesehatan
Sasaran	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	Keluarga Miskin Penerima Rastra sesuai DTKS	Keluarga Miskin sesuai DTKS	Masyarakat kurang mampu/ Miskin, Peserta program Indonesia sehat	Siswa tidak mampu SD - SMP yang terdaftar sebagai penerima KIP	Keluarga Miskin sesuai DTKS	Mahasiswa berprestasi Kabupaten Nagan Raya	Penduduk Provinsi Aceh
Jumlah penerima Manfaat	5.362 KPM	16.655 KPM	9.638 KPM	147.489 jiwa (PBI APBN 59.556 jiwa, PBI APBD- JKA 65.322 jiwa, Non PBI 22.611 jiwa)	12.178 siswa (SD 8.633 siswa, SMP 3.545 siswa)	382 Keluarga	Tidak terealisasi	65.322 jiwa
Jumlah Bantuan	Rp. 27.385.130.000	Rp. 200.000,-/ KPM/bulan. Total Rp.39.996.000.000	Rp. 31.808.400.000	Rp. 8,993.045.625,- (jumlah keseluruhan dana kapitasi PBI dan Non PBI)	Rp.3.464.775.000,- untuk SD dan Rp.2.151.750.000,- untuk SMP)	Rp. 2.400.000.000,-	Rp. 1.800.000.000,-	DTT*
SKPD Pelaksana	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Pemerintahan Desa	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Bag. Keisra /Setdakab	Bag. Keisra /Setdakab	BPJS Kesehatan

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Tabel 2.8
Klaster 2. Program Perberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

	PROGRAM NASIONAL			PROGRAM DAERAH	
	Program Dana Desa	Pendampingan Usaha Sektoral/ KUBE	Program Alokasi Dana Gampong	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/ Kegiatan Pembinaan PKK	Program Alokasi Dana Gampong (ADG)
Jenis Transfer	Tunai	Non Tunai	Tunai	Non Tunai	Non Tunai
Sasaran	Desa yang ada dalam Wil Kab. Nagan Raya	Kelompok Masyarakat Miskin/ Sesuai BDT	Desa yang ada dalam Wil Kab. Nagan Raya	Kelompok PKK Tingkat kabupaten, Kecamatan dan gampong	Desa dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah penerima Manfaat	222 Desa	DTT*	222 Desa	10 kecamatan/ 222 gampong	222 desa
Jumlah bantuan	Rp. 175.871.395.000	DTT*	Rp.48.410.724.200,-	Rp. 598.233.765,-	Rp. 48.410.724.200,-
SKPD Pelaksana	DPMGP4	Dinas Sosial	DPMGP4	DMPGP4	DPMGP4

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021
Ket DTT* : Data tidak tersedia

Tabel 2.9
Klaster 3. Program Perberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

	PROGRAM NASIONAL			PROGRAM DAERAH		
	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	Pengembangan Ekonomi Lokal (Dana Desa)	Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Program Pengembangan Kewirausahaan / Pelatihan Manajemen	Program pengembangan Industri kecil dan menengah/ Kegiatan
Jenis Transfer	Tunai	Tunai	Tunai/ Non Tunai	Non Tunai	Non Tunai	Non Tunai
Sasaran	Usaha menengah, Kecil dan Mikro/ UMKM	Pelaku Usaha Mikro	Kelompok masyarakat desa	KPM PKH Graduasi 2019	Kelompok Masyarakat	Unsur Dekranas/ Kelompok Masyarakat
Jumlah Penerima Manfaat	DTT*	5.271 Usaha Mikro	DTT*	40 KPM	50 orang	20 orang
Jumlah bantuan	DTT*	Rp. 6.325.500.000	DTT*	Rp. 1.250.000.000,- Ket : Bantuan dalam bentuk barang	Rp. 734.640.000,-	Rp. 832.430.000,-
SKPD Pelaksana	Unsur Perbankan	Disperindagkop	DPMGP4	Dinas Sosial	Disperindagkop	Disperindagkop

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021
Ket DTT* : Data tidak tersedia

Berdasarkan data di atas, pada prinsipnya program bersasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7, tabel 2.8, dan tabel 2.9 di atas, telah terdapat sinkronisasi dan sinergitas antar program, baik program nasional dengan program daerah maupun antar sektor. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dan perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Sinkronisasi dan sinergitas tersebut dapat terlihat misalnya untuk klaster I (Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga Dan Rumah Tangga) dimana Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sinergitas dengan program Pelatihan Ketarmpilan.

Demikian juga dengan Program Jaminan Pendidikan (Kartu Indonesia Pintar) telah sinkron dengan Program Beasiswa Miskin. Program – program lainnya saling melengkapi antara program nasional dengan program daerah, seperti Program Rastra (bantuan pangan), Program Jaminan Kesehatan, Program pelatihan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD terkait. Untuk klaster II (Program Perberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas), perencanaan program nasional berupa Program Dana Desa juga telah sinergi dengan program dan kegiatan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Perkoperasian. Demikian juga untuk perencanaan program kegiatan pada klaster III (Program Perberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Mikro dan Kecil), dimana program Nasional berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat memiliki sinergita dengan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Perkoperasian.

Sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya masih perlu dilakukan koordinasi yang lebih komprehensif. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan serta

monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum pada klaster I, klaster II dan klaster III belum dilakukan secara terkoordinasi, bahkan terkesan masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing SKPK terkait. Berkaitan dengan komplementaritas antar program atau antara program nasional dengan program daerah, sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari program-program pada klaster I, klaster II dan klaster III, telah saling melengkapi dan saling memaksimalkan. Berkaitan dengan penerima manfaat program, pada prinsipnya telah tersedia data terpadu dari Kementerian Sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penanggulangan Kemiskinan dan telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi melalui musyawarah gampong serta telah diinput dalam Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). DTKS hasil verifikasi Tahun 2019 tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial untuk digunakan sebagai data penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.

Salah satu permasalahan terkait data untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya adalah bahwa penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya bersumber dari DTKS. Hanya Program BPNT/bantuan pangan, PKH dan Santunan Kematian yang telah sepenuhnya menggunakan DTKS, sedangkan program-program lainnya masih menggunakan data dari sumber lainnya ataupun dilaksanakan dengan metode pendataan yang tidak berbasis DTKS sehingga penanggulangan belum sepenuhnya menjangkau penduduk miskin.

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Konsep Penanggulangan Kemiskinan
- 3.2. Gambaran Umum Kemiskinan Daerah
- 3.3. Indikator Kemiskinan Daerah
- 3.4. Kemiskinan Ekstrem



BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Dalam beberapa dekade terakhir, pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda utama pembangunan negara-negara di dunia, agenda ini kemudian diwujudkan dengan adanya penandatanganan tujuan pembangunan melenium atau disebut dengan *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2000. Tujuan pembangunan ini kemudian disempurnakan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SGDs)* pada tahun 2015. Penandatanganan tujuan pembangunan ini merupakan bukti komitmen Bersama komunitas dunia menjadikan agenda pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan mereka. Sejalan dengan upaya ini, dalam beberapa tahun terakhir khususnya sebelum wabah covid-19 melanda dunia, statistik tingkat kemiskinan dunia terus menunjukkan penurunan. World Bank (2020) menyebutkan pada tahun pada tahun 2011 sekitar 13,8 persen dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan, jumlah ini kemudian turun menjadi sekitar 9,2 persen pada tahun 2017 atau sama dengan 689 juta orang.

Kemiskinan merupakan fonomena multidimensi yang akan memepengaruhi multidimensi aspek kehidupan pula. Oleh karena itu kemiskinan sering diukur tidak hanya dengan ukuran dimensi moneter namun juga menggunakan ukuran dimensi lain pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Menurut pendekatan moneter, kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum (Alkire, 2013; Haughton & Khandker, 2009; Todaro & Smith, 2014). Kemiskinan dalam pendekatan moneter sering diukur dengan membandingkan antara pendapatan seseorang individu dengan ambang batas garis kemiskinan. Namun pengukuran kemiskinan dengan pendekatan

moneter yang biasanya diukur dengan pendapatan atau pengeluaran dipandang belum dapat menggambarkan kondisi seutuhnya dari kemiskinan. Seseorang yang mengalami peningkatan pendapatan belum tentu dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan, karena kemiskinan adalah fenomena multidimensi. Chimhowu (2009) menyebutkan bahwa peningkatan dari pendapatan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga jika pendapatan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. Alkire & Santos (2013) mengungkapkan bahwa ada perbedaan kapasitas di antara rumah tangga dalam mengkonversi pendapatan yang mereka peroleh dalam mengakses keranjang barang dan jasa, hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, rumah tangga yang jauh dari pasar dan layanan publik, rumah tangga penyandang disabilitas.

3.1.1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Berbagai pengertian mengenai kemiskinan dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Friedman (2002) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. Bellinger (2007) yang berpendapat bahwa kemiskinan memiliki dua dimensi yaitu dimensi pendapatan dan nonpendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki pendapatan rendah, sedangkan dari dimensi non pendapatan ditandai dengan adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan, tidak adanya perwakilan dan kebebasan.

Kemiskinan dari sisi pendapatan lebih sering didiskusikan karena lebih mudah diukur dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan, dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I (Bappenas, 2010).

Penelitian tentang kemiskinan secara tradisional didominasi oleh kemiskinan moneter, mungkin karena relatif mudah diukur, dan dikembangkan serta secara metodologis. Namun, semakin diakui bahwa kemiskinan moneter mencerminkan hanya salah satu aspek dari kemiskinan multidimensi. Menurut Sen (1999), World Bank (2000), dan Nogami (2008) pemahaman tentang kemiskinan saat ini jauh melampaui pendekatan konvensional berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Studi tentang kemiskinan secara lebih mendalam telah dilakukan oleh (Laderchi *et al.*, 2003) yang menjelaskan definisi dari kemiskinan dari berbagai pendekatan, secara umum ada beberapa pendekatan dalam memahami konsep kemiskinan yang telah di pahami dan dipraktekkan secara luas oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Pendekatan pertama yaitu kemiskinan dipandang dalam pendekatan moneter, yang kedua kemiskinan

dipandang sebagai ukuran yang lebih luas dari itu yaitu pendekatan non-moneter sedangkan yang ketiga adalah pendekatan kapabilitas.

a. Pendekatan Moneter

Menurut pendekatan moneter, kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum (Alkire, 2013; Hagenaars, 2017; Haughton & Khandker, 2009; Todaro & Smith, 2014). Dalam pendekatan moneter kemiskinan sering diukur dengan membandingkan antara pendapatan seseorang individu dengan ambang batas garis kemiskinan, mereka yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dimasukkan dalam katagori miskin, jadi pendapatan dianggap dapat menangkap dengan cukup baik apakah masyarakat mampu mencapai ambang batas minimum tertentu dalam berbagai dimensi, seperti gizi, pakaian dan rumah (Alkire, 2013). Berdasarkan ini indek kemiskinan agregat sering digunakan untuk mengukur kemiskinan.

b. Pendekatan Non Moneter

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang lebih luas dari pendekatan moneter, pendekatan ini memasukkan ukuran lain seperti kepemilikan atau konsumsi suatu barang/jasa seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan sebagai kebutuhan dasar. Chimhowu (2009) menyebutkan bahwa peningkatan dari pendapatan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga jika pendapatan belum dapat memenuhi kebutuhan yang multidimensi. Dalam pandangan penganut pendekatan ini, rumah tangga tanpa akses ke hak-hak dasar seperti tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, air minum yang bersih, pendidikan, kesehatan, masuk dalam katagori miskin (Yunus, 2007).

c. Pendekatan Kapabilitas.

Pendekatan ke tiga adalah pendekatan kapabilitas yang dipelopori oleh Amartya Sen, pendekatan ini melihat bahwa kesejahteraan itu adalah kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam suatu

masyarakat, jadi kemiskinan dipahami sebagai hilangnya kapabilitas seseorang dalam masyarakat yang biasanya ditandai dengan kegagalan individu mendapatkan kapabilitas dasar, yang menyebabkan tiadanya kesempatan dan pilihan untuk hidup secara bermartabat. Pendekatan Sen kemudian diukur dengan sebuah indeks kemiskinan multidimensi. Lebih lanjut Alkire & Foster (2011) melihat kemiskinan sebagai kehilangan kemampuan dan kurangnya kebebasan, Kekurangan tersebut antara lain, pendapatan rendah, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, ketidakamanan, kepercayaan diri rendah, rasa tidak berdaya dan tidak adanya hak seperti kebebasan berbicara. Robeyns (2005) menjelaskan bahwa pendekatan ini mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi sebagai indikator kemiskinan.

Jika dilihat perbandingan ketiga pendekatan dalam memberikan definisi dari kemiskinan ini, pendekatan kapabilitas melihat kemiskinan dalam perspektif yang lebih luas tentang kemiskinan, pendekatan kapabilitas mengungkapkan bahwa definisi kemiskinan harus fokus pada manfaat kesejahteraan dari pendapatan dan bukan pada utilitas yang diperoleh darinya. Misalnya, menjadi terdidik cukup makan dan bebas untuk melakukan pilihan memberikan individu standar hidup yang lebih baik daripada menjadi kaya tetapi dalam kesehatan yang buruk (Chimhowu, 2009).

Dalam perspektif ini, kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang sangat bergantung pada nilai-nilai masyarakat. Pendekatan ini dipandang sebagai satu satunya pendekatan yang paling lengkap untuk saat ini, melalui pendekatan ini muncul berbagai jalan alternatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, bahkan indeks kemiskinan multidimensi yang telah diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa tahun yang lalu adalah bagian dari pendekatan kapabilitas. Namun meskipun demikian, perbedaan pendekatan utama terhadap kemiskinan dipandang sebagai

pelengkap dalam arti bahwa mereka dapat berdampingan dan digunakan dalam banyak studi kemiskinan kontemporer (Gordon, 2009).

Di samping dari pada itu kemiskinan juga sering dibedakan antara kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan kronis sering di definisikan sebagai gambaran kondisi yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan kemiskinan non kronis atau sementara adalah definisi kemiskinan yang merujuk pada pengalaman mereka yang rentan miskin atau juga terkadang miskin dapat jadi karena, guncangan seperti banjir, gagal panen dan resesi ekonomi. Dalam banyak kasus, mereka juga menderita kecacatan, kurangnya jaringan sosial, pengucilan sosial dan/atau diskriminasi social (Hulme & Shepherd, 2003). Sementara Haughton & Khander (2009) menjelaskan bahwa kerentanan mengacu pada mereka yang mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menjadi miskin di tahun depan. Dengan demikian ada resiko bahwa mereka dihadapkan pada ancaman kegagalan untuk mencapai standar pendapatan minimum atau dimensi kesejahteraan tertentu pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap studi tentang kemiskinan.

Dalam prakteknya kemiskinan juga sering dibedakan antara kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada situasi di mana individu/rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan resmi yang biasanya ditentukan berdasarkan survei nasional atau tolok ukur internasional. Oleh karena itu, garis kemiskinan absolut rumah tangga bervariasi menurut besarnya rumah tangga. Sedangkan kemiskinan relatif biasanya dipahami sebagai sejauh mana pendapatan individu/rumah tangga berada di bawah rata-rata pendapatan di suatu daerah. Dengan demikian, ini sering dilihat sebagai indikator ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Dalam studi tentang kemiskinan, secara agregat *headcount poverty* telah digunakan secara luas sebagai ukuran, bahkan sukses tidaknya pembangunan suatu negara diukur dari perubahan dalam tingkat kemiskinan. Ukuran ini melihat kemiskinan dalam konsep statis yaitu gambaran dari kondisi kesejahteraan pada satu waktu tertentu. Sedangkan studi kemiskinan pada level rumah tangga menekankan bahwa status rumah tangga penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Berdasarkan pendekatan moneter kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dibandingkan dengan garis kemiskinan sebagai dasar bagi rumah tangga tertentu memiliki status miskin.

Rumah tangga yang dianggap miskin adalah mereka yang konsumsi perkapita saat ini di bawah garis kemiskinan. Selain dari pada itu pada kenyataannya kemiskinan memiliki konsep dinamis di mana status kemiskinan seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Studi Jalan & Ravallion (1999) tentang rumah tangga perdesaan di china menemukan bahwa hanya 6,2 persen rumah tangga yang selalu miskin, kurang dari 20 persen dianggap miskin pada tahun tertentu, sementara 54 persen dari sampel telah mengalami setidaknya satu episode kemiskinan selama periode enam tahun ini. Hal ini menunjukkan kemiskinan pada kenyataan memiliki konsep dinamis. artinya selalu ada kemungkinan bahwa pada suatu saat di masa depan orang-orang yang saat ini tidak miskin dapat jatuh di bawah garis kemiskinan, dan mungkin juga orang-orang yang saat ini miskin dapat keluar dari kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan dalam konsep dinamis memperkenalkan konsep kerentanan yang didefinisikan sebagai risiko rumah tangga atau individu menjadi miskin dalam di masa yang akan datang.

Kerentanan yang dihadapi oleh rumah tangga dapat disebabkan oleh guncangan yang di hadapi sepanjang hidup mereka, peristiwa tersebut misalnya gagal panen, kehilangan pekerjaan, pengeluaran

tak terduga, penyakit mendadak, atau kegagalan dalam bisnis, perpisahan, perceraian, dan pensiun dini (Goodin *et al.*, 1999; Pritchett *et al.*, 2000). Namun secara umum tipe dari guncangan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kejadiannya (individu, komunitas, negara), berdasarkan sifat kejadian (bencana alam, masalah kesehatan, dan masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan), dan juga keparahan dan frekuensi guncangan (World Bank, 2000). Sejalan dengan argumen di atas, Ravallion (1988), Morduch (1994) menjelaskan bahwa secara umum studi tentang kemiskinan dapatnya membagi kemiskinan dalam dua katagori, yaitu kemiskinan kronis, kemiskinan sementara.

Sementara Morduch (1994), Hulme & Shepherd (2003), Green & Hulme (2005) berpendapat bahwa rumah tangga yang miskin kronis adalah mereka yang dalam beberpa tahun tetap dalam kemiskinan, sedangkan kemiskinan sementara adalah mereka yang jatuh dalam kemiskinan hanya beberap kali. Pengkatagorian ini biasanya dilakukan dalam studi data panel, yang memungkinkan untuk menentukan berapa kali rumah tangga tersebut jatuh miskin. Sedangkan yang rentan miskin adalah mereka yang pada saat ini berada berada sedikit di atas garis kemiskinan (Haughton & Khandker, 2009).

Kemiskinan multidimensi pertama kali dipelopori oleh pendekatan kapabilitas Amartya Sen, pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai hilangnya kapabilitas seseorang dalam masyarakat yang biasanya ditandai dengan kegagalan individu mendapatkan kapabilitas dasar, yang menyebabkan hilangnya kesempatan dan pilihan untuk hidup secara bermartabat. Pendekatan Sen diukur dengan sebuah indeks kemiskinan multidimensi. Sejalan dengan ini, Alkire (2013) melihat kemiskinan sebagai kekurangan kapabilitas dan kurangnya kebebasan, Kekurangan tersebut antara lain, pendapatan rendah, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, ketidakamanan,

kepercayaan diri rendah, rasa tidak berdaya dan tidak adanya hak seperti kebebasan berbicara. Pendekatan ini mempertimbangkan dimensi sosial ekonomi sebagai indikator kemiskinan (Alkire & Foster, 2007 & Robeyns, 2005)

Dalam analisis kemiskinan umumnya kita diperkenalkan dengan beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena kemiskinan di suatu daerah. Indikator dimaksud diantaranya adalah jumlah penduduk miskin, *head-count ratio* (P0) yang memberikan gambaran tentang persentase penduduk miskin, Indeks kedalaman kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator makro ini umumnya sering digunakan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di suatu daerah.

3.1.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Bradshaw (2005) penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberlanjutannya yaitu pelaku, proses, evaluasi dan dasar teori yang relevan. Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Terhadap hal ini Dasgupta (2003) menyatakan desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

1. Spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal
2. Relevan dengan permasalahan
3. Di dasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat tidak berdiri sendiri
4. Memahami konsekuensi yang tidak diinginkan

5. Berbasis sumber daya lokal agar berhasil program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat.

Menurut Pramanik dalam Hasan (2010) strategi program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu (a) strategi tidak langsung yaitu suatu kerangka kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan dan (b) strategi langsung yaitu suatu kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk menjamin perolehan akses kredit perbaikan kondisi kesehatan dan peningkatan pendidikan. Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial. Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini

dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan Pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan

yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan.

Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada penduduk miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang secara politik, sosial dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat) demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan

karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan, fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar, selanjutnya diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian.

Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan, setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional, pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

3.2. Gambaran Umum Kemiskinan Daerah.

Dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakannya, meskipun upaya ini berhasil menurunkan angka kemiskinan secara agregat, namun ada kecenderungan laju penurunannya cenderung melambat baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan juga agak beragam antar wilayah, ada wilayah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan relatif lebih cepat namun ada wilayah yang penurunan kemiskinannya relatif lebih lambat. Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dinilai berjalan lambat sebenarnya mulai terjadi setelah krisis keuangan yang dialami Indonesia pada tahun 1997–1998. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir akibat adanya pandemi Covid-19 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan.

Selama satu dekade terakhir yaitu periode 2011-2019 jumlah penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari kemiskinan lebih kurang sekitar 5,11 juta orang yaitu dari 29,89 juta orang tahun 2011 menjadi 24,78 juta orang pada tahun 2019, atau secara rata-rata

sekitar 0,63 juta orang setiap tahunnya. Namun per-September 2020 jumlah penduduk miskin kembali terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 27,55 juta orang atau bertambah sekitar 2,7 juta orang, dimana peningkatan ini dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Jumlah penduduk miskin Indonesia kemudian menurun kembali hingga mencapai 26,5 juta pada tahun 2022. Jika di lihat dari sisi persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai angka sekitar 9,22 persen. Namun kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 10,19 persen sebelum akhirnya terjadi penurunan kembali menjadi 9,71 persen pada tahun 2021 dan 9,57 persen pada tahun 2022.

Pola yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Sejak periode awal RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2005 persentase kemiskinan sangat tinggi yaitu sebesar 36,18 persen dengan jumlah orang miskin sebanyak 45,8 ribu jiwa. Namun Jumlah dan persentase penduduk miskin kemudian terus mengalami penurunan sepanjang tahun. Hingga tahun 2019 sebelum covid-19 melanda Indonesia persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya sebesar 17,97 persen dengan jumlah orang miskin sebanyak 29,93 ribu jiwa. Namun akibat wabah Covid-19 yang melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya meningkat hingga menembus angka 18,23 persen atau sekitar 30,71 ribu jiwa pada tahun 2021. Sebelum akhirnya terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi sekitar 17,38 persen atau sekitar 29,63 ribu jiwa. Pada tahun 2022 Kabupaten Nagan Raya menempati urutan ke-10 jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Aceh. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya dari periode awal RPJP tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Persentase Kemiskinan 2005-2022

No	Kab/Prov/Nasional	Tahun Awal RPJP 2005	Perkembangan Persentase Kemiskinan		
			2005-2012	2012-2017	2017-2022
1	Nagan Raya	36,18	22,20	19,34	17,38
2	Provinsi Aceh	28,69	17,60	16,89	14,64
3	Indonesia	15,97	11,96	10,64	9,54

Sumber: BPS

Informasi yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2005 persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya jauh lebih tinggi dari Provinsi Aceh dan Nasional. Namun capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan di Nagan Raya dalam dua dekade terakhir ini jauh lebih baik, hal ini dapat kita amati dari capaian penurunan persentase kemiskinan (2005-2012). Penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya pada periode tersebut sebesar 13,98 persen (dari 36,18 persen menjadi 22,20 persen). Sedangkan di tingkat Provinsi dan Nasional masing-masing hanya sebesar 11,09 dan 4,01 persen. Kemudian periode selanjutnya (2012-2017) capaian penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya mencapai sebesar 2,86 persen, sementara Provinsi Aceh dan Nasional hanya mencapai 0,71 dan 1,72 persen. Untuk periode selanjutnya (2017-2022) kinerja penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sebesar hanya 1,96 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Hal ini membutuhkan

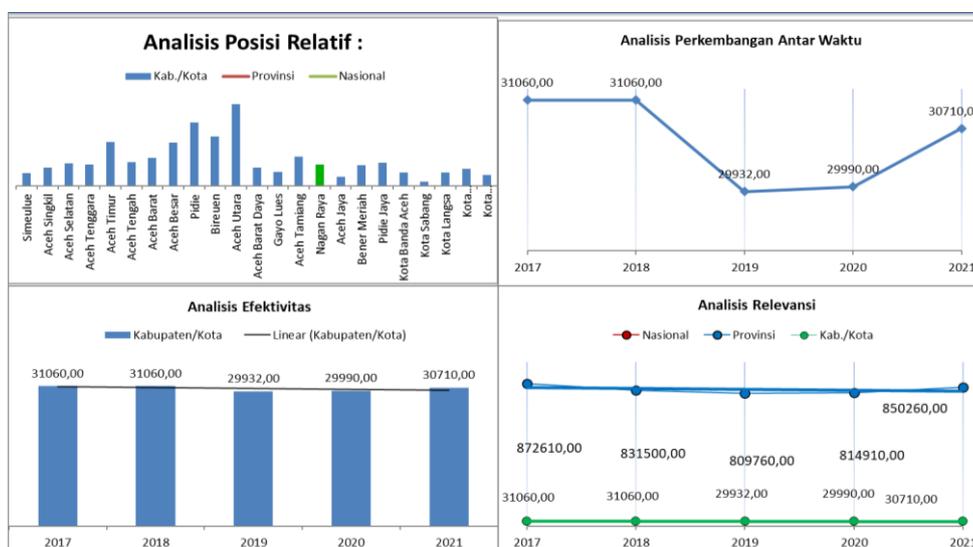
3.3. Indikator Kemiskinan Daerah

3.3.1. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis

kemiskinan. Selama satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2019 sebelum wabah covid-19 melanda dunia pada umumnya dan juga Indonesia pada khususnya, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya sudah menyentuh angka 29,93 ribu jiwa. Namun akibat wabah Covid-19 yang melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya meningkat hingga menembus angka 30,71 ribu jiwa pada tahun 2021. Kabupaten Nagan Raya menempati urutan ke-11 jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Aceh. Untuk mengetahui gambaran umum analisis identifikasi masalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1. Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2022



Sumber: BPS 2022

Berdasarkan analisis identifikasi masalah pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa dalam mengidentifikasi masalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya ada empat analisis yang dapat dilakukan yaitu analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi.

3.3.1.1. Analisis Posisi Realatif

Berdasarkan analisis posisi relatif pada gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebanyak 30,71 ribu jiwa masih lebih rendah dibanding Kabupaten Aceh Utara dan Pidie. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya menempati peringkat ke-11 jumlah penduduk miskin terbanyak. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar yaitu Aceh Utara sebanyak 109.490 jiwa dan Pidie dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua yaitu sebanyak 85.530 jiwa. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah kota Sabang sebanyak 5.330,00 jiwa.

3.3.1.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi ketidakstabilan. Setelah mengalami stagnasi pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 menurun sebanyak 1.128 jiwa atau menjadi sebanyak 29.932 jiwa. Namun kemudian pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.

Gambar diatas menunjukkan perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir yang relatif mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengikuti pola yang sama dengan perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin di tingkat Provinsi Aceh dan Nasional. Hal Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Nagan Raya khususnya belum mampu memberikan efek yang stabil dan konsisten terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Di tambah lagi bencana nasional wabah Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 di Indonesia ikut memberi andil terhadap peningkatan jumlah orang miskin baik di Kabupaten Nagan Raya maupun di wilayah lainnya diseluruh Indonesia. Selain itu peningkatan harga-harga kebutuhan

pokok yang menyebabkan meningkatnya garis kemiskinan tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama akibat pandemi Covid-19 sehingga daya beli masyarakat juga ikut menurun.

3.3.1.3. Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan relative rentan akan perubahan (tidak stabil), dimana dalam periode 2017-2021, setelah mengalami stagnasi pada tahun 2018, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 58 jiwa dan peningkatan yang jauh lebih besar terjadi pada tahun 2021, ada tambahan sebanyak 720 jiwa penduduk di Kabupaten Nagan Raya terperosok dalam kemiskinan.

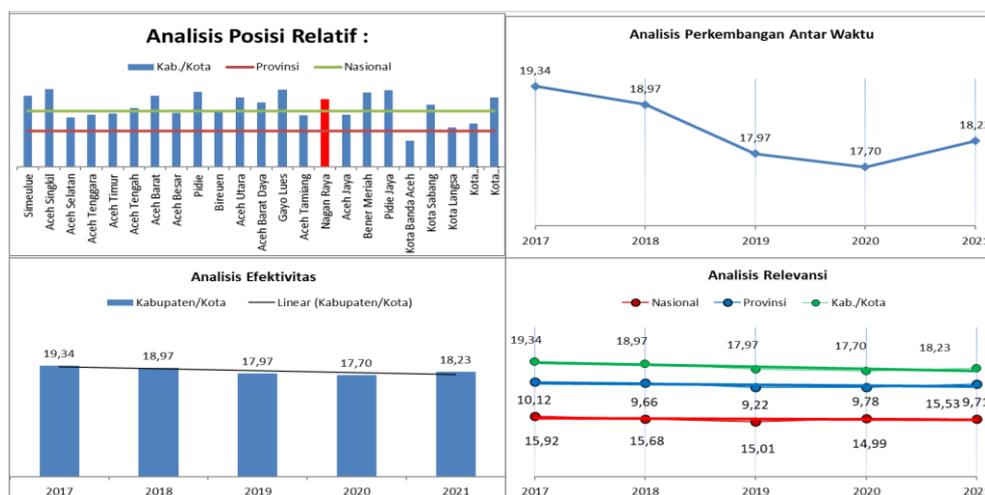
3.3.1.4. Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun sampai pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 27.549 ribu jiwa pada tahun tahun 2020, kemudian menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 26.503 ribu jiwa. Perbedaannya dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya adalah dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami stagnasi pada angka yang sama di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudia tahun 2018 sedikit menurun sebelum terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021.

3.3.2. Persentase Penduduk Miskin

Selain jumlah penduduk miskin, Indikator kemiskinan lainnya yang akan dilihat adalah persentase penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya juga mengikuti pola yang sama seperti jumlah penduduk miskin. Selama satu dekade terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2021 dimana persentase penduduk miskin meningkat menembus angka 18,32 persen. Angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 9,71 persen per September 2021. Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih keras dari semua pihak agar dapat menciptakan akselerasi dan percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Untuk melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2021



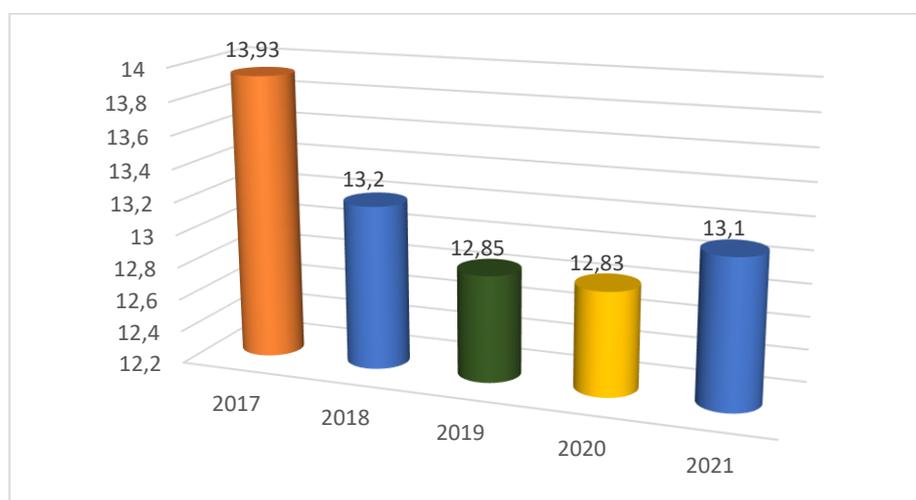
Sumber: BPS 2022

Berdasarkan gambar 3.5 di atas kita bisa melihat perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya yang cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya sekitar 19,34 persen jumlah seluruh penduduk Kabupaten Nagan

Raya, kemudian turun menjadi 18,97 persen pada tahun 2018. Sementara tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun menjadi sekitar 17,97 persen, bahkan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya menembus angka 17,7 persen sebelum akhirnya Kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 18,23 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 meningkat sebesar 0,53 persen atau bertambah sebanyak 720 jiwa. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data statistik per September 2020 jumlah penduduk miskin secara nasional juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 27,55 juta orang atau bertambah sekitar 2,7 juta orang, di mana peningkatan ini dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Perkembangan persentase dan jumlah penduduk miskin juga dapat di lihat berdasarkan wilayah misalnya pedesaan-perkotaan yang dapat memberikan informasi awal sejauh mana disparitas kemiskinan antara desa dan kota dalam Kabupaten Nagan Raya, hingga saat ini desa masih menjadi lumbung kemiskinan nasional.

Gambar 3.6. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Pedesaan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

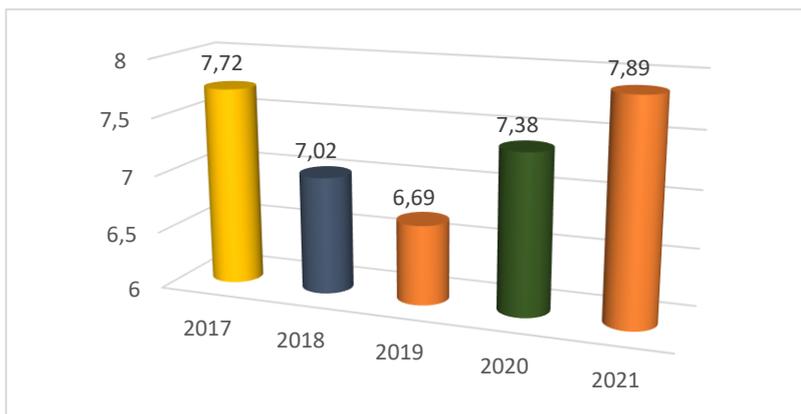


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengamati perkembangan persentase kemiskinan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya. Persentase kemiskinan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2021 dimana persentase kemiskinan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya sebesar 13,93 persen, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 13,2 persen. Tahun 2019 dan 2020 persentase kemiskinan pedesaan juga mengalami penurunan masing-masing menjadi 12,85 persen dan 12,83 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 persentase kemiskinan pedesaan di Kabupaten Nagan Raya meningkat sekitar 2,1 persen atau menjadi 13,1 persen. Hal yang berbeda terjadi di perkotaan, dimana persentase penduduk miskin perkotaan di Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami peningkatan khususnya dalam tiga tahun terakhir. Gambar 3.7 berikut akan menyajikan perkembangan kemiskinan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.7. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengamati perkembangan persentase kemiskinan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. Persentase kemiskinan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya cenderung



mengalami peningkatan, khususnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya sebesar 7,72 persen, kemudian pada tahun 2018 turun sebesar 0,7 persen atau menjadi 7,20 persen. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0,33 persen atau menjadi 6,69 persen. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin pedesaan sekitar 0,7 persen atau menjadi 7,38 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi sekitar 7,89 persen. Jika dibandingkan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan, persentase kemiskinan pedesaan masih jauh lebih tinggi dari perkotaan. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan pedesaan sebesar 13,1 persen sementara kemiskinan perkotaan yang hanya sebesar 7,98 persen, artinya kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan.

3.3.2.1. Analisis Posisi Relatif

Persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 sebesar 18,23 persen. berada diatas rata-rata Provinsi Aceh sebesar 15,53 persen dan di atas rata-rata Nasional 9,71 persen. Selanjutnya persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan dengan Kabupaten atau Kota disekitarnya menempati urutan tertinggi kedelapan setelah Kota Subulussalam 17,65 persen. Posisi tertinggi Kabupaten Gayo Lues sebesar 19,64 persen dan posisi terendah di tempati oleh Kota Banda Aceh sebesar 7,61 persen.

3.3.2.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Selama satu dekade terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan, kecuali untuk tahun 2021 dimana persentase penduduk miskin meningkat menembus angka 18,32 persen. Angka ini masih jauh di atas rata-rata

nasional yang hanya sebesar 9,71 persen per September 2021. Secara umum perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,11 persen dari angka 19,34 pada tahun 2017 menjadi 18,23 persen pada tahun 2021, yang berarti setiap tahun persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa pembangunan daerah mampu memberikan efek penurunan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, walaupun secara umum belum maksimal. Terjadinya wabah Covid-19 pada akhir tahun 2019 juga ikut memberikan andil dalam menahan penurunan persentase penduduk miskin. Kabupaten Nagan Raya termasuk salah satu kabupaten yang ikut terkena dampak Covid-19 di Provinsi Aceh.

3.3.2.3. Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan relative rentan akan perubahan (tidak stabil), oleh karena dalam periode 2016-2021, terdapat dua tahun (tahun 2017 dan tahun 2021) yang persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,09 persen lalu kembali mengalami penurunan pada tiga tahun setelahnya. Kemudian pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan kembali sebesar 0,53 persen atau menjadi 18,23 persen.

3.3.2.4. Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase

penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 10,07 persen tahun 2016 menjadi 9,22 pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,78 persen tahun 2020. Demikian pula persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh dimana persentase penduduk miskin di Aceh konsisten menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian terjadi peningkatan sedikit pada tahun 2021. Sementara di Kabupaten Nagan Raya persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai maret 2020 dan meningkat kembali dalam jumlah yang sangat kecil pada September 2021. Hal ini diduga terkait dengan dampak pandemi Covid-19 secara nasional, dan dampaknya bagi Kabupaten Nagan Raya baru terasa pada September 2021, dengan adanya pembatasan kegiatan dan aktifitas ekonomi masyarakat pada saat itu. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat relevansi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional, dimana penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan Aceh dan Nasional.

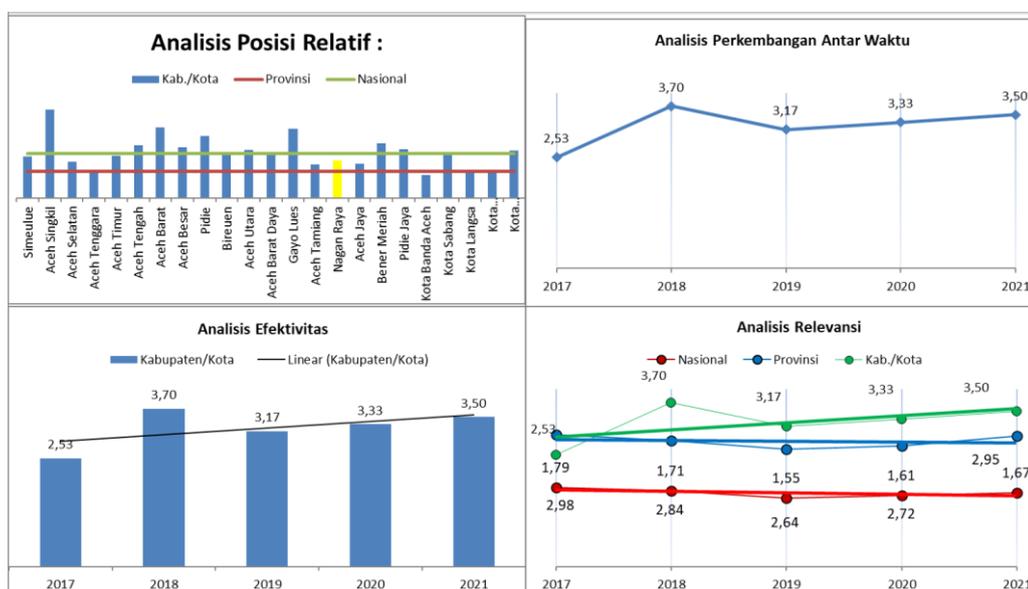
3.3.3. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, beberapa indikator lain dari ukuran kemiskinan lainnya juga dapat kita lihat seperti indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap index* (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indek maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama lima tahun terakhir indek kedalaman kemiskinan tidak banyak mengalami perubahan.

Sepanjang tahun pengamatan secara umum Indek kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2018 indek kedalaman kemiskinan (P1) Naik sebesar 1,17 persen dari tahun sebelumnya atau menjadi 3,7 persen.

Kemudian pada tahun 2019 indek kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,15 persen atau sebesar 3,17 pesen. Pada tahun 2020 indek ini kemudian meningkat lagi menjadi 3,33 persen, sementara tahun 2021 indek kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya meningkat lagi menjadi 3,5 persen. Untuk melihat Perkembangan indek kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap index* (P1) Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terkahir dapat di lihat pada gambar 3.5 berikut ini:

Gambar 3.5 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Kedalam Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2021



Berdasarkan gambar di atas, Indeks kedalaman kemiskinan tidak banyak berubah pada periode ini. Nilai indeks kedalaman kemiskinan ini menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi indeks ini maka semakin berat upaya untuk mengangkat mereka yang miskin untuk keluar dari kemiskinannya.

3.3.3.1. Analisis Posisi Relatif

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Jika

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Aceh, terdapat 4 (empat) Kabupaten lain seperti Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Barat dan Aceh Singkil yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dari Kabupaten Nagan Raya, Di tingkat Provinsi, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya menduduki peringkat ke lima tertinggi. Kabupaten yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2021 yakni Kabupaten Bener meriah, sebaliknya wilayah dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah dan dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi Aceh yakni Kota Madya Banda Aceh.

3.3.3.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami penurunan namun sifatnya fluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks yang naik turun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 2,53 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,7 persen. Kemudian pada tahun 2019 Indeks kedalaman kemiskinan Kembali turun menjadi 3,17 persen dan meningkat kembali menjadi 3,33 pada tahun 2020 dan menjadi 3,5 persen pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam berbelanja sangat dipengaruhi konsistensi pendapatan dari matapencahariannya dan perubahan dalam harga-harga barang pembentuk garis kemiskinan. Trend peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin memburuk.

3.3.3.3. Analisis Efektifitas

Jika ditinjau dari trend penurunan indeks kedalaman kemiskinan

dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Nagan Raya belum efektif pelaksanaannya terutama di kantong-kantong kemiskinan. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan selain dipengaruhi oleh dampak bencana alam, juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019. Beberapa kasus intervensi program penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang salah sasaran, bukan masyarakat yang dikategorikan miskin. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi di daerah kantong kemiskinan dinilai berjalan lambat.

3.3.3.4. Analisis Relevansi

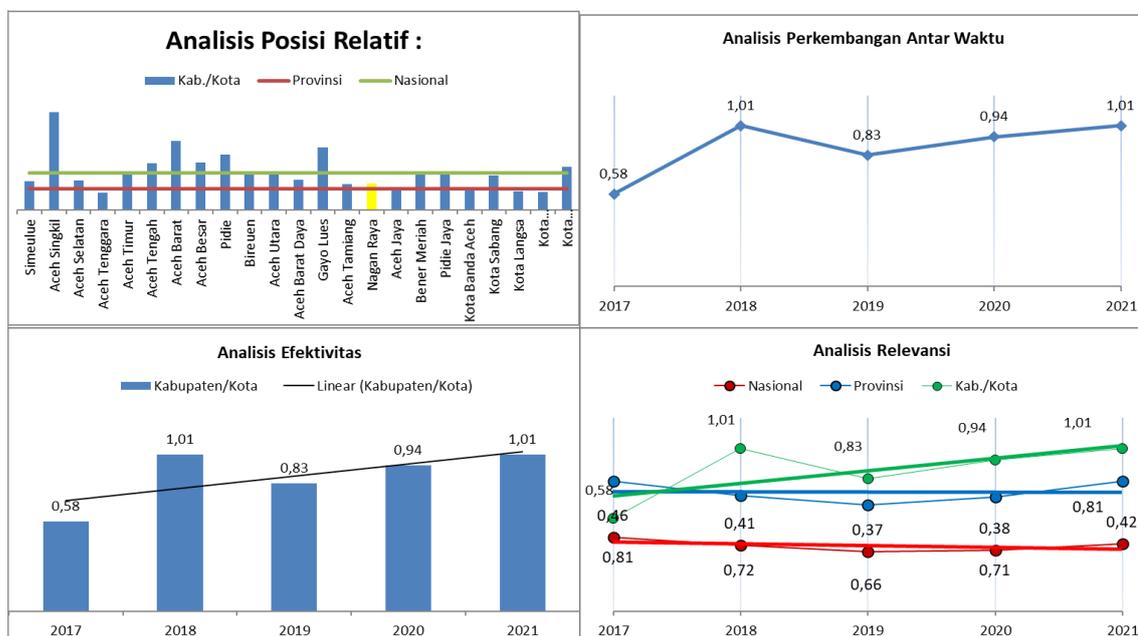
Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya capaian indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya tidak selalu berbanding lurus dengan capaian indeks secara nasional. Peningkatan indeks yang dicapai oleh Nagan Raya tidak sejalan dengan capaian indeks secara nasional. Misalnya pada tahun 2017 ketika indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan, justru indeks kedalaman kemiskinan nasional mengalami peningkatan. Artinya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya juga tidak secara nyata mempengaruhi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan secara nasional.

3.3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks ini di Kabupaten Nagan Raya menyerupai pola indeks kedalaman kemiskinan (P1). Misalnya pada tahun 2018 ketika indeks kedalaman kemiskinan naik, maka indeks

keparahan kemiskinan juga ikut naik. Demikian juga untuk tahun 2019 ketika indeks kedalaman kemiskinan turun indeks keparahan kemiskinan juga ikut menurun. Selama tiga tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami peningkatan demikian juga halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Secara umum perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.13 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2021



Sumber: Data BPS, 2022

3.3.4.1. Analisis Posisi Realtif

Dimensi lain selain jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat keparahan dari kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat amati bahwa Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar

1,01 berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,42 dan juga berada di atas rata-rata Provinsi Aceh sebesar 0,81. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Aceh, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya hanya lebih baik dari 2 Kabupaten yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Barat atau dengan kata lain Kabupaten Nagan Raya hanya menduduki peringkat ke 20 dalam indek keparahan kemiskinan di tingkat provinsi. Kabupaten yang paling tinggi indek keparahan kemiskinannya adalah Kabupaten Bener Meriah, sementara indek keparahan kemiskinan paling rendah diperoleh oleh Kota Langsa.

3.3.4.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pencapaian indek keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagan raya sangat berfluktuasi. Khususnya dalam dua tahun terakhir indek mengalami peningkatan yang konsisten. Hingga tahun 2021 indek keparahan kemiskinan telah menembus angka 1,01. Peningkatan ini mengndikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan selama ini belum cukup mampu untuk meredam peningkatan ketimpangan antara penduduk miskin.

Berdasarkan Gambar di atas, kita dapat melihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2021 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya cenderung mengalami peningktan meskipun sangat fluktuatif sifatnya, pada tahun 2017 indek keparahan kemiskinan turun menjadi 0,58 dari 0,86 pada tahun sebelumnya. Namun demikain pada tahun 2018 Indek mengalami kenaikan yang signifika pada angka 1,01. Meski kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 0,83 namun dalam dua tahun terakhir nilai indek justru mangalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai Indek keparahan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 1,01 persen. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi, dimana jumlah penduduk miskin

yang rendah kemampuan pengeluaran konsumsinya semakin besar jumlahnya. Peningkatan indeks ini erat kaitannya dengan wabah covid-19 yang melanda Indonesia pada saat itu.

3.3.4.3. Analisis Efektifitas

Jika ditinjau dari trend peningkatan indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya yang cenderung konstan dan lebih mengarah ke peningkatan jumlah khususnya dalam dua tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih belum efektif pelaksanaannya. Ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan selama ini masih kurang efektif menysasar masyarakat miskin atau bahkan ada indikasi intervensi yang diberikan masih belum tetap sasaran.

3.3.4.4. Analisis Relevansi

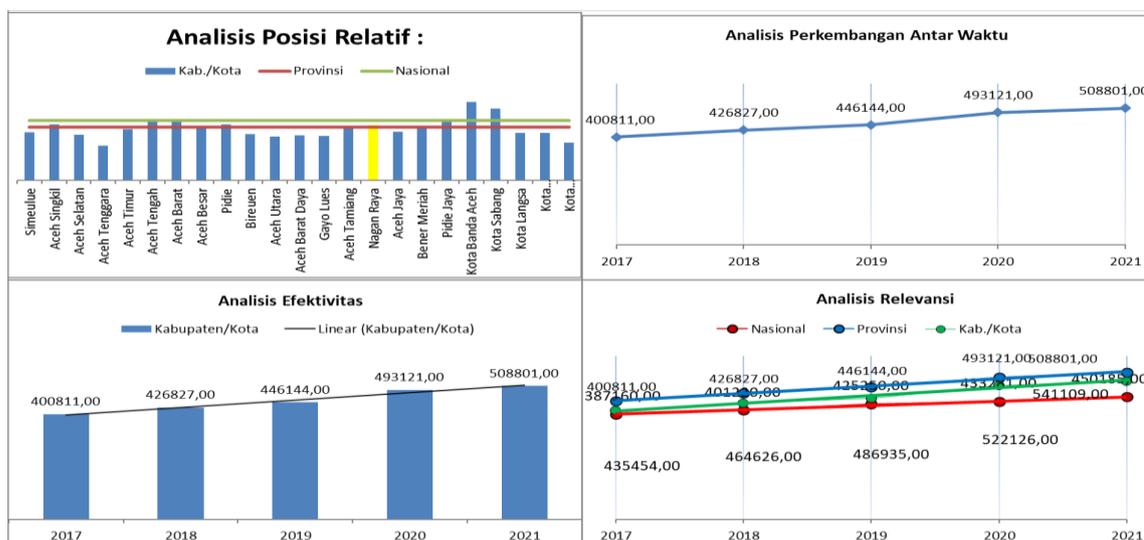
Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya peningkatan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya berbanding terbalik dengan penurunan indeks secara nasional. Akibat dari peningkatan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada setiap tahunnya tidak menyebabkan meningkatkan indeks keparahan kemiskinan secara nasional. Misalnya pada tahun 2018 ketika indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nagan Raya meningkat, indeks nasional malah menunjukkan penurunan.

3.3.5. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan atau pengeluaran yang dianggap perlu dipenuhi oleh seseorang untuk mencapai ambang batas standar hidup yang mencukupi di suatu negara atau daerah. Standar hidup dimaksud kemudian diukur dari pemenuhan kebutuhan pokok hidup selama satu bulan baik berupa kebutuhan makanan dan non-makanan. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS bahwa perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu lima tahun terakhir

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Perkembangan garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 107.990, dapat dilihat pada tahun 2017 Garis Kemiskinan sebesar Rp. 400.811 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 508.801. Gambar berikut menampilkan hasil analisis identifikasi masalah garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3.17 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Tahun 2017-2021



Sumber: Data BPS, 2023

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.016 dibandingkan tahun 2017 menjadi Rp. 426.827. Pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 446.144 atau meningkat sebesar Rp. 19.317 dibandingkan tahun 2018. Tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 46.977 dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp. 493.121. Pada tahun 2021 garis Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya naik sebesar Rp. 15.680 menjadi Rp. 508.801.

3.3.5.1. Analisis Posisi Realtif

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat amati bahwa garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 sebesar Rp. 508.801

berada di atas rata-rata nasional sebesar Rp. 450.185 dan berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh sebesar Rp.541.109. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Aceh, garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya berada di urutan ke empat tertinggi di Aceh setelah Kota Banda Aceh, Sabang dan Kabupaten Aceh Barat. Sementara garis kemiskinan paling rendah diperoleh oleh Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebesar Rp. 404.725. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Kabupaten Nagan Raya lebih mahal di bandingkan dengan dengan mayoritas Kabupaten lain di Provinsi Aceh.

3.3.5.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir garis kemiskinan di Kabupaten Nagan raya terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021 garis kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya telah menembus angka Rp. 508.801. Peningkatan ini mengndikasikan bahwa biaya hidup di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Gambar di atas, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2017 garis kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp. 400.811. kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp. 426.827 pada tahun 2018. Peningkatan Kembali terjadi hingga mencapai Rp. 508.801 pada tahun 2021. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 46.977. Hal ini sejalan dengan peningkatan garis kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional.

3.3.5.3. Analisis Efektifitas

Jika ditinjau dari trend peningkatan garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Dengan peningkatan yang jauh lebih cepat jika di bandingkan dengan peningkatan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Aceh. Selama lima tahun terkahir (2017-2021) garis kemiskinan nasional meningkat sebesar Rp. 99.008 dan garis kemiskinan Provinsi Aceh meningkat sebesar Rp. 105.655. sementara garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya meningkat sebesar Rp.

107.990. Kondisi ini membutuhkan instrumen kebijakan pengendalian harga/inflasi yang lebih efektif.

3.3.5.4. Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, pada dasarnya peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sejalan dengan peningkatan garis kemiskinan nasional. Akibat dari peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Nagan Raya pada setiap tahunnya berkontribusi pada peningkatan garis kemiskinan nasional.

3.4. Kemiskinan Ekstrem

3.4.1. Gambaran Umum Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "**absolute poverty measure**" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, di mana pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka

meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 ditargetkan dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Rincian data tentang kondisi kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1 – 4)

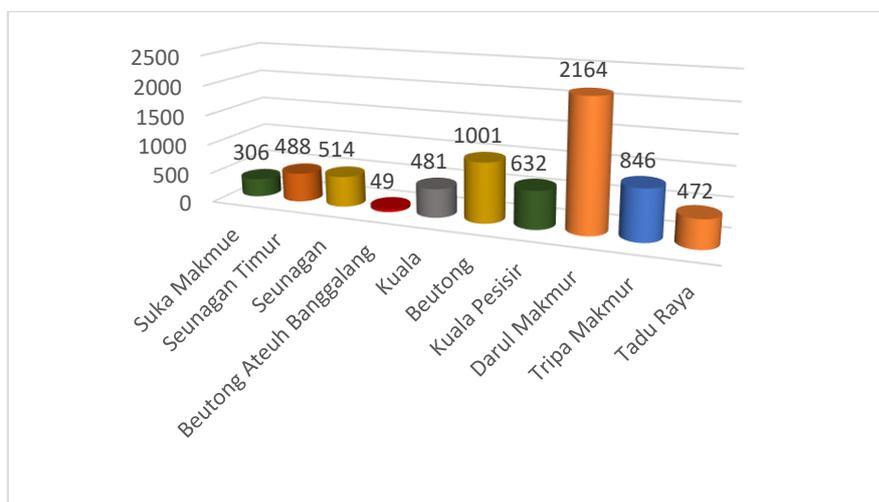
No	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1.	Kuala	492	590	568	770	2.420	2.363	2.390	2.167	2.788	9.708
2.	Seunagan	521	484	499	536	2.040	2.229	1.792	1.735	1.826	7.582
3.	Seunagan Timur	548	531	614	628	2.321	2.406	2.000	2.039	1.890	8.335
4.	Beutong	1.100	678	654	450	2.882	4.699	2.453	2.094	1.325	10.571
5.	Darul Makmur	2.384	1.648	1.417	1.341	6.790	10.360	6.262	4.733	4.454	25.809
6.	Suka Makmue	278	414	445	470	1.607	1.293	1.710	1.584	1.498	6.085
7.	Kuala Pesisir	646	491	484	510	2.131	2.946	1.814	1.704	1.811	8.275
8.	Tadu Raya	452	556	524	508	2.040	2.145	2.296	1.934	1.692	8.067
9.	Tripa Makmur	286	344	337	363	1.330	1.395	1.437	1.255	1.253	5.340
10.	Beutong AB	61	47	39	27	174	248	174	108	85	615
	Jumlah	6.768	5.783	5.581	5.603	23.735	30.084	22.328	19.353	18.622	90.387

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas kita dapat memperoleh informasi bahwa jumlah penduduk dengan 40% pendapatan terbawah sekitar 90.387 jiwa atau sekitar 52,12 persen dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya saat ini, hal ini mengandung pengertian bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Nagan Raya lebih rendah dari rata-rata nasional. Sementara itu dari sisi jumlah penduduk dengan 10% pendapatan terendah (ekstrem) atau mereka yang berada dalam lapisan kerak kemiskinan ada di Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah sekitar 10.360 jiwa atau sekitar 40,14 persen, disusul kemudian oleh Kecamatan Beotong sebanyak 4.699 jiwa atau sekitar 44,45 persen dan Kecamatan Kuala Pesisir sebanyak 2.946 jiwa atau sekitar 35,60 persen. Sedangkan penduduk dengan 10% pendapatan terendah yang paling sedikit jumlahnya ada di Kecamatan Beotong Ateuh Benggalang dengan jumlah 248 jiwa namun dari sisi persentase di Kecamatan ini ada sekitar 40,33 persen individu yang berada dalam desil 1 atau kerak kemiskinan.

Demikian juga halnya dengan data rumah tangga, dimana rumah tangga dengan 10 persen pendapatan terendah ada di Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah 6.790 rumah tangga, kemudian disusul oleh Kecamatan Beotong dan Kuala Pesisir masing-masing sebesar 1.100 dan 646 rumah tangga. Sementara itu untuk rumah tangga dengan 10 persen pendapatan terendah paling sedikit ada di Kecamatan Beotong Ateuh Benggalang dengan jumlah 61 rumah tangga disusul oleh Kecamatan Suka Makmue dan Tripa Makmue dengan jumlah masing-masing 278 dan 286 rumah tangga. Selanjutnya berdasarkan sumber data DTKS yang telah di olah pada tahun 2022 jumlah penduduk yang miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya sekitar 6.953 orang. Yang tersebar di sepuluh kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya. Gambar 3.5 berikut akan menyajikan penyebaran rumah tangga miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022

Gambar 3.18. Sebaran Penduduk miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022



Sumber: Data Dtk's 2022

Berdasarkan gambar di atas kita bisa amati bahwa penduduk miskin ekstrem terbanyak ada di wilayah Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah sekitar 2.164 orang diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan jumlah 1.001 orang, Kecamatan Tripa Makmur dengan jumlah 846 orang dan Kuala Pesisir dengan jumlah 632 orang. Sementara kecamatan terendah jumlah orang miskin ekstrem ada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah 49 Orang. Grafik 3-5 berikut akan menyajikan penyebaran rumah tangga miskin ekstem di Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Pengentasan kemiskinan ekstrem ini akan menjadi agenda prioritas pemerintahan Kabupaten Nagan Raya saat ini, dengan harapan pada tahun 2024 nantinya Kabupaten Nagan Raya bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan dua sumber data di atas kita melihat terdapat perbedaan dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya, hal ini memungkinkan karena basis data P3KE dan DTKS masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun berbeda dari sisi jumlah namun kedua sumber data tersebut mengungkapkan informasi yang sama bahwa kantong utama kemiskinan di Kabupaten

Nagan Raya ada di Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Beutong.

3.4.2. Karakteristik Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pembahasan lebih lanjut tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya adalah dengan melihat kaitan antara karakteristik tertentu dari individu dan rumah tangga dan kaitannya dengan kemiskinan yang mereka alami. Karena pada dasarnya kemiskinan merupakan fonomen multidimensi yang di sebabkan oleh banyak dimensi dan akan mempengaruhi banyak dimensi kehidupan juga. Secara konsep ada beberapa karakteristik tertentu yang berkorelasi dengan kemungkinan individu atau rumah tangga menjadi miskin. Secara umum karakteristik dari kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi, terutama dimensi sosio-demografi, dimensi ekonomi dan dimensi geografi.

Dimensi sosio-demografi di antaranya adalah: pendidikan, usia, gender, status perkawinan, pekerjaan dan ukuran rumah tangga. Sedangkan faktor ekonomi, diantaranya adalah pendapatan, asset dan layanan kredit, sementara faktor geografi misalnya adalah lokasi seperti perdesaan dan perkotaan. Keterkaitan faktor ini dengan kemiskinan telah banyak di konfirmasi oleh studi empiris di Indonesia pada umumnya. Misalnya studi Dartanto & Nurkholis (2013) yang menganalisis determinan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel tahun 2005 dan 2007. Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor penting yang mempengaruhi dinamika kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, aset fisik (kepemilikan tanah dan tempat tinggal), pekerjaan, kesehatan, akses listrik, dan perubahan dalam ukuran rumah tangga, sektor pekerjaan dan program kredit mikro.

Dimensi selanjutnya adalah adalah dimensi ekonomi, variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kemiskinan adalah status pekerjaan, kurangnya kepemilikan aset seperti tanah, rumah,

kurangnya akses ke kredit mikro formal/informal dan lain sebagainya. Secara khusus, studi World Bank (2006) menjelaskan bahwa individu atau rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian dan informal ditemukan memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kemiskinan. Bank Dunia memperkirakan bahwa rumah tangga pertanian yang tinggal terutama di daerah pedesaan 2,6 kali lebih mungkin menjadi miskin dari pada rumah tangga non-pertanian.

Sedangkan untuk dimensi geografis, sebagian besar studi dalam konteks Indonesia menemukan bahwa mayoritas rumah tangga miskin tinggal di pedesaan (Sugiharti & Primanthi, 2017; Weisbrod, 2018). Sejalan dengan ini, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia beberapa tahun terakhir juga mengkonfirmasi hal yang sama, di mana pada tahun 2021 ada sekitar 60,22 persen mereka yang miskin berada di wilayah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2022). Adapun beberapa dimensi yang terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Data Kemenko PMK yaitu data P3KE dapat dijelaskan sebagai berikut.

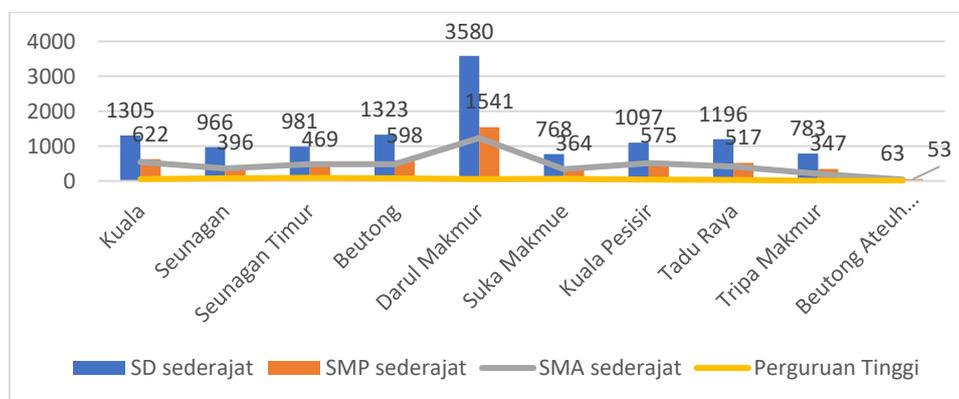
a. Tingkat Pendidikan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan akan membedakan kapasitas individu satu dengan yang lainnya, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan mengarah pada peningkatan kapasitas dalam kehidupan sosialnya dan juga kesejahteraannya. Hal ini telah dikonfirmasi oleh banyak studi di tingkat individu dan rumah tangga yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan determinan penting dalam menentukan status kemiskinan rumah tangga (Kabeer, 2012; Majeed & Malik, 2015; Park *et al.*, 2017). Sementara Becker (1995) menyebutkan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif bagi mereka yang miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Oleh karena itu, pendidikan yang lebih baik menjadi karakteristik penting yang harus dimiliki oleh individu atau rumah tangga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Rumah tangga miskin di Kabupaten Nagan Raya juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan rumah tangga miskin lainnya di Indonesia. Hal ini dapat diamati berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber data P3KE yang mengungkapkan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan individu dalam rumah tangga miskin masih tergolong rendah. Untuk melihat gambaran tingkat pendidikan individu dalam rumah tangga miskin di Kabupaten Nagan Raya secara lebih rinci dapat di amati pada gambar berikut ini.

Gambar 3.18 Tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga miskin di Kabupaten Nagan Raya



Sumber: Data P3KE, 2022

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara umum individu dalam rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang memiliki tingkat pendidikan SD sederajat paling tinggi ada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 3580 orang, disusul oleh Kecamatan Beutong sebanyak 1323 orang selanjutnya Kecamatan Kuala dan Tadu Raya masing-masing sebesar 1305 dan 1196 orang. Seterusnya di ikuti oleh Kecamatan Kuala Pesisir sebanyak 1097 orang, sementara Kecamatan lainnya semua di bawah seribu orang.

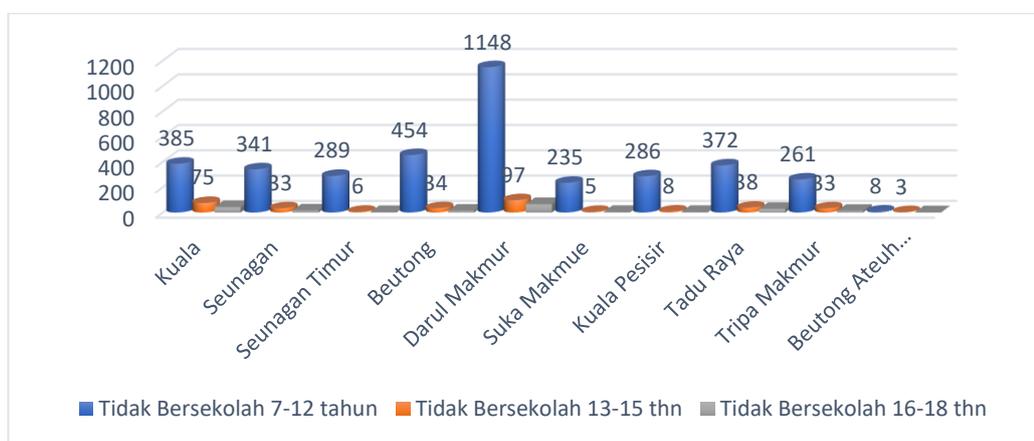
Kemudian individu dalam keluarga miskin yang memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat paling banyak juga ada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 1541 orang disusul oleh Kecamatan Kuala dan Beutong masing-masing sebanyak 622 dan 598 orang. Seterusnya diikuti oleh Kecamatan Kuala Pesisir sebanyak 575 orang. Secara umum jumlah anggota keluarga yang hanya memiliki pendidikan dasar di bawah Sembilan tahun ada di Kecamatan Darul Makmur, Beutong dan Kuala, hal ini sejalan dengan jumlah orang miskin dan miskin ekstrem dimana kecamatan tersebut merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

Disamping itu secara konsep kemiskinan individu dan rumah tangga juga memiliki dampak pada upaya mereka dalam pembentukan *capital* khususnya *human capital* dalam rumah tangga mereka seperti pendidikan, kesehatan dan ketrampilan. Anak-anak dalam rumah tangga miskin memiliki keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun pemerintah telah membuat regulasi tentang pendidikan wajib sembilan tahun dimana anak-anak Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan ini dengan gratis. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah. Hal ini dapat dipahami karena biaya ke sekolah itu tidak hanya membutuhkan biaya langsung akan tetapi juga biaya tidak langsung, dan yang terakhir ini dapat menjadi kendala serius bagi rumah tangga miskin dalam mengirim anak-

anaknyanya ke sekolah.

Oleh karena itu kita melihat di kantong-kantong kemiskinan banyak anak usia sekolah yang tidak ikut bersekolah. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan data P3KE masih terdapat banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Nagan Raya. Untuk melihat gambaran lebih rinci tentang anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Nagan Raya dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.19 Angka putus sekolah anak-anak dalam tangga miskin pada berbagai jenjang usia di Kabupaten Nagan Raya



Sumber: Data P3KE 2022

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan ada sekitar 4.308 orang anak-anak usia sekolah tidak bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Dari jumlah tersebut yang paling banyak terdapat di Kecamatan darul Makmur dimana ada sekitar 1.148 orang anak usia sekolah SD sederajat yang tidak bersekolah, kemudian terdapat 97 anak usia sekolah SMP sederajat yang tidak bersekolah dan 66 anak usia SMA sederajat yang tidak lagi bersekolah. Kondisi ini sejalan dengan jumlah orang-orang miskin dan miskin ekstrem di mana Kecamatan Darul Makmur menjadi kantong utama kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya. Fénomena yang sama juga terjadi di Kecamatan Beutong dan Kecamatan lainnya. Kondisi ini sangat

memprihatinkan tentunya ditengah upaya serius pemerintah dalam membangun dan mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 nantinya.

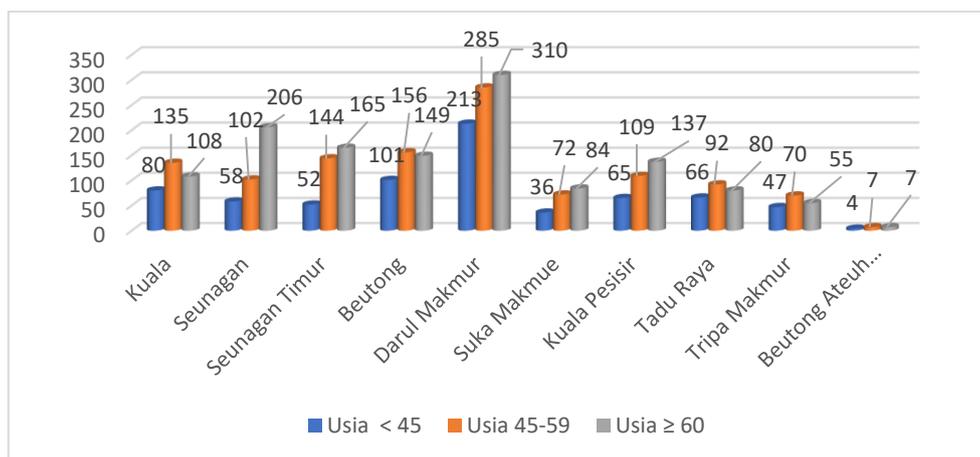
b. Gender

Jenis kelamin dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan. Gender kepala rumah tangga yang dibedakan laki-laki dan perempuan memiliki kaitan erat dengan kerentanan dan kemiskinan rumah tangga. Beberapa alasan dapat menjelaskan penyebab posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan di negara-negara berkembang, antara lain pertama, perempuan di negara berkembang memiliki akses yang sangat terbatas dalam aset domestik seperti hak atas tanah dan bangunan. Kedua, perempuan dalam negara sedang berkembang memiliki keterbatasan dalam pasar kredit, hal ini terkait diskriminasi gender dalam akses kredit, yakni laki-laki atau suami cenderung lebih mudah dalam mendapatkan akses atau bantuan kredit daripada perempuan. Ketiga, pasar asuransi di negara sedang berkembang tidak berfungsi secara maksimal. Keempat, perempuan secara tipikal memiliki akses yang rendah dalam pasar kerja dan memiliki pendapatan yang lebih rendah pula dibanding laki-laki (Klasen dkk., 2015).

Alasan-alasan tersebut secara umum sejalan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, dimana Kecamatan yang mejadi kantong-kantong kemiskinan juga terdapat jumlah kepala rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan terbanyak di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Bahkan kepala rumah tangga perempuan dengan usia lebih dari 60 tahun yang menurut katagori usia di Indonesia sudah termasuk dalam katagori usia tidak produktif lagi, kondisi ini tentu saja memiliki dampak yang lebih buruk terhadap kesejahteraan rumah tangganya. Misalnya Kecamatan Darul Makmur yang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi kantong

kemiskinan terdapat jumlah rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan yang berusia di bawah 45 tahun sebanyak 213 orang, yang berusia 45-49 tahun sebanyak 285 orang dan yang berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 310 orang, secara keseluruhan ada sekitar 808 rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan di Kecamatan Darul Makmur. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang jumlah kepala rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.20 Jumlah kepala rumah miskin dengan kepala rumah tangga perempuan menurut kecamatan



Sumber: Data P3KE, 2022

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa jumlah kepala rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan terbanyak ada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 808 rumah tangga disusul oleh Kecamatan Beutong dengan jumlah 406 rumah tangga, Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur dan Kuala masing masing sebanyak 366, 361 dan 323 rumah tangga. Status kepala rumah tangga perempuan menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih menderita dan dekat dengan kemiskinan (Quisumbing, 2001). Menurut Buvinic & Gupta (1997) rumah tangga yang dikepalai perempuan akan membawa dampak pada beban kerja ganda, yang artinya perempuan tidak hanya bertanggung jawab pada

pekerjaan domestic rumah tangga, melainkan juga bertugas untuk mencari nafkah.

Kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia juga menjadi salah satu masalah dan tantangan dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyatakan bahwa kualitas hidup perempuan masih sangat rendah. Kondisi hampir serupa juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya, oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui program-program pemberdayaan terutama terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Nagan Raya sehingga mereka dapat diberdayakan untuk keluar dari kemiskinannya.

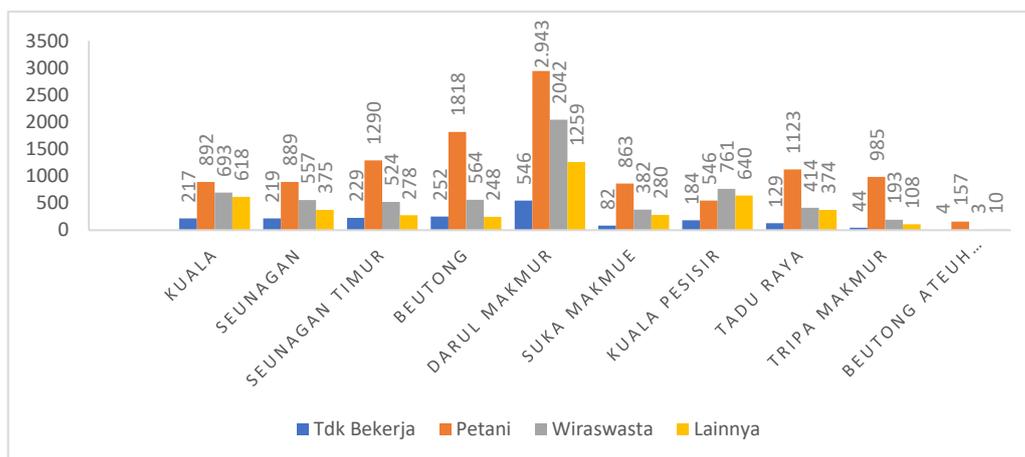
c. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan (BPS 2012).

Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga disajikan pada gambar dibawah ini. Dari gambar tersebut terlihat kepala rumah tangga yang tidak bekerja sebanyak 1.906 orang atau sebesar 8,0 persen, yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 11.506 orang atau sebesar 48,5 persen, bekerja di sektor industri sebesar 2,48 persen, dan selebihnya 22,67 persen bekerja di sektor lainnya. Pola distribusi tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sehingga prioritas penyelesaian masalah kemiskinan adalah dengan membenahi sektor yang dihuni oleh sebagian besar penduduk itu menjadi penting

Gambar 3.20 Pekerjaan utama kepala rumah miskin menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya



Sumber: Data P3KE 2022

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga miskin dan miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sekitar 48 persen atau dengan kata lain ada sekitar 48 persen dari rumah tangga dengan 40 persen pendapatan terendah bekerja di sektor pertanian. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya bahwa jika ingin memperbaiki kondisi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem maka prioritas penyelesaian masalah dengan membenahi sektor pertanian yang dihuni oleh sebagian besar penduduk miskin itu menjadi penting untuk dilakukan. Kemudian pekerjaan sebagai wiraswasta menjadi pekerjaan kedua terbanyak dari kepala rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dimana ada sekitar 25 persen kepala rumah tangga miskin yang memiliki jenis pekerjaan sebagai wiraswasta, kemudian disusul oleh jenis pekerjaan lainnya seperti nelayan, pedagang, pensiunan, dan pekerja lepas

Jika dilihat penyebaran kepala rumah tangga miskin dan miskin esktrēm yang bekerja di sektor pertanian berdasarkan kecamatan maka kita dapat melihat bahwa Kecamatan Darul Makmur dan Beutong memiliki jumlah kepala rumah tangga yang terbanyak bekerja di sektor pertanian kemudian di susul oleh kecamatan seunagan timur dan tadu raya serta kecamatan lainnya. Begitu juga dengan kepala rumah tangga miskin yang menjadi wiraswasta, kecamatan darul Makmur dan beotong juga memiliki jumlah terbanyak di dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Secara keseluruhan hampir 75 persen kepala rumah tangga miskin dan miskin ektrem bekerja pada kedua sektor ini. Oleh karena itu pembenahan pada kedua jenis pekerjaan ini perlu dilakukan oleh pemerintah jika ingin meanggulangi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

d. Karakteristik Fasilitas Perumahan

Rumah yang sehat adalah tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dengan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota keluarga yang menempatnya. Ada beberapa indikator yang sering digunakan sebagai standar hidup sehat atau yang menunjukkan tempat tinggal yang sehat diantaranya adalah fasilitas buang air besar yang dimiliki, konsumsi air minum, luas lantai rumah, ketersediaan jamban menjadi adalah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat.

Dilihat dari distribusi rumah tangga menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas BAB tampak bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB dengan septi tank adalah tercatat sebesar 73,31 persen dan yang menggunakan fasilitas BAB tanpa septi tank tercatat sebesar 7,39 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban tercatat sebesar 15,46 persen dan fasilitas BAB lainnya

sebesar 3,25 persen. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban tanpa septi tank dan penggunaan jamban umum atau tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga tersebut. Untuk melihat secara lebih rinci informasi penyebaran penggunaan jenis faslitas BAB rumah tangga miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Penggunaan jenis fasilitas BAB oleh rumah tangga miskin dan miskin ekstrem menurut kecamatan dalam Kab. Nagan Raya

No	Kecamatan	Fasilitas BAB			
		Dengan Septi tank	tanpa septitank	Jamban umum bersama	Lainnya
1.	Kuala	1956	256	144	64
2.	Seunagan	1444	133	440	23
3.	Seunagan Timur	1607	150	486	78
4.	Beutong	1.437	268	1056	121
5.	Darul Makmur	5.180	613	748	249
6.	Suka Makmue	1170	144	279	14
7.	Kuala Pesisir	2022	41	48	20
8.	Tadu Raya	1516	200	254	70
9.	Tripa Makmur	1010	70	199	51
10.	Beutong Ateuh Benggalang	57	11	15	91
	Jumlah	17.399	1.886	3.669	781

Sumber: Data P3KE 2022

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa kecamatan Beutong merupakan kecamatan tertinggi dimana jumlah rumah tangga miskin menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban dalam rumah tangga mereka, tercatat ada sekitar 1.056 rumah tangga atau sekitar 28,64 persen. Disusul kemudian oleh kecamatan Darul Makmur sebanyak 748 rumah tangga atau sekitar. Secara keseluruhan kedua kecamatan ini menyumbang sekitar 50 persen rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya yang tidak memiliki jamban di rumah tangga mereka. Sebagai mana kita ketahui berdasarkan data P3KE kedua kecamatan ini merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Selain

kedua kecamatan tersebut urutan selanjutnya dari jumlah rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang menggunakan jamban umu atau tidak memiliki jamban adalah kecamatan Seunagan Timur dan Seunagan masing-masing ada sekitar 486 dan 440 rumah tangga. Kemudian di susul oleh kecamatan Suka Makmue, Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Beutong Ateuh Bנגgalang.

Karakteristik fasilitas perumahan lainnya dari rumah tangga miskin yang akan kita bahas adalah kepemilikan rumah yang dianggap menjadi karakteristik penting dari tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data P3KE rumah tangga dengan jumlah pengeluaran 40 persen terbawah memiliki karakteristik kemiskinan berdasarkan kepemilikan tempat tinggal bahwa mayoritas dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem memiliki tempat tinggal sendiri. Tercatat ada sekitar 19.139 rumah tangga miskin telah memiliki tempat tinggal sendiri atau sekitar 80,72 persen. Sementara sisanya sebesar 19,28 persen rumah tangga miskin masih belum memiliki rumah sendiri. Untuk melihat penyebaran rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Penyebaran rumah tangga miskin menurut status kepemilikan dalam Kab. Nagan Raya

No	Kecamatan	Kepemilikan Tempat Tinggal			
		Milik sendiri	Sewa/kontrak	Bebas sewa	Lainnya
1.	Kuala	2030	69	51	270
2.	Seunagan	1650	58	50	282
3.	Seunagan Timur	1826	50	35	410
4.	Beutong	2.217	65	122	478
5.	Darul Makmur	5.433	172	283	902
6.	Suka Makmue	1293	37	26	251
7.	Kuala Pesisir	1689	83	78	281
8.	Tadu Raya	1699	47	52	242
9.	Tripa Makmur	1155	30	11	134
10.	Beutong Ateuh Bנגgalang	167	0	0	7
	Jumlah	19.159	611	708	3.257

Sumber: Data P3KE 2022

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026
BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

- 4.1.** Teori Perubahan
- 4.2.** Analisis APBK untuk Penanggulangan Kemiskinan



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

4.1. Penyusunan Teori Perubahan (Theory of Change)

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang disebabkan oleh banyak aspek, disamping itu kemiskinan juga memberikan dampak pada banyak aspek kehidupan pula. Dengan demikian karena sifatnya multidimensi, kemiskinan tidak hanya terkait dengan kemampuan ekonomi seperti pendapatan atau konsumsi saja tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kesejahteraan lainnya dalam makna yang luas. Untuk itu rencana penanggulangan kemiskinan daerah harus dapat mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan satandar hidup lainnya yang kemudian diintervensi dengan berbagai kebijakan sebagai upaya penanggulangannya.

Keberadaan dokumen RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi penanggulangan kemiskinan yang berada ditingkat nasional kedalam konteks penyelesaian masalah lokal. *Theory of Change* (ToC) atau teori perubahan, lazim digunakan oleh para perencana pembangunan dalam mendisain sebuah program agar menjadi efektif, selain teori perubahan ini juga akan memberikan panduan tentang bagaimana beragam intervensi tersusun dan dapat terlaksana secara runtut sehingga sasaran (objective) dapat terurai dan memberikan hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diinginkan. Proses penyusunan teori perubahan dimulai dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama: Menetapkan tujuan (goals) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (impact) akhir

yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Tujuan ini sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang hanya mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai. **Langkah kedua:** Mengidentifikasi capaian antara (intermediate outcome) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya tujuan. Bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif sesuai kompleksitas program.

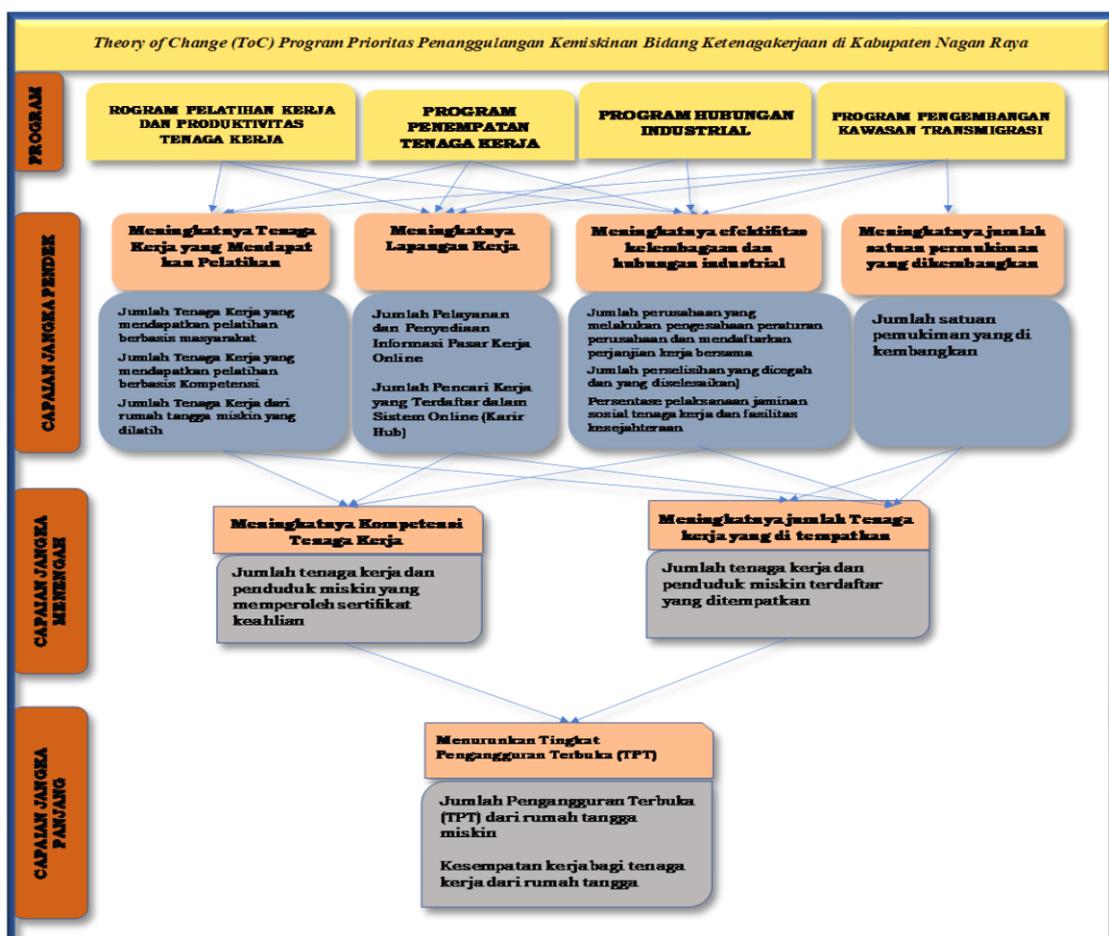
Langkah ketiga: Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud di sini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat secara langsung kepada penerimanya. **Langkah keempat:** Menarik anak panah hubungan sebab-akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian antara tertentu. **Langkah kelima:** Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, di setiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi, yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

Dari beberapa isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Nagan Raya, Tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengambil fokus pada beberapa Bidang yang akan diintervensi sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, beberapa bidang tersebut diantaranya adalah pertama bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang sosial.

4.1.1. Logika Program (ToC) Bidang Ketenagakerjaan

Logika program (ToC) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk bidang ketenagakerjaan, mengambil fokus pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dilakukan dengan meningkatkan keahlian tenaga kerja, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan serapan tenaga kerja. Logika program yang telah disusun oleh TKPK Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) khusus bagi penduduk miskin sebagai tujuan akhir yang memiliki dua determinan kunci, yaitu meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, berikut ToC bidang ketenagakerjaan.

Gambar 4.1 ToC Bidang Ketenagakerjaan Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang ketenagakerjaan disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka terutama yang berasal dari rumah tangga miskin. isu-isu bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Nagan Raya di antaranya adalah keterbatasan kemampuan pencari kerja, dimana mereka pada umumnya berpendidikan sekolah dasar (SD). Hal ini telah menghambat akses mereka terhadap kesempatan kerja yang ada, apalagi untuk rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang secara rata-rata memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah. Untuk itu pemerintah harus melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan kompetensi pekerja di Kabupaten Nagan Raya sehingga akan mendorong penurunan tingkat pengangguran khususnya bagi mereka yang berada dalam kemiskinan.

Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat empat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat bersaing dengan pencari dalam dunia kerja yang semakin kompetitif terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pengadaan sarana dan prasarana pelatihan kerja dan koordinasi lintas lembaga. Program ini memiliki outcome jangka pendek yaitu meningkatnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan efektifitas kelembagaan dan hubungan industrial.

Sedangkan outcome jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kompetensi tenaga kerja dengan indikator jumlah tenaga kerja dan penduduk miskin yang mendapat sertifikat keahlian. Selanjutnya outcome jangka menengah lainnya adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan indikator jumlah tenaga kerja dan penduduk miskin terdaftar yang ditempatkan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

2. Program penempatan tenaga kerja.

Program penempatan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
- c. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas
- d. Pengelolaan informasi pasar kerja Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
- e. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online

Indikator sasaran jangka pendek terkait program ini adalah meningkatnya peluang bekerja masyarakat miskin dan rentan miskin, meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan serta meningkatnya efektifitas kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial. Hubungan Industrial memiliki kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara dua belah pihak. Perselisihan ini tidak jarang diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja/buruh sehingga akan berdampak kepada pekerja secara finansial, dimana kemudian pekerja tidak memiliki

sumber pendapatan kedepannya yang berpotensi membawa mereka menjadi penyumbang terhadap kemiskinan.

3. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial memiliki kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan ini tidak jarang diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja. PHK itu sendiri pada akhirnya akan berdampak kepada pekerja secara finansial, dimana kemudian pekerja tidak memiliki sumber pendapatan ke depannya yang berpotensi membawa mereka menjadi penyumbang terhadap kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menghindari terjadinya kasus hubungan industrial adalah dengan melaksanakan program Hubungan Industrial. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama
 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
Sub-Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan perusahaan dalam penyusunan syarat kerja dalam peraturan perusahaan (PP) dan tata cara pengesahan PP.
 2. Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan.
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman HRD di perusahaan dalam pembahasan, penyusunan dan tata cara pendaftaran perjanjian kerjasama
 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma dan peraturan ketenagakerjaan sehingga diharapkan nantinya perselisihan antara perusahaan dengan pekerja/buruh bisa diminimalisir.

2. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartite daerah kabupaten/kota.

Pengertian tripartit sebagai lembaga adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang tercatat pada instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan. Pembentukan LKS tripartit bertujuan merwujudkan iklim kerja yang harmonis dan kondusif di perusahaan sebagai upaya meningkatkan kelangsungan usaha dan bekerja serta meningkatkan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

3. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja sehingga di harapkan merka dapat memperoleh hak-hak nya dari perusahaan.

4. Program pengambagan kawasan transmigrasi.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi di Kabupaten Nagan Raya terkait dengan kemiskinan adalah pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat di Kabupaten Nagan Raya memiliki keterbatasan

dalam kepemilikan *capital*, sehingga tidak dapat bersaing secara optimal di pasar kerja. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan melakukan transmigrasi. Transmigrasi bertujuan untuk memindahkan masyarakat yang kurang memiliki kesempatan akses terhadap lapangan kerja agar dapat berkembang di wilayah baru melalui jalur kewirausahaan, baik dalam bentuk berusaha maupun bertani. Penyelenggaraan transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan satuan pemukiman pada tahap kemandirian 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:

- a. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.
- b. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelambagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

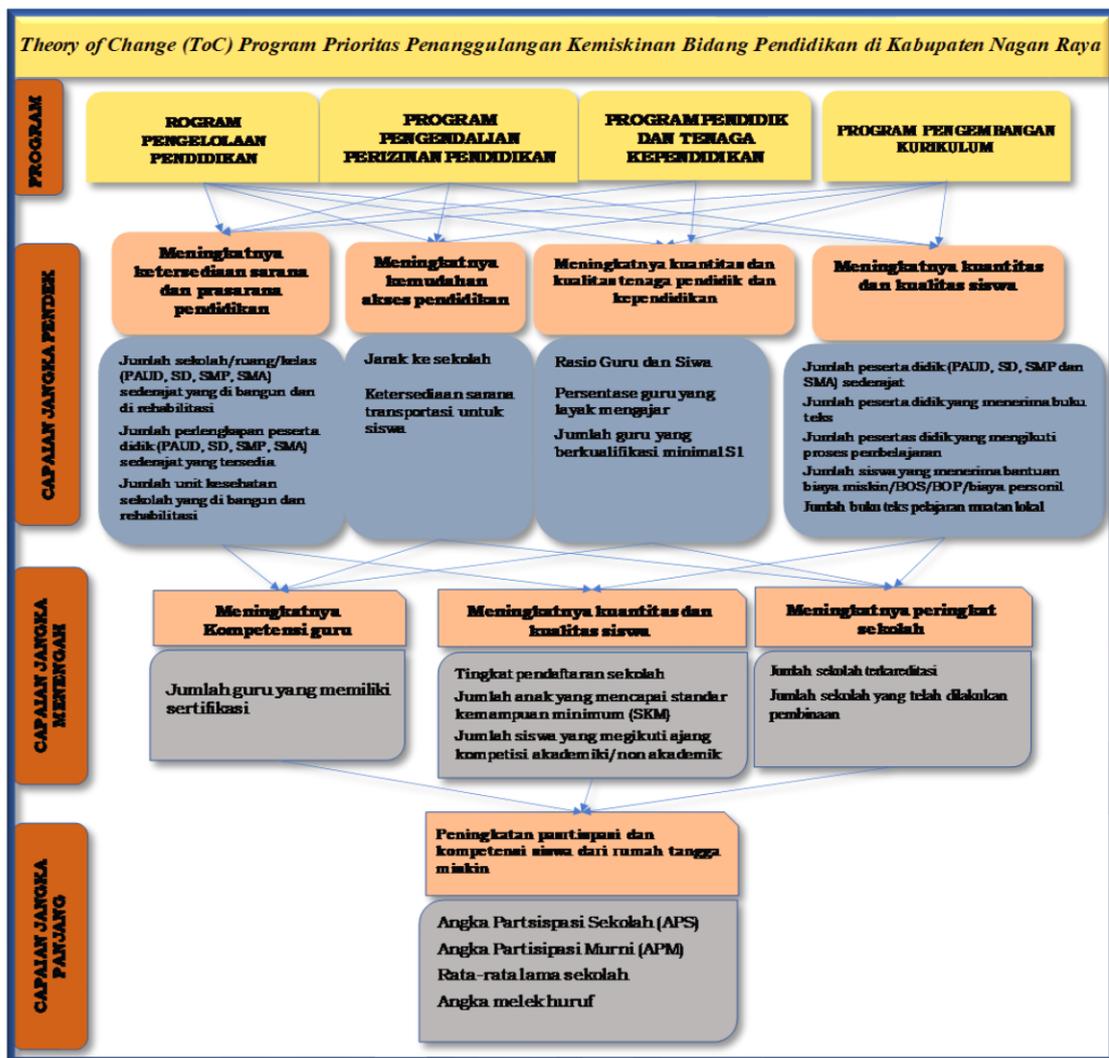
4.1.2. Logika Program (ToC) Bidang Pendidikan

Logika program (ToC) untuk bidang pendidikan difokuskan bagi peningkatan partisipasi pendidikan dasar khususnya bagi penduduk usia sekolah dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini sesuai dengan analisis masalah kemiskinan dari data P3KE Kabupaten Nagan Raya dimana masih banyak anak-anak usia sekolah di kantong-kantong kemiskinan belum dapat mengakses pendidikan di berbagai jenjang usia. Menurut data P3KE tahun 2023, ada sekitar 4.308 orang anak dari rumah tangga miskin yang tidak sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 3.779 anak yang berusia 7-12 tahun tidak sekolah, 332 anak yang berusia 13-15 tahun yang tidak sekolah dan ada sekitar 197 anak berusia 16-18 tahun yang tidak sekolah.

Logika program yang telah disusun oleh TKPK Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi sekolah khusus

bagi penduduk miskin sebagai tujuan akhir yang memiliki beberapa determinan kunci, yaitu peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, (2) meningkatnya akses pendidikan, (3) meningkatnya kualitas tenaga pendidik serta (4) meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun ToC bidang pendidikan sebagai berikut.

Gambar 4.2 ToC Bidang Pendidikan Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang pendidikan disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan partisipasi dan kompetensi siswa dari rumah tangga miskin. Isu-isu bidang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya

di antaranya adalah angka partisipasi sekolah yang masih rendah terutama mereka yang berada dalam rumah tangga miskin. Berdasarkan data P3KE di ketahui masih banyak anak-anak dari rumah tangga miskin yang tidak bersekolah bahkan pada saat pendidikan wajib telah di gratiskan oleh pemerintah. Hal ini akan berpotensi membuat mereka tetap dalam kemiskinan, mereka cenderung mewariskan kemiskinan rumah tangga orang tua mereka. Apa lagi untuk rumah tangga miskin ekstrem yang secara rata-rata memiliki keterbatasan yang jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah harus melakukan inovasi agar anak-anak dari rumah tangga miskin tersebut dapat diproteksi dari dampak buruk kemiskinan rumah tangga orang tua mereka.

Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat empat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak-anak usia sekolah sehingga mereka dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak terutama anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya yang mengalami banyak keterbatasan. Program pengelolaan pendidikan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar
- b. Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan
- c. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
- d. dan pengelolaan pendidikan anak sekolah dini (PAUD).

Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya kemudahan akses pendidikan, meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dan meningkatnya kuantitas dan

kualitas peserta didik.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kompetensi guru dengan indikator jumlah guru yang mendapat sertifikat keahlian. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas siswa tingkat pendaftaran sekolah dengan indikator jumlah anak yang mencapai standar kemampuan minimum (SKM) dan jumlah siswa yang dapat mengikuti ajang kompetensi akademik dan non akademik. *outcome* jangka menengah selanjutnya adalah meningkatnya peringkat sekolah dengan indikator jumlah sekolah yang sudah dilakukan pembinaan dan jumlah sekolah yang terakreditasi. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah peningkatan partisipasi dan kompetensi siswa yang diukur dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya

2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang cukup terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya. Program pengendalian perizinan pendidikan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas siswa, peningkatan tingkat pendaftaran sekolah. *outcome* jangka menengah selanjutnya adalah

meningkatnya peringkat sekolah dengan indikator jumlah sekolah yang sudah dilakukan pembinaan dan jumlah sekolah yang terakreditasi. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah peningkatan partisipasi dan kompetensi siswa yang diukur dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang cukup terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya. Program pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah pemerataan kuantitas dan kualitas bagi satuan Pendidikan dasar, paud dan formal/kesetaraan. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatnya kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik.

Adapun *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas siswa dan peningkatan peringkat sekolah dengan indikator jumlah sekolah yang sudah dilakukan pembinaan dan jumlah sekolah yang terakreditasi. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah peningkatan partisipasi dan kompetensi siswa khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang bagus terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin

dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya. Program pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal.

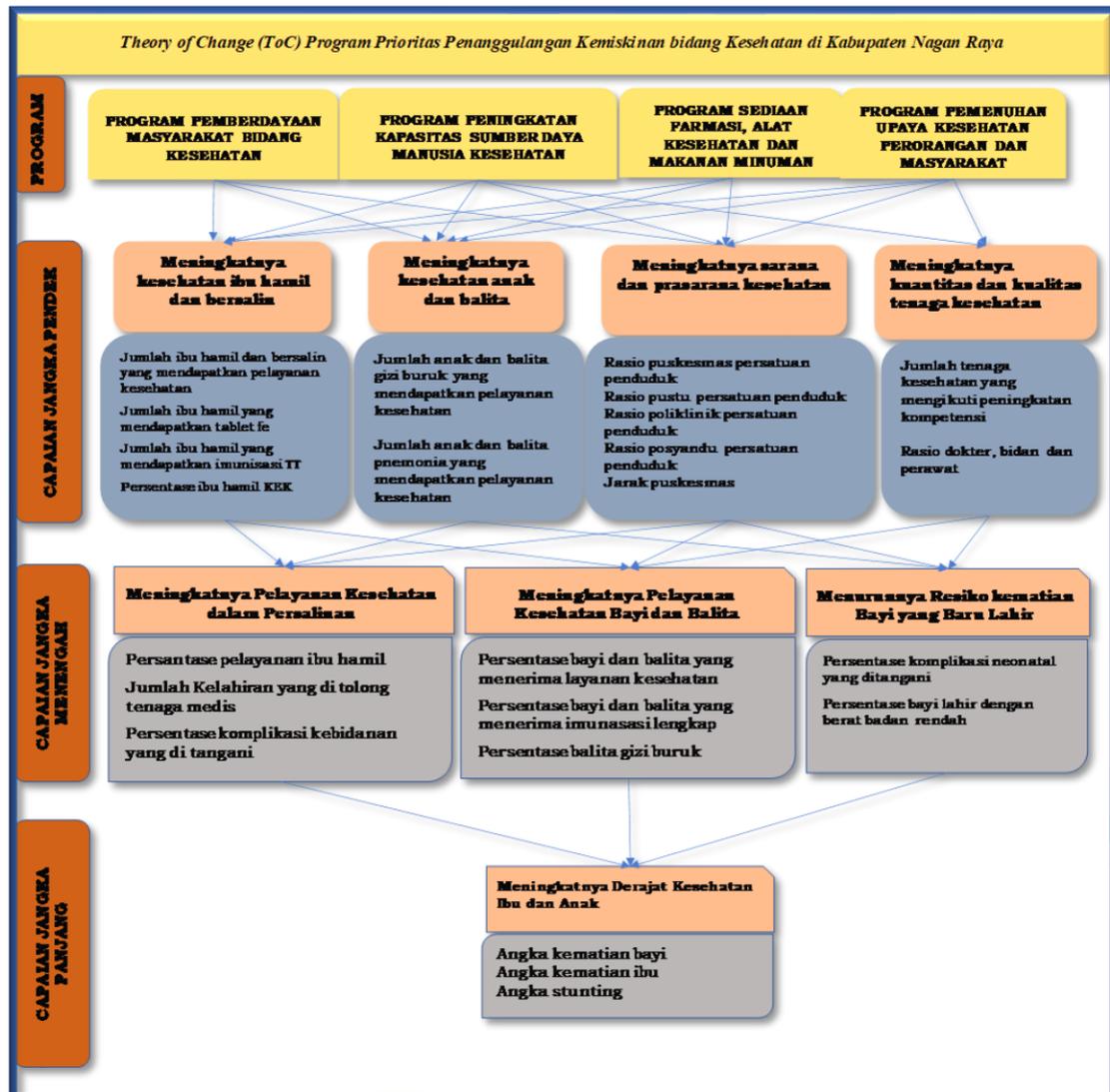
Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas siswa dan peningkatan peringkat sekolah dengan indikator jumlah sekolah yang sudah dilakukan pembinaan dan jumlah sekolah yang terakreditasi. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah peningkatan partisipasi dan kompetensi siswa yang diukur dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf khusus nya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4.1.3. Logika Program (ToC) Bidang Kesehatan

Logika program (ToC) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk bidang kesehatan difokuskan pada masalah prevalensi stunting, angka kematian bayi, dan masalah usia harapan hidup di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini berkesesuaian dengan masalah yang di hadapi oleh Kabupaten Nagan Raya pada bidang kesehatan selama ini diantaranya adalah angka stunting, angka kematian bayi, angka harapan hidup atau umur harapan hidup saat lahir (UHH) dan angka kematian Ibu yang masih tinggi. Adapaun tujuan akhir dari intervensi bidang kesehatan ini adalah peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Tujuan ini kemudian memiliki beberapa akan didukung oleh beberapa program utama bidang kesehatan yaitu Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, Program peningkatan kapasitas

sumber daya manusia kesehatan, Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Adapun TOC bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 ToC Bidang Kesehatan Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang kesehatan disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Isu-isu strategis bidang kesehatan di Kabupaten Nagan Raya di antaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian anak dan angka stunting yang

masih tinggi terutama mereka yang berada dalam rumah tangga miskin. Berdasarkan data P3KE diketahui bahwa rumah tangga miskin memiliki banyak keterbatasan, diantaranya pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, standar hidup yang rendah, bahkan banyak dari rumah tangga miskin belum memiliki fasilitas rumah yang memadai untuk mendukung mereka dapat hidup sehat, seperti tidak memiliki jamban dan sumber air minum yang terlindungi. Hal ini akan berpotensi membuat mereka hidup dengan derajat kesehatan yang sangat rendah. Apa lagi untuk rumah tangga miskin ekstrem yang secara rata-rata memiliki keterbatasan yang jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah harus melakukan proteksi terhadap mereka supaya terhindar dari dampak buruk kemiskinan nya.

Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat empat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan anak balita dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mengalami banyak keterbatasan dapat menikmati pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih layak sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan dan pengembangan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya kesehatan ibu hamil dan bersalin, meningkatnya kesehatan anak dan

balita dan meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan dengan indikator persentase pelayanan ibu hamil, jumlah kelahiran yang ditolong tenaga medis dan persentase komplikasi kebidanan yang ditangani. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya kesehatan bayi dan balita dengan indikator persentase bayi dan balita yang menerima layanan kesehatan, persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi lengkap dan persentase balita gizi buruk. Sementara itu untuk *outcome* jangka menengah menurunnya resiko kematian bayi yang baru lahir diukur dengan indikator persentase neonatal yang ditangani dan persentase bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dimana indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka stunting yang terus mengalami penurunan khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan.

Dalam jangka pendek program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan anak balita, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mengalami banyak keterbatasan dapat menikmati pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih layak sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program pemberdayaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah

meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan dengan indikator persentase pelayanan ibu hamil, jumlah kelahiran yang ditolong tenaga medis dan persentase komplikasi kebidanan yang ditangani. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya kesehatan bayi dan balita dengan indikator persentase bayi dan balita yang menerima layanan kesehatan, persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi lengkap dan persentase balita gizi buruk. Sementara itu untuk *outcome* jangka menengah selanjutnya adalah menurunkan resiko kematian bayi yang baru lahir diukur dengan indikator persentase neonatal yang ditangani dan persentase bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dimana indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka stunting yang terus mengalami penurunan khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan anak balita, dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mengalami banyak keterbatasan dapat menikmati pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih layak sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah

tangga

- c. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
- d. Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.
- e. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan dengan indikator persentase pelayanan ibu hamil, jumlah kelahiran yang ditolong tenaga medis dan persentase komplikasi kebidanan yang ditangani. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya kesehatan bayi dan balita dengan indikator persentase bayi dan balita yang menerima layanan kesehatan, persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi lengkap dan pesentase balita gizi buruk. Sementara itu untuk *outcome* jangka menengah selanjutnya adalah menurunkan resiko kematian bayi yang baru lahir diukur dengan indikator persentase neonatal yang ditangani dan persentase bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dimana indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka stunting yang terus mengalami penurunan khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya

4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan anak balita, sarana dan prasarana kesehatan dan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sehingga tersedianya

layanan Kesehatan yang lebih baik khususnya bagi mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mengalami banyak keterbatasan. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
 1. Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya.
 2. Pengembangan puskesmas.
 3. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya.
 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas.
 5. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya.
 6. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan.
 7. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan.
 8. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan.
 9. Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi.
 10. Pengadaan obat dan vaksin.
 11. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan.
 12. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif

7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
12. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
13. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.
14. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.
15. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga.
16. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.
17. Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan.
18. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya.
19. Pengelolaan surveilans kesehatan.
20. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK).
21. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA.
22. Pengelolaan upaya kesehatan khusus.
23. pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan.
24. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.
25. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.
26. Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah.
27. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat.
28. Operasional pelayanan puskesmas.
29. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya.

30. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota.
 31. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal).
 32. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah.
 33. Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT).
- c. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
1. Pengelolaan data dan informasi kesehatan.
 2. Pengelolaan sistem informasi kesehatan.
 3. Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet.
- d. Penerbitan izin rumah sakit kelas c dan d serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 2. Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
 3. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan.
- e. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
1. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)
 2. Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.
 3. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman

industri rumah tangga.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan dengan indikator persentase pelayanan ibu hamil, jumlah kelahiran yang ditolong tenaga medis dan persentase komplikasi kebidanan yang ditangani. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya kesehatan bayi dan balita dengan indikator persentase bayi dan balita yang menerima layanan kesehatan, persentase bayi dan balita yang menerima imunisasi lengkap dan persentase balita gizi buruk. Sementara itu untuk *outcome* jangka menengah selanjutnya adalah menurunkan resiko kematian bayi yang baru lahir diukur dengan indikator persentase neonatal yang ditangani dan persentase bayi lahir dengan berat badan rendah. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dimana indikator angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka stunting yang terus mengalami penurunan khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya

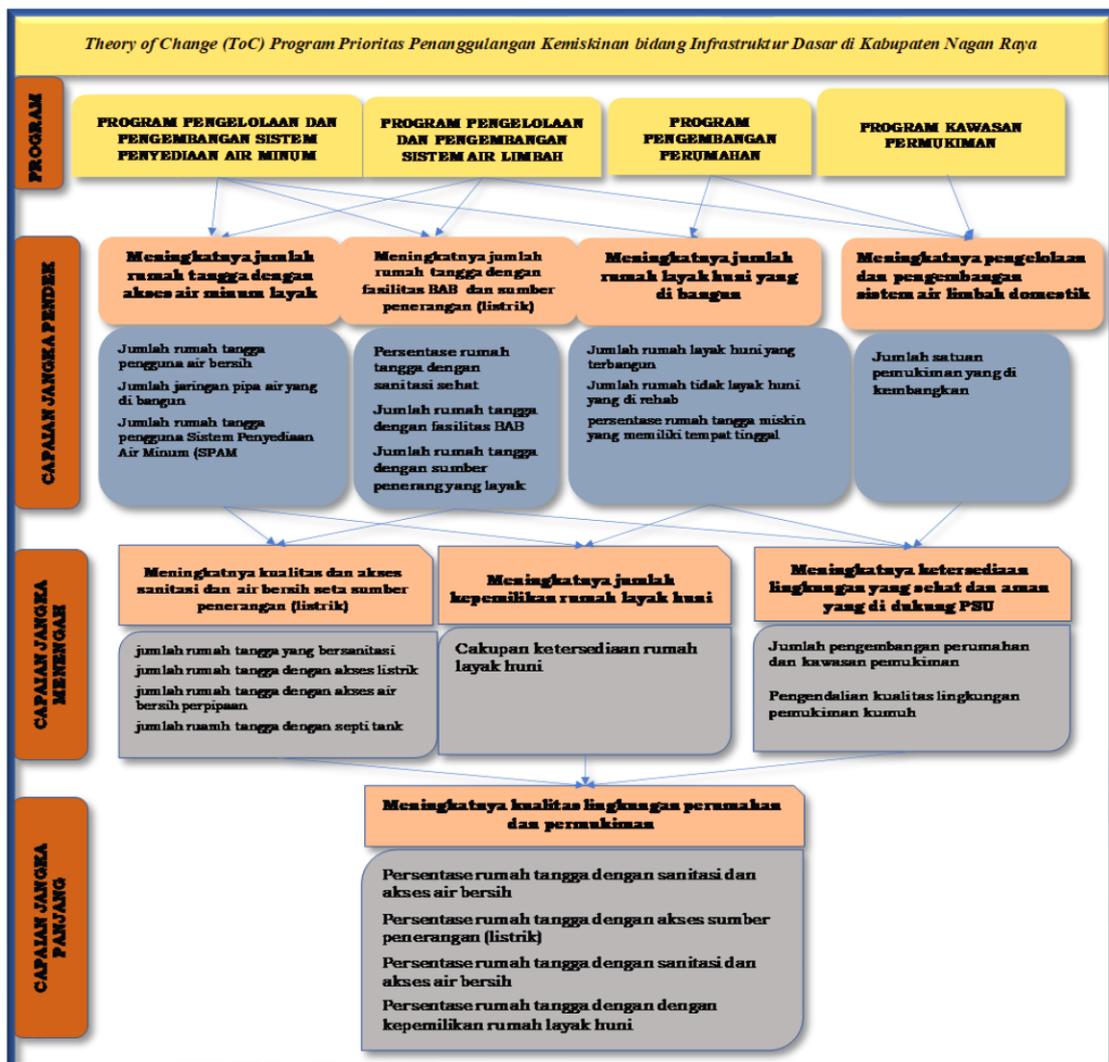
4.1.4. Logika Program (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang infrastruktur dari data P3KE Kabupaten Nagan Raya. Karena kepemilikan infrastruktur dasar dalam rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sangat erat kaitan dengan standard hidup mereka yang rendah dan ini bahkan termasuk determinan kemiskinan rumah tangga. Isu strategis pada bidang infrastruktur dasar rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya akses rumah tangga terhadap air bersih.
- b. Rendahnya akses rumah tangga terhadap fasilitas BAB.
- c. Belum optimalnya sumber penerangan (listrik).
- d. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni.

Logika program (theory of change) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk pemenuhan infrastruktur dasar mengambil fokus pada meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, Berikut ToC penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 4.4 ToC Bidang Infrastruktur Dasar Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang infrastruktur dasar disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Berdasarkan data P3KE diketahui bahwa rumah tangga

miskin memiliki banyak keterbatasan, diantaranya pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, standar hidup yang rendah, bahkan banyak dari rumah tangga miskin belum memiliki fasilitas rumah atau infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung mereka dapat hidup sehat, seperti tidak memiliki jamban dan sumber air minum yang terlindungi. Hal ini akan berpotensi membuat mereka hidup dengan derajat kesehatan yang sangat rendah. Apa lagi untuk rumah tangga miskin ekstrem yang secara rata-rata memiliki keterbatasan yang jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah harus melakukan proteksi terhadap mereka supaya terhindar dari dampak buruk kemiskinan nya. Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat empat program yang akan dilaksanakan sesuai dengan renstra Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap ketersediaan sanitasi dan air bersih, fasilitas BAB, sumber penerangan (listrik) dan kepemilikan rumah layak huni sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang mengalami banyak keterbatasan dapat menikmati standar hidup yang layak dengan infrastruktur dasar yang memadai sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan akses sanitasi dan air bersih serta sumber penerangan (listrik) dengan indikator jumlah rumah tangga yang bersanitasi, jumlah rumah tangga dengan akses listrik, jumlah rumah tangga dengan akses air bersih perpipaan, jumlah rumah tangga

dengan fasilitas BAB yang layak. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya jumlah kepemilikan rumah layak huni dengan indikator cakupan kepemilikan rumah layak huni. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan indikator persentase rumah tangga dengan sanitasi dan akses air bersih, persentase rumah tangga dengan akses sumber penerangan (listrik), persentase rumah tangga dengan sanitasi dan akses air bersih, persentase rumah tangga dengan kepemilikan rumah layak huni khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap ketersediaan sanitasi dan air bersih, fasilitas BAB, dan pengelolaan sistem air limbah domestik sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat menikmati standar hidup yang layak dengan infrastruktur dasar yang memadai sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan akses sanitasi dan air bersih serta sumber penerangan (listrik) dengan indikator jumlah rumah tangga yang bersanitasi, jumlah rumah tangga dengan akses listrik, jumlah rumah tangga dengan akses air bersih perpipaan, jumlah rumah tangga dengan fasilitas BAB yang layak. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya ketersediaan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung PSU dengan indikator jumlah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan pengendalian kualitas lingkungan permukiman kumuh. Sedangkan

tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

3. Program pengembangan perumahan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan rumah layak huni dan pengelolaan sistem air limbah domestik sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat menikmati standar hidup yang layak dengan infrastruktur dasar yang memadai sebagaimana halnya mereka yang tidak miskin. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, selain itu kegiatan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan Gedung (SKGB) juga merupakan kegiatan pada program ini.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya jumlah kepemilikan rumah layak huni dengan indikator cakupan rumah tangga dengan rumah layak huni. Selanjutnya *outcome* jangka menengah lainnya adalah meningkatnya ketersediaan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung PSU dengan indikator jumlah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan pengendalian kualitas lingkungan permukiman kumuh. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4. Program Kawasan Pemukiman.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sistem air limbah domestik sehingga mereka yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat menikmati standar hidup yang layak dengan infrastruktur dasar yang memadai sebagaimana halnya

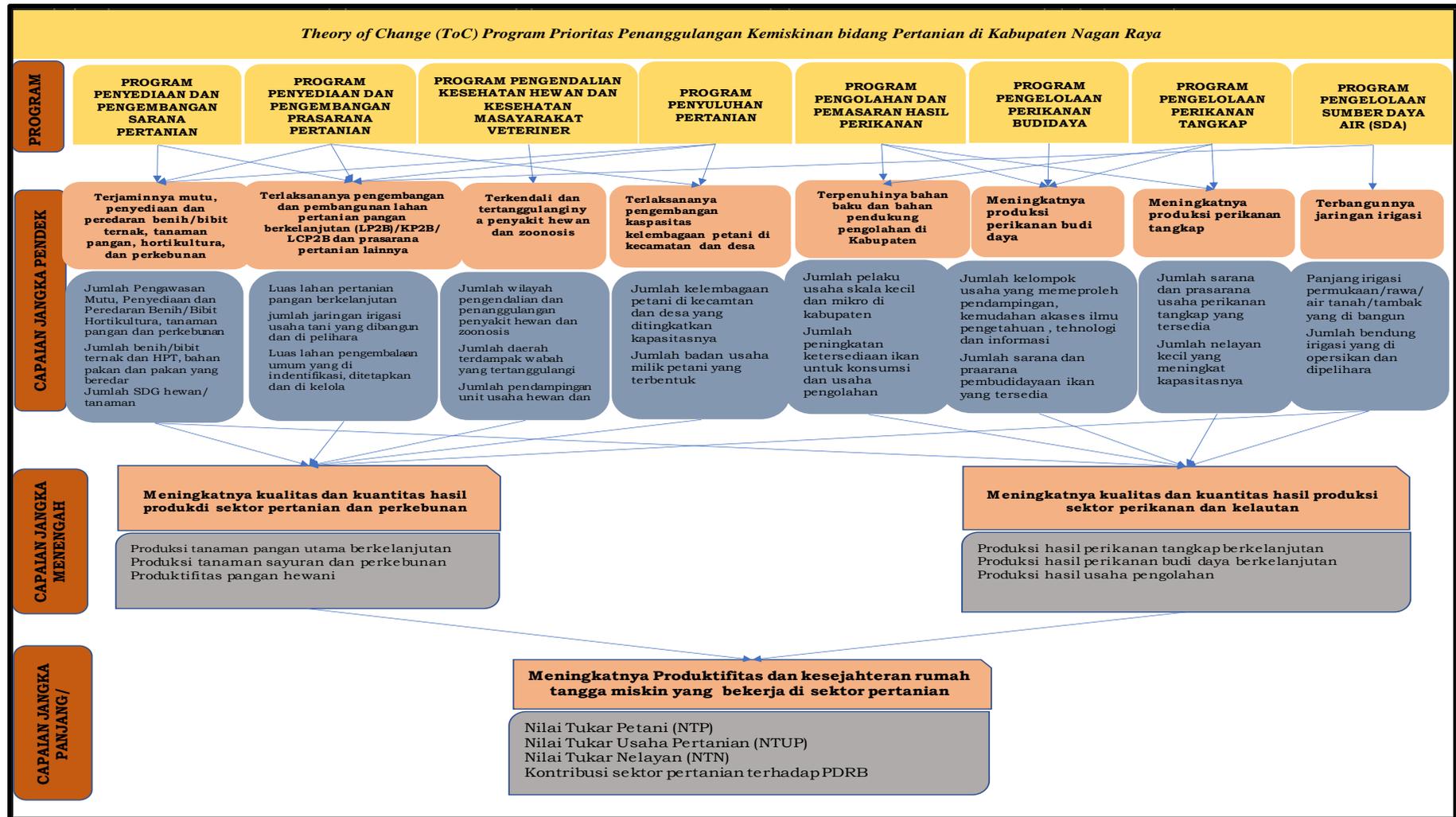
mereka yang tidak miskin. Program kawasan permukiman dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung PSU dengan indikator jumlah pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman dan pengendalian kualitas lingkungan pemukiman kumuh. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4.1.5. Logika Program (ToC) Bidang Pertanian

Berdasarkan data P3KE lebih dari 50 persen kepala rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, dengan demikian memperbaiki sektor pertanian harus menjadi salah satu prioritas jika kita ingin memperbaiki kesejahteraan rumah tangga miskin. Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan dan perikanan) didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang pertanian dari data P3KE Kabupaten Nagan Raya yaitu peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi ternak unggulan daerah melalui berbagai program dan kegiatan sebagai mana terlihat pada ToC dibawah ini. Adapaun ToC yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk pembangunan sektor pertanian mengambil fokus pada meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian dalam arti luas sehingga mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. ToC penanggulangan kemiskinan bidang pertanian di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 4.5 ToC Bidang Pertanian Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang pertanian disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan data P3KE diketahui bahwa rumah tangga miskin yang bekerja pada sektor pertanian memiliki banyak keterbatasan, selain tingkat pendidikan dan produktifitas yang masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian juga belum memadai serta kelembagaan pertanian yang masih lemah, dengan keterbatasan yang mereka miliki sulit bagi mereka untuk dapat meningkatkan produktifitas mereka sehingga mereka tetap berada dalam kemiskinan. Untuk itu dibutuhkan sejumlah intervensi dari pemerintah melalui berbagai macam program dan kegiatan sehingga mereka dapat diberdayakan untuk keluar dari kemiskinannya. Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat delapan program yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan di sektor pertanian dalam Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Program ini bertujuan untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana pertanian seperti benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sehingga rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang bekerja di sektor ini dapat meningkatkan produktifitas mereka. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan lainnya adalah penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, dan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan

hijauan pakan ternak dalam daerah.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor pertanian, perikanan, kelautan dan perkebunan dengan indikator jumlah produksi tanaman pangan utama, produksi tanaman sayur-sayuran dan perkebunan serta produktifitas pangan hewani seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian termasuk rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dan prasarana pertanian lainnya. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan prasarana pertanian, pembangunan sarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah untuk mendukung peningkatan produktifitas dan mutu hasil produksi sektor pertanian secara keseluruhan. Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi tanaman pangan utama, produksi tanaman sayur-sayuran dan

perkebunan serta produktifitas pangan hewani seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner terutama yang menyangkut dengan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan melalui kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah, Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan, kehalalan produk hewan, dan juga isu keamanan lingkungan, karena bagaimanapun kesehatan hewan terkait erat dengan kesehatan manusia dan lingkungannya terutama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi

tanaman pangan utama, produksi tanaman sayur-sayuran dan perkebunan serta produktifitas pangan hewani seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

4. Program Penyuluhan Pertanian.

Program ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyuluhan pertanian yang berkualitas, peningkatan peran aktif petani dan penguatan kapasitas kelembagaan petani untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas strategis daerah. Program penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, Kegiatan ini dilakukan untuk membantu petani dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi, petani dididik untuk dapat merubah pengetahuan, keterampilan dan sikapnya agar petani dapat menerima gagasan baru serta mendorong peran aktif petani dan penguatan kelembagaan yang akan mengubah petani tradisonal menjadi petani yang moderen yang memiliki tingkat produkstifitas dan kesejahteraan yang tinggi. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya keterampilan dan kapasitas kelembagaan petani

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi

tanaman pangan utama, produksi tanaman sayur-sayuran dan perkebunan serta produktifitas pangan hewani seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini bertujuan untuk menjamin peningkatan efisiensi dan mutu hasil perikanan dan rantai pemasarannya yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta terpenuhinya bahan baku dan bahan pendukung bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan baik dalam sakala mikro atau dan kecil di Kabupaten Nagan Raya. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, kegiatan lainnya adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Kegiatan selanjutnya adalah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi serta menjamin keamanan produk hasil perikanan sampai pada konsumen. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu terpenuhinya bahan baku dan bahan pendukung pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi hasil perikanan tangkap berkelanjutan, produksi hasil perikanan budidaya berkelanjutan dan produksi hasil usaha pengolahan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk menjamin peningkatan produksi dan dan ketersediaan prasarana pembudidayaan ikan di Kabupaten Nagan Raya. Program pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas pembudidaya ikan. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meingkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi hasil perikanan tangkap berkelanjutan, produksi hasil perikanan budidaya berkelanjutan dan produksi hasil usaha pengolahan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan

kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk menjamin peningkatan produksi dan dan ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di Kabupaten Nagan Raya. Program pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah dan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap serta peningkatan kapasitas nelayan kecil. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meingkatnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi hasil perikanan tangkap berkelanjutan dan produksi hasil usaha pengolahan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program ini bertujuan untuk menjamin peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana jaringan irigasi secara berkelanjutan. Program pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten dan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam satu kabupaten. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani khususnya rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu terbangunnya jaringan irigasi.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor perikanan dan kelautan dengan indikator jumlah produksi tanaman pangan utama, produksi tanaman sayur-sayuran dan perkebunan serta produktifitas pangan hewani seperti daging, susu, telur dan ikan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar usaha Pertanian (NTUP) dan kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB). Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Nagan Raya.

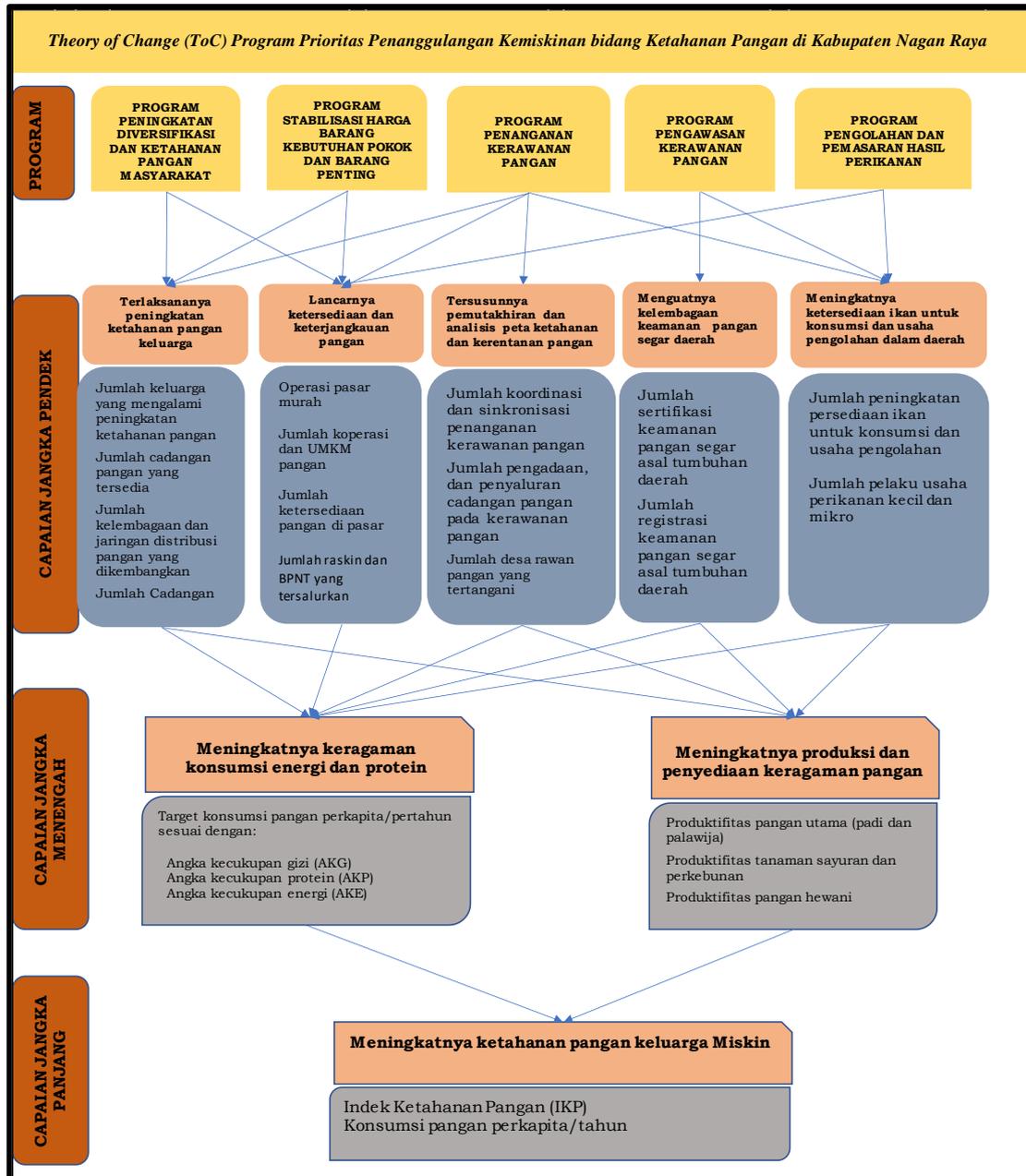
4.1.6. Logika Program (ToC) Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang secara kontinyu mengalami kendala dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk itu pemerintah harus dapat melakukan intervensi untuk mendorong peningkatan dan penyediaan keragaman pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Logika program (ToC) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk bidang ketahanan pangan difokuskan pada masalah peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan ketersediaan keragaman konsumsi pangan dan penyediaan infrastruktur kemandirian pangan daerah di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini berkesesuaian dengan masalah yang di hadapi oleh Kabupaten Nagan Raya pada bidang ketahanan pangan selama ini khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini memiliki tingkat konsumsi pangan yang rendah. Adapapun tujuan akhir dari intervensi bidang ketahanan pangan ini adalah peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin yang akan berkontribusi pada peningkatan indek ketahanan pangan (IKP) di Kabupaten Nagan Raya. Tujuan ini kemudian didukung oleh beberapa program utama bidang ketahanan pangan yaitu program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan kerawanan pangan dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Adapun TOC bidang ketahanan pangan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6 ToC Bidang Ketahanan Pangan Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang ketahanan pangan disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator indek ketahanan pangan dan tingkat konsumsi pangan perkapita. Meskipun Kabupaten Nagan Raya selama ini memiliki IKP yang cukup baik dimana pada tahun 2022 Kabupaten Nagan Raya memiliki IKP sebesar 74,47 dan masuk kedalam katagori

kabupaten yang memiliki ketahanan yang baik, namun terdapat perbedaan ketahanan pangan antar kelompok pendapatan dimana kelompok pendapatan 40 persen terendah yang di dalamnya terdapat rumah tangga miskin dan miskin ekstrem tentu memiliki kerentanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya hal ini sejalan dengan indek ketimpangan di Kabupaten Nagan Raya yang masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Untuk itu dibutuhkan sejumlah intervensi dari pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dalam Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat tujuh program yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan pada bidang ketahanan pangan dalam Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan, penyediaan dan penyaluran pangan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di kabupaten sehingga rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG). Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga dan lancarnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya produksi dan penyediaan keragaman pangan dengan indikator peningkatan produktifitas pangan utama, sayuran dan perkebunan dan pangan hewani, serta meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein dengan indikator tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Eenergi (AKE). Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP) dan konsumsi pangan perkapita/tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah sehingga rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu lancarnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan indikator jumlah operasi pasar murah, jumlah koperasi dan UMKM bahan pangan, jumlah ketersediaan pangan di pasar dan jumlag raskin dan BPNT yang tersalurkan.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein dengan indikator tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan

Angka Kecukupan Eenergi (AKE). Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP) dan konsumsi pangan perkapita/tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Program ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan, dan penyaluran cadangan pangan bagi daerah rawan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten sehingga rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan baik. Program penanganan kerawanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu tersusunnya pemutakhiran dan analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya produksi dan penyediaan keragaman pangan dengan indikator peningkatan produktifitas pangan utama, sayuran dan perkebunan dan pangan hewani, serta meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein dengan indikator tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Eenergi (AKE). Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP) dan konsumsi pangan perkapita/tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4. Program Pengawasan Kerawanan Pangan.

Program ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengawasan

keamanan pangan daerah yang mencakup penguatan kelembagaan keamanan pangan daerah di kabupaten sehingga rumah tangga miskin dan miskin ekstrem dapat mengatasi kendala mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program pengawasan ketahanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu terlaksananya penguatan kelembagaan keamanan pangan daerah kabupaten/kota.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya produksi dan penyediaan keragaman pangan dengan indikator peningkatan produktifitas pangan utama, sayuran dan perkebunan dan pangan hewani, serta meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein dengan indikator tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Eenergi (AKE). Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP) dan konsumsi pangan perkapita/tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini bertujuan untuk menjamin tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam daerah.

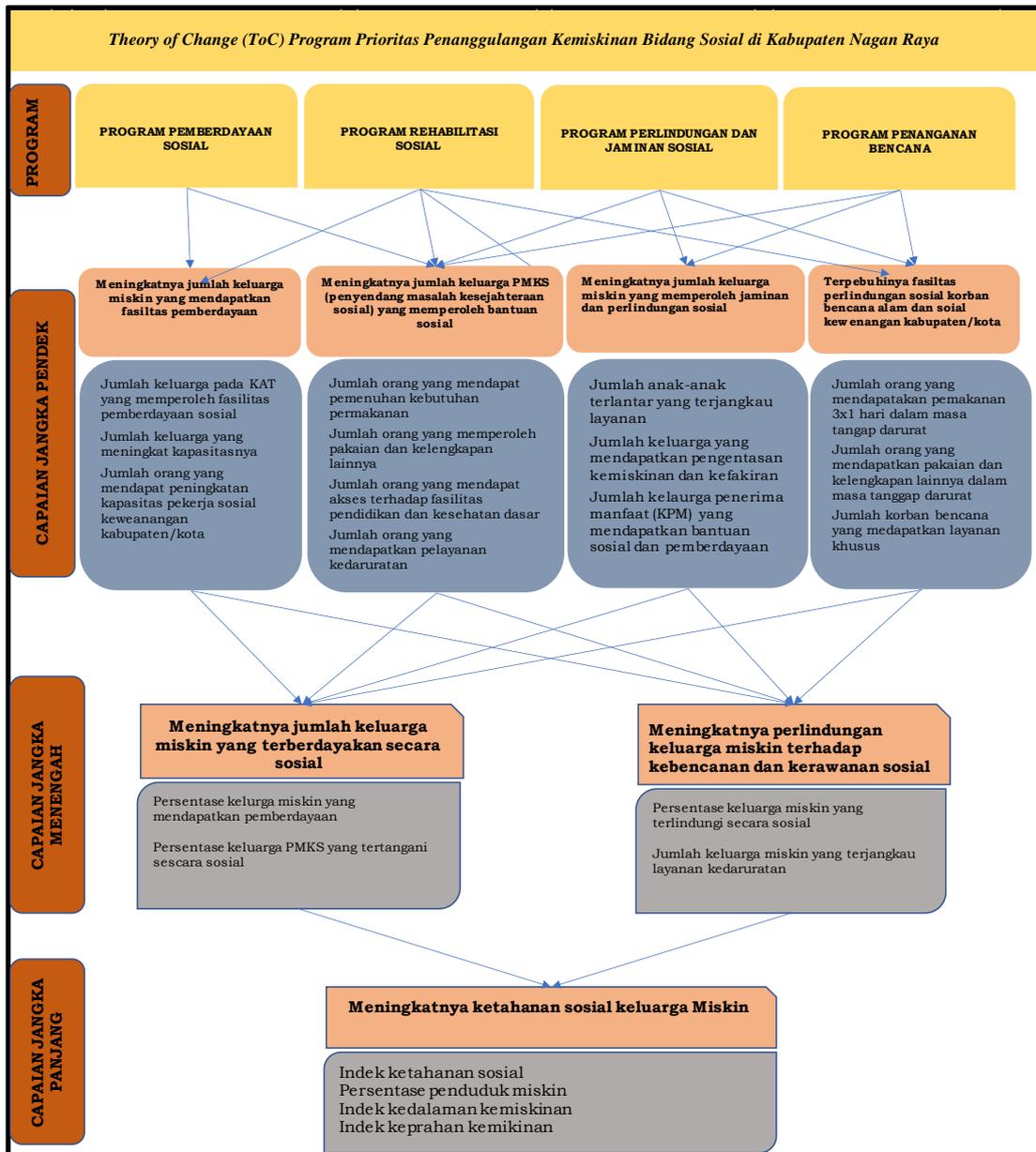
Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya produksi dan penyediaan keragaman pangan dengan indikator peningkatan produktifitas pangan hewani, serta meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein dengan indikator tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Eenergi (AKE). Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga miskin dengan indikator Indek Ketahanan Pangan (IKP) dan konsumsi pangan perkapita/tahun. Peningkatan indikator ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4.1.7. Logika Program (ToC) Bidang Sosial

Logika program (ToC) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Nagan Raya untuk bidang sosial difokuskan pada masalah pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, pemberdayaan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya selama ini khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan sosial yang lebih parah dari keluarga lain pada umumnya. Adapun tujuan akhir atau tujuan dalam jangka Panjang dari intervensi bidang sosial ini adalah peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin yang dicirikan oleh penurunan persentase penduduk miskin, penurunan indek kedalaman kemiskinan, indek keparahan kemiskinan dan peningkatan indek pembangunan manusia di Kabupaten Nagan Raya. Tujuan ini kemudian didukung oleh beberapa program utama bidang sosial yaitu program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program penanganan bencana Adapun TOC bidang ketahanan pangan Kabupaten Nagan Raya

adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7 ToC Bidang Sosial Kab. Nagan Raya



Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa logika program bidang sosial disusun untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan ketahanan sosial orang-orang miskin dengan indikator terjadinya peningkatan indek ketahanan sosial yang mencakup dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi permukiman. Indikator lainnya adalah terjadinya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman

kemiskinan, indek keperahan kemiskinan. Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya selama ini cenderung mengalami penurunan namun masih diatas rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional, pada tahun 2021 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 18,32 persen, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional yang hanya sebesar 9,71 persen. Demikian juga dengan indek kedalaman dan keparahan kemiskinan yang juga cenderung mengalami peningkatan. Untuk itu dibutuhkan beragaman intervensi dari pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan di bidang sosial untuk memastikan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya memiliki perlindungan dan jaminan sosial yang memadai, memiliki ketahanan sosial yang kuat yang ditujukan untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinannya. Berdasarkan logika program di atas kita dapat melihat terdapat tujuh program yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan pada bidang ketahanan pangan dalam Kabupaten Nagan Raya diantaranya adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya atau kekuatan individu miskin dan miskin ekstrem dalam mengubah pola hidup mereka agar lebih mandiri dan berdaya sehingga diharapkan dapat mendorong mereka untuk keluar dari kemiskinannya. Program pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT), kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan meningkatnya jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang

terberdayakan secara sosial, meningkatnya kualitas dan cakupan perlindungan keluarga miskin terhadap kebencanaan dan kerawanan sosial dengan indikator persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan pemberdayaan, persentase PMKS yang tertangani secara sosial, persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan sosial dan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terjangkau layanan kedaruratan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan sosial orang-orang miskin dengan indikator peningkatan indeks ketahanan sosial, penurunan persentase penduduk miskin, penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Dalam jangka panjang perbaikan indikator ini menjadi ukuran terjadinya peningkatan ketahanan sosial rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar terberdaya melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui program ini diharapkan individu miskin dan miskin ekstrem dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mendorong mereka keluar dari kemiskinannya. Program rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAVZA di luar panti sosial. pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT), kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan dan meningkatnya jumlah

keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) miskin dan miskin ekstrem yang terberdayakan secara sosial, meningkatnya kualitas dan cakupan perlindungan keluarga miskin terhadap kebencanaan dan kerawanan sosial dengan indikator persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan pemberdayaan, persentase PMKS yang tertangani secara sosial, persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan sosial dan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terjangkau layanan kedaruratan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan sosial dengan indikator indeks ketahanan sosial, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Dalam jangka panjang perbaikan indikator ini menjadi ukuran terjadinya peningkatan ketahanan sosial rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program perlindungan dan jaminan sosial memiliki cakupan yang cukup luas, Cakupan dalam kebijakan perlindungan dan jaminan sosial diantaranya meliputi perlindungan dan penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan dan jaminan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan, dan layanan lainnya. Melalui program ini diharapkan individu dan rumah

tangga miskin dan miskin ekstrem dapat menikmati kehidupan yang layak sehingga dapat mendorong mereka keluar dari kemiskinannya. Program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota. Program ini memiliki *outcome* jangka pendek yaitu meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terberdayakan secara sosial, meningkatnya kualitas dan cakupan perlindungan keluarga miskin terhadap kebencanaan dan kerawanan sosial dengan indikator persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan pemberdayaan, persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan sosial dan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terjangkau layanan kedaruratan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan sosial rumah tangga miskin dengan indikator indek ketahanan sosial, persentase penduduk miskin, indek kedalaman kemiskinan dan indek keparahan kemiskinan. Dalam jangka panjang, perbaikan indikator ini menjadi ukuran terjadinya peningkatan ketahanan sosial rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

4. Program Penanganan Bencana.

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana terutama bagi mereka yang miskin dan miskin ekstrem sehingga mereka dapat terlindungi dari ancaman bencana baik itu bencana alam, maupun bencana sosial. Disamping dari itu program ini juga bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh guna memastikan mereka yang terkena bencana

dapat di tanggulangi dengan baik. Program penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Sedangkan *outcome* jangka menengah dari program ini adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terberdayakan secara sosial, meningkatnya kualitas dan cakupan perlindungan keluarga miskin terhadap kebencanaan dan kerawanan sosial dengan indikator persentase keluarga miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan perlindungan sosial dan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terjangkau layanan kedaruratan. Sedangkan tujuan akhir dari program ini adalah meningkatnya ketahanan sosial orang-orang miskin dengan indikator peningkatan indek ketahanan sosial, penurunan persentase penduduk miskin, penurunan indek kedalaman kemiskinan dan indek keparahan kemiskinan. Dalam jangka panjang, perbaikan indikator ini menjadi ukuran terjadinya peningkatan ketahanan sosial rumah tangga miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan *Theory of Change* (ToC) atau teori perubahan di atas, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Nagan Raya dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah yang termasuk dalam kategori desil 1, 2, 3, 4 dimana seluruh bidang intervensi diarahkan untuk mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
 - a. Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program perlindungan sosial.
 - b. Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.

- c. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
 - d. Melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
2. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
- a. Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar.
 - b. Melalui peningkatan kapasitas SDM.
 - c. Melalui peningkatan kapasitas UMKM.
 - d. Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
3. Pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang menyasar penduduk miskin ekstrem, dengan strategi:
- a. Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
 - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah.
 - c. Mendorong konvergensi anggaran.
 - d. Mendorong konsolidasi program
 - e. Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

4.2. Analisis Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Kinerja pelaksanaan APBK Kabupaten Nagan Raya perlu ditingkatkan tidak hanya dari segi jumlah dan capaian, melainkan juga dari segi kualitas belanja dan kebermanfaatan guna menjawab tantangan dalam mewujudkan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya yang mandiri dan sejahtera. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan kinerja APBK Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir.

4.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan di Kabupaten Nagan Raya pada periode 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi pendapatan terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2020, namun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Realisasi pendapatan terendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 982 juta. Bila dilihat dari capaiannya per tahun, terlihat bahwa persentase pendapatan Nagan Raya terhadap nilai target tercatat tinggi di atas 81 persen meskipun terdapat juga realisasinya menurun. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami fluktuatif atau turun naik pada tahun 2017 hingga 2019 kemudian baru terjadi peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021. Realisasi pendapatan Nagan Raya mengalami puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 96 persen. Realisasi pendapatan Kabupaten Nagan Raya dalam APBK selama lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Nagan Raya Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	%	%
2017	1.266.663.945.370	1.138.556.108.950,68	89,89	-0,9
2018	1.109.758.966.210	982.156.185.125,24	88,50	-13,73
2019	1.279.480.445.950	1.125.215.929.047,06	87,94	14,56
2020	1.221.726.149.907	1.143.988.633.866,93	93,63	1,66
2021	1.145.834.771.001	1.100.054.282.888,30	96,00	-3,84
Rata-Rata Pertumbuhan				3,57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

Besarnya angka pendapatan Nagan Raya tidak dapat dipisahkan dari beberapa komponen penyusun pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah, sebagaimana tertuang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketentuan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen diantaranya: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer. Bila dilihat dari komponen Belanja Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021, secara rata-rata realisasi Belanja Nagan Raya mencapai 92,30 persen.

Untuk mengetahui secara lebih rinci perkembangan realisasi belanja Nagan Raya dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Persentase Realisasi Belanja Daerah Nagan Raya Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	%
BELANJA DAERAH	89,16	88,09	85,99	92,30	92,53	92,30
Belanja Operasi	89,51	89,66	86,2	90,65	92,48	87,27
Belanja Pegawai	89,58	93,08	88,23	92,49	97,77	88,27
Belanja Hibah	85,21	96,84	82,13	83,97	84,39	83,97
Belanja Bantuan Sosial	78,24	55,25	96,72	85,82	89,79	85,82
Belanja Barang dan Jasa	89,82	83,31	81,85	87,84	87,29	87,84
Belanja Transfer	94,37	93,38	93,2	94,79	94,28	93,83
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	18,29	30,86	75,72	54,24	75,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	94,38	94,14	94,29	95,07	94,77	94,21
Belanja Modal	86,59	79,04	80,93	94,87	96,24	87,18
Belanja Tidak Terduga	21,36	58,71	48,46	48,67	60,25	48,67

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

4.2.3. Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Nagan Raya yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Nagan Raya, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Nagan Raya dan penerbitan obligasi Nagan Raya. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Nagan Raya, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi.

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Nagan Raya
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	%	%
2017	14,177,209,984.51	15,242,479,093.09	107,51	64,45
2018	10,787,379,939.77	11,789,852,612.51	109,29	-22,65
2019	31,000,000,000.00	7,009,830,528.52	22,61	-40,54
2020	5,311,991,766.41	5,311,991,766.41	100	-24,22
2021	15,782,796,316.00	15,782,796,316.00	100	197,11
Rata-Rata Pertumbuhan				11,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021

Realisasi pembiayaan Nagan Raya selama periode tahun 2017-2021 cenderung mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi pembiayaan Nagan Raya mencapai Rp. 15,242,479,093.09, dan terus mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) hingga 2021 dengan capaian sebesar Rp. 15,782,796,316.00. Namun pada tahun 2019 realisasi pembiayaan mengalami penurunan sejumlah Rp. 7,009,830,528.52 yaitu sebesar 26.61 persen.

4.2.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu instrument ekonomi sebuah pemerintahan dalam menjalankan kebijakan dan rencananya. Kebijakan dan rencana ini akan diterjemahkan kedalam bentuk program dan kegiatan. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik,

pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah seharusnya merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan yang telah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBK dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adanya gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah kabupaten Nagan Raya pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut berupa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021.

Tabel 4.5 Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2017-2021

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Persentase %
2017	1.142.011.208.104,00	379.805.531.400,00	33,26
2018	987.053.457.994,62	404.177.503.897,62	40,05
2019	1.126.913.767.809,17	409.786.587.325,48	36,36
2020	1.132.517.829.317,00	377.122.108.096,15	33,3
2021	1.085.868.477.759,82	330.762.058.831,31	30,46
Rata-rata			40,79

Berdasarkan Tabel di atas diketahui proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2017-2021 diketahui berkisar antara 33.26 persen sampai 30.46 persen dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 40,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017- 2021 masih ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain porsi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan public lebih besar dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total

pengeluaran selama periode tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2018 yang mencapai 40,05%. Namun proporsi belanja ini mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penurunan ini dapat diartikan karena anggaran belanja dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya.

4.2.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2017-2021, diketahui defisit anggaran terjadi pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Adanya defisit anggaran pada tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan pengelolaan APBK belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Zakat/Infaq/Sadaqah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga dengan meningkatnya pendapatan dapat menjadi penyeimbang terhadap pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan khususnya untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nagan Raya.

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026
BAB V

LOKASI PRIORITAS

- 5.1. Menentukan Kecamatan Prioritas
- 5.2. Menentukan Desa Prioritas di Setiap Kecamatan

BAB V

LOKASI PRIORITAS

5.1. Menentukan Kecamatan Prioritas

Lokasi prioritas merupakan lokasi yang dipilih agar dapat melaksanakan program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas ini berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin dan berdasarkan indikator data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE Tahun 2022 dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia yang dipadukan dengan indeks desa membangun (IDM). Langkah-langkah yang harus ditentukan dalam menentukan lokasi prioritas yang pertama yaitu menentukan kecamatan prioritas, dan kemudian menentukan lima desa prioritas pada setiap kecamatan tersebut dengan melihat jumlah orang miskin atau rumah tangga miskin dan indek desa membangun (IDM). Secara Geografis Kabupaten Nagan Raya memiliki 221 Desa dan 10 Kecamatan dan menggunakan Indeks Kelurahan Membangun (IKM) dengan menggunakan metode sister village. Metode sister vilage menggunakan nilai IDM desa yang memiliki karakteristik sama dengan kelurahan. Metode ini disepakati bersama pada Focus Group Discussion tahun 2022.

Berikut ini disajikan data jumlah Rumah Tangga Miskin pada Desil 1 sesuai DTKS Penetapan Bulan Oktober Tahun 2020 dengan data nilai IDM/IKM pada 221 Desa dan 10 Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 5.1. Persandingan Jumlah D1 dan nilai IDM / IKM

No	Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai IDM/IKM
1	Beutong	Babah Krung	58	0.7114
2	Beutong	Blang Baro Pulo Raga	6	0.5789
3	Beutong	Blang Baro Rambong	120	0.6143
4	Beutong	Blang Dalam	37	0.6052
5	Beutong	Blang Leumak	11	0.5652
6	Beutong	Blang Mesjid	94	0.5578
7	Beutong	Blang Neuang	18	0.5427
8	Beutong	Blang Seumot	140	0.7041
9	Beutong	Blang Seuneng	30	0.5317
10	Beutong	Bumi Sari	21	0.629
11	Beutong	Gunong Nagan	5	0.5452
12	Beutong	Keude Seumot	25	0.7387
13	Beutong	Krung Cut	44	0.5413
14	Beutong	Kulam Jeureuneh	67	0.5357
15	Beutong	Kuta Jumpa	7	0.6378
16	Beutong	Lhok Seumot	99	0.6759
17	Beutong	Meunasah Dayah	31	0.6051
18	Beutong	Meunasah Krung	50	0.6740
19	Beutong	Meunasah Pante	66	0.6824
20	Beutong	Meunasah Teungoh	58	0.6025
21	Beutong	Pante Ara	24	0.5335
22	Beutong	Panten Bayam	63	0.5952
23	Beutong	Tuwi Bunta	9	0.5373
24	Beutong	Ujong Blang	17	0.5838
25	Butong Ateuh Banggalang	Babah Suak	34	0.4798
26	Butong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	0	0.5800
27	Butong Ateuh Banggalang	Blang Puuk	21	0.4867
28	Butong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	6	0.5519
29	Darul Makmur	Alue Bateung Brok	149	0.5659
30	Darul Makmur	Alue Bilie	10	0.7702

31	Darul Makmur	Alue Geutah	30	0.5381
32	Darul Makmur	Alue Jampak	4	0.5362
33	Darul Makmur	Alue Kuyun	14	0.5827
34	Darul Makmur	Alue Rambot	171	0.5659
35	Darul Makmur	Alue Raya	150	0.5678
36	Darul Makmur	Alue Waki	194	0.6346
37	Darul Makmur	Blang Baro	26	0.6011
38	Darul Makmur	Blang Luah	29	0.5770
39	Darul Makmur	Geulanggang Gajah	61	0.5643
40	Darul Makmur	Gunong Cut	62	0.6662
41	Darul Makmur	Karang Anyar	47	0.6849
42	Darul Makmur	Kayee Unoe	42	0.5843
43	Darul Makmur	Krueng Alem	34	0.6646
44	Darul Makmur	Krueng Seumayam	224	0.6535
45	Darul Makmur	Kuala Seumayam	18	0.5024
46	Darul Makmur	Kuta Trieng	16	0.6144
47	Darul Makmur	Ladang Baro	15	0.5267
48	Darul Makmur	Lamie	156	0.6144
49	Darul Makmur	Makarti Jaya	48	0.5268
50	Darul Makmur	Panton Bayu	94	0.6754
51	Darul Makmur	Pulo Ie	5	0.5598
52	Darul Makmur	Pulo Kruet	7	0.5597
53	Darul Makmur	Pulo Teungoh	105	0.6076
54	Darul Makmur	Serba Guna	31	0.6368
55	Darul Makmur	Serba Jadi	4	0.6962
56	Darul Makmur	Sidojadi	22	0.5789
57	Darul Makmur	Simpang Deli Kampong	28	0.6384
58	Darul Makmur	Simpang Deli Kilang	16	0.5681
59	Darul Makmur	Simpang Dua	34	0.6030
60	Darul Makmur	Suak Palembang	92	0.6273
61	Darul Makmur	Suka Jadi	2	0.5602
62	Darul Makmur	Suka Mulia	77	0.6217
63	Darul Makmur	Suka Raja	9	0.7019
64	Darul Makmur	Suka Ramai	18	0.6679
65	Darul Makmur	Sumber Makmur	47	0.5824

66	Darul Makmur	Tuwi Buya	46	0.5490
67	Darul Makmur	Ujong Lamie	183	0.5156
68	Darul Makmur	Ujong Tanjong	64	0.5478
69	Kuala	Alue Ie Mameh	0	0.7556
70	Kuala	Blang Baro	2	0.7040
71	Kuala	Blang Bintang	30	0.6594
72	Kuala	Blang Muko	20	0.7668
73	Kuala	Blang Teungoh	47	0.8249
74	Kuala	Cot Kumbang	87	0.7557
75	Kuala	Gunong Reubo	9	0.6554
76	Kuala	Jogja	21	0.7600
77	Kuala	Kuta Makmue	31	0.6389
78	Kuala	Lawa Batu	39	0.7202
79	Kuala	Pulo Ie	7	0.6037
80	Kuala	Purworejo	16	0.6535
81	Kuala	Simpang Peut	27	0.8197
82	Kuala	Ujong Padang	29	0.7484
83	Kuala	Ujong Pasi	41	0.6795
84	Kuala	Ujong Patihah	85	0.7256
85	Kuala	Ujong Sikuneng	1	0.6697
86	Kuala Pesisir	Arongan	90	0.7937
87	Kuala Pesisir	Cot Rambong	17	0.6724
88	Kuala Pesisir	Gampong Lhok	9	0.7410
89	Kuala Pesisir	Jati Rejo	7	0.7535
90	Kuala Pesisir	Kuala Baro	62	0.7738
91	Kuala Pesisir	Kuala Trang	68	0.7371
92	Kuala Pesisir	Kuala Tuha	63	0.7819
93	Kuala Pesisir	Kubang Gajah	17	0.7406
94	Kuala Pesisir	Langkak	0	0.8230
95	Kuala Pesisir	Lueng Teuku Ben	4	0.7370
96	Kuala Pesisir	Padang Panyang	132	0.7597
97	Kuala Pesisir	Padang Rubek	124	0.7219
98	Kuala Pesisir	Pulo	7	0.6956
99	Kuala Pesisir	Purwodadi	18	0.8048
100	Kuala Pesisir	Purwosari	0	0.8029

101	Kuala Pesisir	Suak Puntong	28	0.7289
102	Seunagan	Alue Buloh	6	0.5859
103	Seunagan	Alue Dodok	19	0.6375
104	Seunagan	Alue Tho	103	0.6275
105	Seunagan	Bantan	18	0.6262
106	Seunagan	Blang Baro	8	0.7035
107	Seunagan	Blang Murong	15	0.6232
108	Seunagan	Blang Pateuk	19	0.6192
109	Seunagan	Blang Puuk Kulu	16	0.6548
110	Seunagan	Blang Puuk Nigan	10	0.6498
111	Seunagan	Cot Kumbang	21	0.6119
112	Seunagan	Cot Lhe-Lhe	0	0.6444
113	Seunagan	Gampong Cot	45	0.6573
114	Seunagan	Jeuram	0	0.7092
115	Seunagan	Krueng Ceh	7	0.7003
116	Seunagan	Krueng Ceuko	1	0.6295
117	Seunagan	Krueng Mangkom	3	0.5168
118	Seunagan	Kulu	54	0.7002
119	Seunagan	Kuta Aceh	4	0.6200
120	Seunagan	Kuta Baro Jeuram	4	0.7060
121	Seunagan	Kuta Kumbang	10	0.6452
122	Seunagan	Kuta Paya	4	0.7056
123	Seunagan	Kuta Sayeh	7	0.6468
124	Seunagan	Latong	19	0.7073
125	Seunagan	Lhok Padang	0	0.5502
126	Seunagan	Lhok Parom	3	0.6329
127	Seunagan	Nigan	25	0.6716
128	Seunagan	Padang	5	0.6483
129	Seunagan	Pante Ceureumen	1	0.6256
130	Seunagan	Parom	1	0.7041
131	Seunagan	Paya Udeung	18	0.6327
132	Seunagan	Paya Undan	39	0.6813
133	Seunagan	Peureulak	4	0.6330
134	Seunagan	Rambong Cut	20	0.6930
135	Seunagan	Rambong Rayeuk	2	0.6402

136	Seunagan	Sapek	10	0.6508
137	Seunagan Timur	Keude Blang Ara	8	0.6698
138	Seunagan Timur	Cot Punti	6	0.7090
139	Seunagan Timur	Cot Diruy	0	0.6176
140	Seunagan Timur	Cot Mayang	4	0.6176
141	Seunagan Timur	Blang Bayu	6	0.6405
142	Seunagan Timur	Lhok Mesjid	29	0.6740
143	Seunagan Timur	Keude Linteung	5	0.6571
144	Seunagan Timur	Sapeng	0	0.6684
145	Seunagan Timur	Kandeh	14	0.6083
146	Seunagan Timur	Cot Teuku Dek	4	0.6025
147	Seunagan Timur	Peuleukung	3	0.6383
148	Seunagan Timur	Paya	2	0.6363
149	Seunagan Timur	Kila	8	0.4759
150	Seunagan Timur	Blang Panyang	55	0.6230
151	Seunagan Timur	Kabu Baroh	4	0.6490
152	Seunagan Timur	Cod Gud	19	0.7097
153	Seunagan Timur	Kabu Tunong	48	0.6811
154	Seunagan Timur	Uteun Pulo	30	0.6775
155	Seunagan Timur	Meurandeh Suak	31	0.6787
156	Seunagan Timur	Pulo Teungoh	4	0.6175
157	Seunagan Timur	Krueng Kulu	51	0.6127
158	Seunagan Timur	Blang Ara Kmp	16	0.6495
159	Seunagan Timur	Ie Beudoh	4	0.6835
160	Seunagan Timur	Blang Preh	10	0.6103
161	Seunagan Timur	Suak Perbong	11	0.6452
162	Seunagan Timur	Mon Bateung	16	0.6816
163	Seunagan Timur	Blang Teungku	5	0.5652
164	Seunagan Timur	Blang Geudong	25	0.6122
165	Seunagan Timur	Blang Lango	1	0.5787
166	Seunagan Timur	Sawang Mane	23	0.6190
167	Seunagan Timur	Tuwi Meuleusong	6	0.5451
168	Seunagan Timur	Meugat Meuh	9	0.6871
169	Seunagan Timur	Lhok Pange	54	0.6854
170	Seunagan Timur	Keude Neulop	37	0.6270
171	Suka Makmue	Macah	19	0.5914
172	Suka Makmue	Seumambek	7	0.5779

173	Suka Makmue	Alue Kambuk	3	0.6276
174	Suka Makmue	Kuta Padang	11	0.6889
175	Suka Makmue	Cot Kuta	11	0.7240
176	Suka Makmue	Suak Bilie	16	0.6627
177	Suka Makmue	Lueng Baro	35	0.7744
178	Suka Makmue	Kabu Blang Sapek	44	0.6605
179	Suka Makmue	Blang Sapek	1	0.7117
180	Suka Makmue	Lhok Ramean	6	0.6183
181	Suka Makmue	Cot Peuradi	4	0.6790
182	Suka Makmue	Kampong Teungoh	4	0.6403
183	Suka Makmue	Lhok Beutong	5	0.5863
184	Suka Makmue	Alue Gajah	2	0.6262
185	Suka Makmue	Kuta Baro Bm	2	0.6960
186	Suka Makmue	Meurebo	14	0.6659
187	Suka Makmue	Blang Mulieng	3	0.6257
188	Suka Makmue	Krak Tampai	84	0.6683
189	Suka Makmue	Alue Peusaja	7	0.6387
190	Tadu Raya	Alue Bata	60	0.6137
191	Tadu Raya	Alue Gajah	6	0.5506
192	Tadu Raya	Alue Labu	9	0.5573
193	Tadu Raya	Alue Seupeung	21	0.6000
194	Tadu Raya	Alue Siron	21	0.6897
195	Tadu Raya	Babah Dua	8	0.6217
196	Tadu Raya	Babah Rot	74	0.5359
197	Tadu Raya	Batu Raja	23	0.6438
198	Tadu Raya	Cot Mee	19	0.7033
199	Tadu Raya	Cot Mue	0	0.7214
200	Tadu Raya	Gapa Garu	19	0.6098
201	Tadu Raya	Gunong Geulugo	18	0.6497
202	Tadu Raya	Gunong Kupok	11	0.6617
203	Tadu Raya	Gunong Pungkie	62	0.6890
204	Tadu Raya	Gunong Sapek	11	0.6954
205	Tadu Raya	Krung Itam	5	0.6867
206	Tadu Raya	Kuala Tadu	11	0.7095
207	Tadu Raya	Pasi Luah	1	0.5598
208	Tadu Raya	Rantau Selamat	18	0.6846
209	Tadu Raya	Sarah Mantok	18	0.6325

210	Tadu Raya	Simpang Jaya	25	0.6511
211	Tadu Raya	Sumber Daya	12	0.6892
212	Tripa Makmur	Babah Lueng	1	0.6343
213	Tripa Makmur	Drien Tujoh	17	0.6292
214	Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	71	0.6217
215	Tripa Makmur	Kabu	21	0.6373
216	Tripa Makmur	Pasi Keubeu Dom	21	0.6414
217	Tripa Makmur	Neubok Yee Pk	33	0.6268
218	Tripa Makmur	Neubok Yee Pp	40	0.6397
219	Tripa Makmur	Mon Dua	5	0.6457
220	Tripa Makmur	Ujong Krueng	21	0.6948
221	Tripa Makmur	Panton Pange	25	0.6649

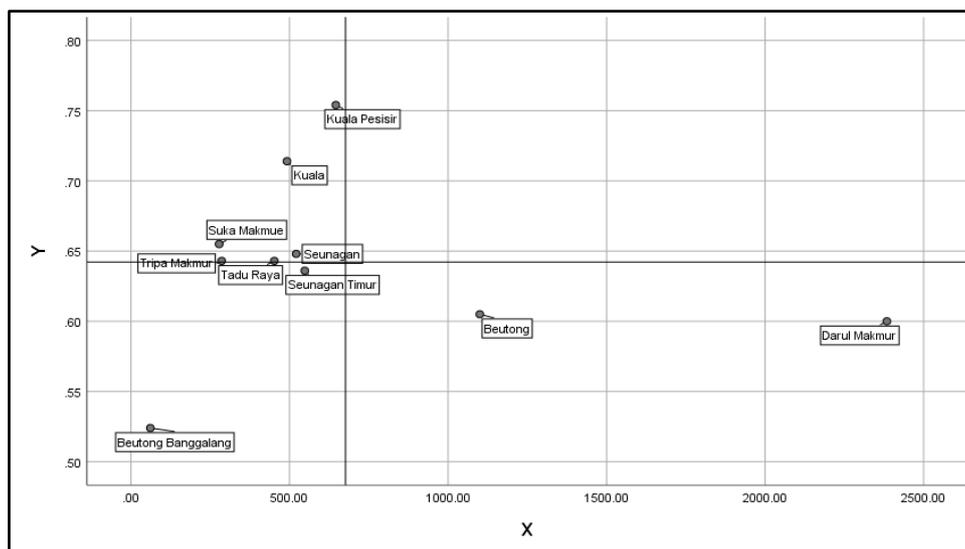
Selanjutnya yaitu menentukan prioritas lokasi kecamatan. Prioritas kecamatan mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya.

Tabel 5.2. Menentukan Lokasi Kecamatan Prioritas

No.	Nama Kecamatan	Jumlah D1	Rata-rata nilai IDM/IKM	1- Rata-rata nilai IDM/IKM	Jumlah D1 x (1-Rata-rata IDM/IKM)	Keterangan
1	Beutong	1.100	0.6053	0.3947	434.17	Prioritas 2
2	Butong Ateuh Banggalang	61	0.5246	0.4754	28.9872	Prioritas 10
3	Darul Makmur	2.384	0,6010	0.399	951.216	Prioritas 1
4	Kuala	492	0.7142	0.2858	140.6136	Prioritas 7
5	Kuala Pesisir	646	0.7542	0.2458	158.7868	Prioritas 6
6	Seunagan	521	0.6483	0.3517	183.2357	Prioritas 4
7	Seunagan Timur	548	0.6368	0.3632	199.0336	Prioritas 3
8	Suka Makmue	278	0.6559	0.3441	95.6598	Prioritas 9
9	Tadu Raya	452	0.6434	0.3566	161.1832	Prioritas 5
10	Tripa Makmur	286	0.6435	0.3565	101.959	Prioritas 8

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, selanjutnya dapat dibuat pemetaan Kecamatan dan Desa yang menjadi prioritas diantaranya adalah:

Gambar 5.1. Pemetaan Kecamatan Prioritas



5.2. Menentukan Desa Priotitas di Setiap Kecamatan

5.2.1. Kecamatan Darul Makmur

Kecamatan Darul Makmur memiliki 40 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.5.

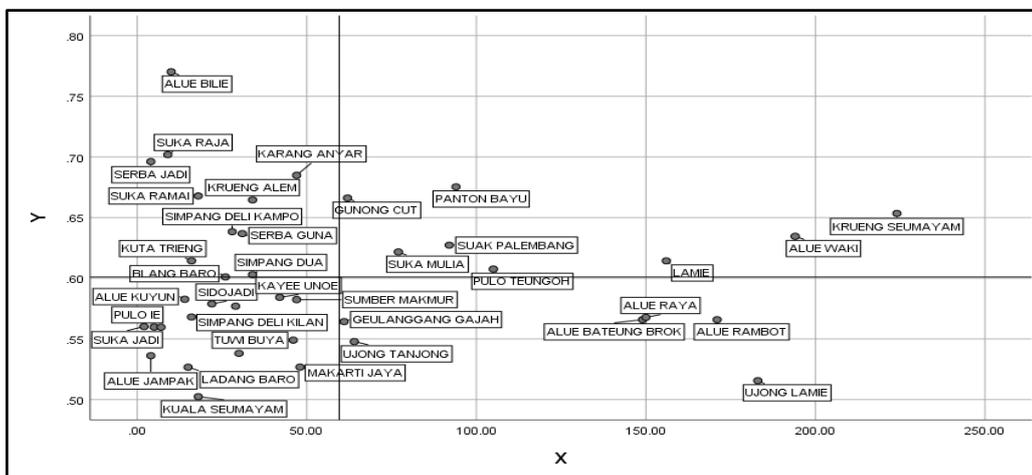
Tabel 5.3 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Darul Makmur

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- nilai IDM	Jumlah D1 x (1- nilai IDM)	Keterangan
Darul Makmur	Alue Bateung Brok	149	0.5659	0.4341	64.6809	Prioritas 6
Darul Makmur	Alue Bilie	10	0.7702	0.2298	2.298	Prioritas 36
Darul Makmur	Alue Geutah	30	0.5381	0.4619	13.857	Prioritas 20

Darul Makmur	Alue Jampak	4	0.5362	0.4638	1.8552	Prioritas 38
Darul Makmur	Alue Kuyun	14	0.5827	0.4173	5.8422	Prioritas 33
Darul Makmur	Alue Rambot	171	0.5659	0.4341	74.2311	Prioritas 3
Darul Makmur	Alue Raya	150	0.5678	0.4322	64.83	Prioritas 5
Darul Makmur	Alue Waki	194	0.6346	0.3654	70.8876	Prioritas 4
Darul Makmur	Blang Baro	26	0.6011	0.3989	10.3714	Prioritas 25
Darul Makmur	Blang Luah	29	0.5770	0.423	12.267	Prioritas 22
Darul Makmur	Geulanggang Gajah	61	0.5643	0.4357	26.5777	Prioritas 13
Darul Makmur	Gunong Cut	62	0.6662	0.3338	20.6956	Prioritas 16
Darul Makmur	Karang Anyar	47	0.6849	0.3151	14.8097	Prioritas 19
Darul Makmur	Kayee Unoe	42	0.5843	0.4157	17.4594	Prioritas 18
Darul Makmur	Krueng Alem	34	0.6646	0.3354	11.4036	Prioritas 23
Darul Makmur	Krueng Seumayam	224	0.6535	0.3465	77.616	Prioritas 2
Darul Makmur	Kuala Seumayam	18	0.5024	0.4976	8.9568	Prioritas 28
Darul Makmur	Kuta Trieng	16	0.6144	0.3856	6.1696	Prioritas 31
Darul Makmur	Ladang Baro	15	0.5267	0.4733	7.0995	Prioritas 29
Darul Makmur	Lamie	156	0.6144	0.3856	60.1536	Prioritas 7
Darul Makmur	Makarti Jaya	48	0.5268	0.4732	22.7136	Prioritas 14
Darul Makmur	Panton Bayu	94	0.6754	0.3246	30.5124	Prioritas 10
Darul Makmur	Pulo Ie	5	0.5598	0.4402	2.201	Prioritas 37
Darul Makmur	Pulo Kruet	7	0.5597	0.4403	3.0821	Prioritas 34
Darul Makmur	Pulo Teungoh	105	0.6076	0.3924	41.202	Prioritas 8
Darul Makmur	Serba Guna	31	0.6368	0.3632	11.2592	Prioritas 24
Darul Makmur	Serba Jadi	4	0.6962	0.3038	1.2152	Prioritas 39
Darul Makmur	Sidojadi	22	0.5789	0.4211	9.2642	Prioritas 27
Darul Makmur	Simpang Deli Kampong	28	0.6384	0.3616	10.1248	Prioritas 26
Darul Makmur	Simpang Deli Kilang	16	0.5681	0.4319	6.9104	Prioritas 30
Darul Makmur	Simpang Dua	34	0.6030	0.397	13.498	Prioritas 21
Darul Makmur	Suak Palembang	92	0.6273	0.3727	34.2884	Prioritas 9
Darul Makmur	Suka Jadi	2	0.5602	0.4398	0.8796	Prioritas 40
Darul Makmur	Suka Mulia	77	0.6217	0.3783	29.1291	Prioritas 11
Darul Makmur	Suka Raja	9	0.7019	0.2981	2.6829	Prioritas 35
Darul Makmur	Suka Ramai	18	0.6679	0.3321	5.9778	Prioritas 32
Darul Makmur	Sumber Makmur	47	0.5824	0.4176	19.6272	Prioritas 17
Darul Makmur	Tuwi Buya	46	0.5490	0.451	20.746	Prioritas 15

Darul Makmur	Ujong Lamie	183	0.5156	0.4844	88.6452	Prioritas 1
Darul Makmur	Ujong Tanjung	64	0.5478	0.4522	28.9408	Prioritas 12

Gambar 5.2 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Darul Makmur



5.2.2. Kecamatan Beutong

Kecamatan Beutong memiliki 23 desa. Penentuan prioritas desa mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.3.

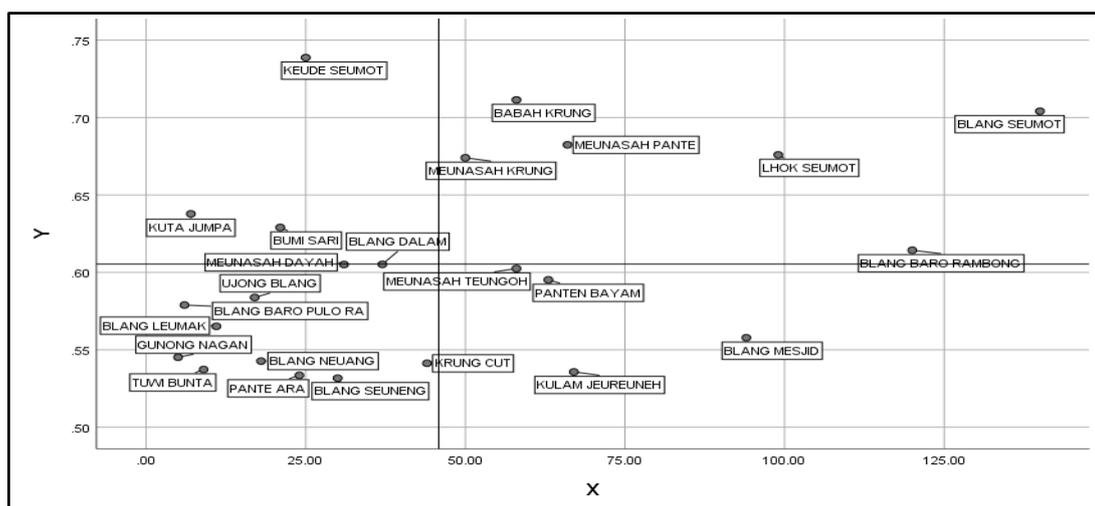
Tabel 5.4. Tabel Penentuan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- nilai IDM/IKM	Jumlah D1 x (1- nilai IDM)	Keterangan
Beutong	Babah Krung	58	0.7114	0.2886	16.7388	Prioritas 10
Beutong	Blang Baro Pulo Raga	6	0.5789	0.4211	2.5266	Prioritas 23
Beutong	Blang Baro Rambong	120	0.6143	0.3857	46.284	Prioritas 1
Beutong	Blang Dalam	37	0.6052	0.3948	14.6076	Prioritas 12
Beutong	Blang Leumak	11	0.5652	0.5652	6.2172	Prioritas 20
Beutong	Blang Mesjid	94	0.5578	0.4422	41.5668	Prioritas 2
Beutong	Blang Neuang	18	0.5427	0.5427	9.7686	Prioritas 16



Beutong	Blang Seumot	140	0.7041	0.2959	41.426	Prioritas 3
Beutong	Blang Seuneng	30	0.5317	0.5317	15.951	Prioritas 11
Beutong	Bumi Sari	21	0.629	0.371	7.791	Prioritas 17
Beutong	Gunong Nagan	5	0.5452	0.4548	2.274	Prioritas 24
Beutong	Keude Seumot	25	0.7387	0.2613	6.5325	Prioritas 19
Beutong	Krung Cut	44	0.5413	0.4587	20.1828	Prioritas 9
Beutong	Kulam Jeureuneh	67	0.5357	0.4643	31.1081	Prioritas 5
Beutong	Kuta Jumpa	7	0.6378	0.3622	2.5354	Prioritas 22
Beutong	Lhok Seumot	99	0.6759	0.3241	32.0859	Prioritas 4
Beutong	Meunasah Dayah	31	0.6051	0.3949	12.2419	Prioritas 14
Beutong	Meunasah Krung	50	0.6740	0.326	16.3	Prioritas 13
Beutong	Meunasah Pante	66	0.6824	0.3176	20.9616	Prioritas 8
Beutong	Meunasah Teungoh	58	0.6025	0.3975	23.055	Prioritas 7
Beutong	Pante Ara	24	0.5335	0.4665	11.196	Prioritas 15
Beutong	Panten Bayam	63	0.5952	0.4048	25.5024	Prioritas 6
Beutong	Tuwi Bunta	9	0.5373	0.4627	4.1643	Prioritas 21
Beutong	Ujong Blang	17	0.5838	0.4162	7.0754	Prioritas 18

Gambar 5.3. Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Beutong



5.2.3. Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang

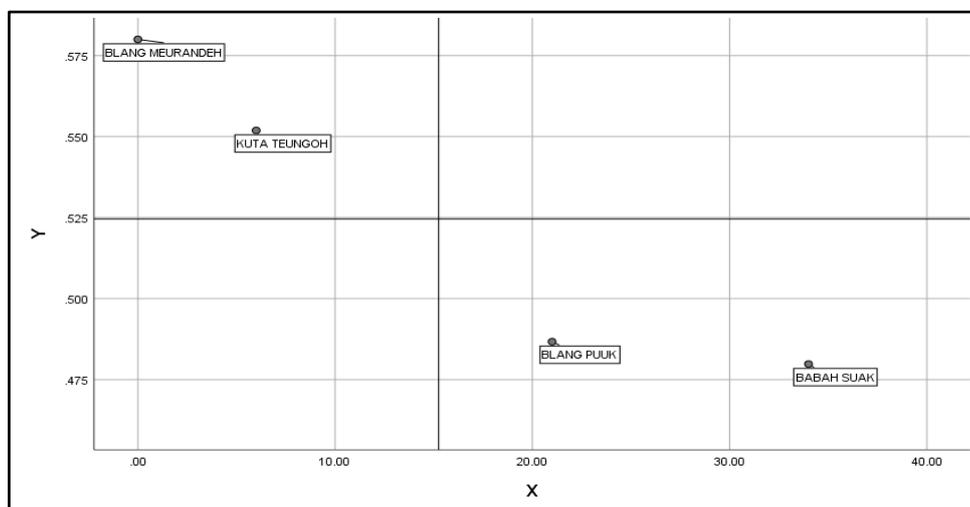
Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang memiliki 4 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data

D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.4.

Tabel 5.5 Tabel penentuan desa prioritas di kecamatan Butong Ateuh Banggalang

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- nilai IDM/IKM	Jumlah D1 x (1- nilai IDM)	Keterangan
Butong Ateuh Banggalang	Babah Suak	34	0.4798	0.5202	17.6868	Prioritas 1
Butong Ateuh Banggalang	Blang Meurandeh	0	0.5800	0.42	0	Prioritas 4
Butong Ateuh Banggalang	Blang Puuk	21	0.4867	0.5133	10.7793	Prioritas 2
Butong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	6	0.5519	0.4481	2.6886	Prioritas 3

Gambar 5.4 Pemetaan Desa Prioritas di Kecamatan Butong Ateuh Banggalang



5.2.4. Kecamatan Kuala

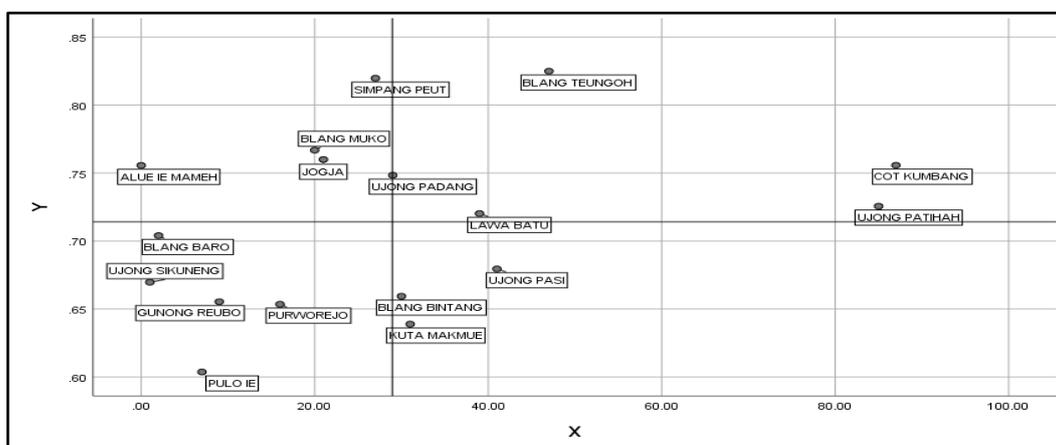
Kecamatan Kuala memiliki 17 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan

untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Kuala

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Kuala	Alue Ie Mameh	0	0.7556	0.2444	-	Prioritas 17
Kuala	Blang Baro	2	0.7040	0.296	0.592	Prioritas 15
Kuala	Blang Bintang	30	0.6594	0.3406	10.218	Prioritas 6
Kuala	Blang Muko	20	0.7668	0.2332	4.664	Prioritas 12
Kuala	Blang Teungoh	47	0.8249	0.1751	8.230	Prioritas 7
Kuala	Cot Kumbang	87	0.7557	0.2443	21.254	Prioritas 2
Kuala	Gunong Reubo	9	0.6554	0.3446	3.101	Prioritas 13
Kuala	Jogja	21	0.7600	0.24	5.040	Prioritas 10
Kuala	Kuta Makmue	31	0.6389	0.3611	11.194	Prioritas 4
Kuala	Lawa Batu	39	0.7202	0.2798	10.912	Prioritas 5
Kuala	Pulo Ie	7	0.6037	0.3963	2.774	Prioritas 14
Kuala	Purworejo	16	0.6535	0.3465	5.544	Prioritas 9
Kuala	Simpang Peut	27	0.8197	0.1803	4.868	Prioritas 11
Kuala	Ujong Padang	29	0.7484	0.2516	7.296	Prioritas 8
Kuala	Ujong Pasi	41	0.6795	0.3205	13.141	Prioritas 3
Kuala	Ujong Patihah	85	0.7256	0.2744	23.324	Prioritas 1
Kuala	Ujong Sikuneng	1	0.6697	0.3303	0.330	Prioritas 16

Gambar 5.5 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Kuala



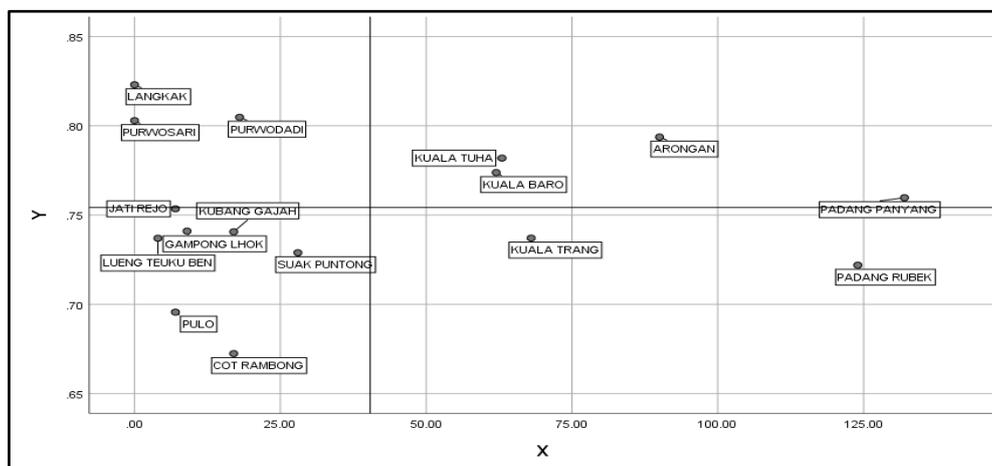
5.2.5. Kecamatan Kuala Pesisir

Kecamatan Kuala Pesisir memiliki 15 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Kuala Pesisir

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Kuala Pesisir	Arongan	90	0.7937	0.2063	18.567	Prioritas 3
Kuala Pesisir	Cot Rambong	17	0.6724	0.3276	5.569	Prioritas 8
Kuala Pesisir	Gampong Lhok	9	0.7410	0.259	2.331	Prioritas 11
Kuala Pesisir	Jati Rejo	7	0.7535	0.2465	1.726	Prioritas 13
Kuala Pesisir	Kuala Baro	62	0.7738	0.2262	14.024	Prioritas 5
Kuala Pesisir	Kuala Trang	68	0.7371	0.2629	17.877	Prioritas 4
Kuala Pesisir	Kuala Tuha	63	0.7819	0.2181	13.740	Prioritas 6
Kuala Pesisir	Kubang Gajah	17	0.7406	0.2594	4.410	Prioritas 9
Kuala Pesisir	Langkak	0	0.8230	0.177	-	Prioritas 15
Kuala Pesisir	Lueng Teuku Ben	4	0.7370	0.263	1.052	Prioritas 14
Kuala Pesisir	Padang Panyang	132	0.7597	0.2403	31.720	Prioritas 2
Kuala Pesisir	Padang Rubek	124	0.7219	0.2781	34.484	Prioritas 1
Kuala Pesisir	Pulo	7	0.6956	0.3044	2.131	Prioritas 12
Kuala Pesisir	Purwodadi	18	0.8048	0.1952	3.514	Prioritas 10
Kuala Pesisir	Purwosari	0	0.8029	0.1971	-	Prioritas 15
Kuala Pesisir	Suak Puntong	28	0.7289	0.2711	7.591	Prioritas 7

Gambar 5.6 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Kuala Pesisir



5.2.6. Kecamatan Seunagan

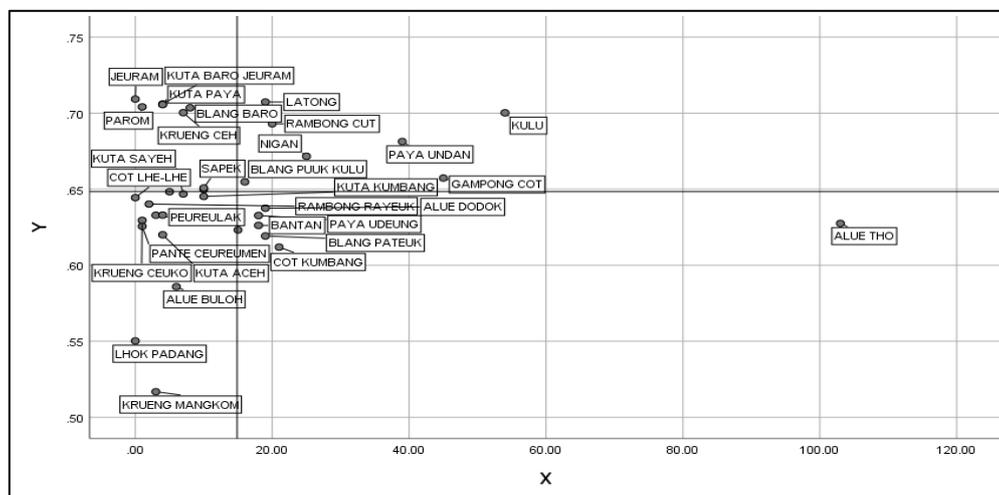
Kecamatan Seunagan memiliki 33 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Seunagan

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Seunagan	Alue Buloh	6	0.5859	0.4141	2.485	Prioritas 18
Seunagan	Alue Dodok	19	0.6375	0.3625	6.888	Prioritas 8
Seunagan	Alue Tho	103	0.6275	0.3725	38.368	Prioritas 1
Seunagan	Bantan	18	0.6262	0.3738	6.728	Prioritas 9
Seunagan	Blang Baro	8	0.7035	0.2965	2.372	Prioritas 20
Seunagan	Blang Murong	15	0.6232	0.3768	5.652	Prioritas 12
Seunagan	Blang Pateuk	19	0.6192	0.3808	7.235	Prioritas 7

Seunagan	Blang Puuk Kulu	16	0.6548	0.3452	5.523	Prioritas 14
Seunagan	Blang Puuk Nigan	10	0.6498	0.3502	3.502	Prioritas 16
Seunagan	Cot Kumbang	21	0.6119	0.3881	8.150	Prioritas 6
Seunagan	Cot Lhe-Lhe	0	0.6444	0.3556	-	Prioritas 33
Seunagan	Gampong Cot	45	0.6573	0.3427	15.422	Prioritas 3
Seunagan	Jeuram	0	0.7092	0.2908	-	Prioritas 33
Seunagan	Krueng Ceh	7	0.7003	0.2997	2.098	Prioritas 21
Seunagan	Krueng Ceuko	1	0.6295	0.3705	0.371	Prioritas 31
Seunagan	Krueng Mangkom	3	0.5168	0.4832	1.450	Prioritas 25
Seunagan	Kulu	54	0.7002	0.2998	16.189	Prioritas 2
Seunagan	Kuta Aceh	4	0.6200	0.38	1.520	Prioritas 23
Seunagan	Kuta Baro Jeuram	4	0.7060	0.294	1.176	Prioritas 27
Seunagan	Kuta Kumbang	10	0.6452	0.3548	3.548	Prioritas 15
Seunagan	Kuta Paya	4	0.7056	0.2944	1.178	Prioritas 26
Seunagan	Kuta Sayeh	7	0.6468	0.3532	2.472	Prioritas 19
Seunagan	Latong	19	0.7073	0.2927	5.561	Prioritas 13
Seunagan	Lhok Padang	0	0.5502	0.4498	-	Prioritas 33
Seunagan	Lhok Parom	3	0.6329	0.3671	1.101	Prioritas 28
Seunagan	Nigan	25	0.6716	0.3284	8.210	Prioritas 5
Seunagan	Padang	5	0.6483	0.3517	1.759	Prioritas 22
Seunagan	Pante Ceureumen	1	0.6256	0.3744	0.374	Prioritas 30
Seunagan	Parom	1	0.7041	0.2959	0.296	Prioritas 32
Seunagan	Paya Udeung	18	0.6327	0.3673	6.611	Prioritas 10
Seunagan	Paya Undan	39	0.6813	0.3187	12.429	Prioritas 4
Seunagan	Peureulak	4	0.6330	0.367	1.468	Prioritas 24
Seunagan	Rambong Cut	20	0.6930	0.307	6.140	Prioritas 11
Seunagan	Rambong Rayeuk	2	0.6402	0.3598	0.720	Prioritas 29
Seunagan	Sapek	10	0.6508	0.3492	3.492	Prioritas 17

Gambar 5.7 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Seunagan



5.2.7. Kecamatan Seunagan Timur

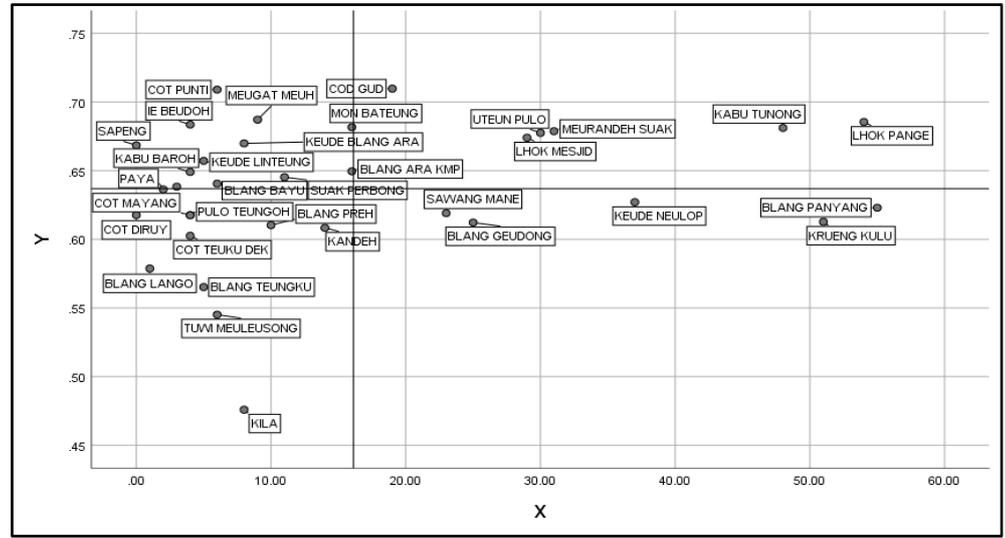
Kecamatan Seunagan Timur memiliki 33 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.9.

Tabel 5.8 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Seunagan Timur

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Seunagan Timur	Keude Blang Ara	8	0.6698	0.3302	2.642	Prioritas 20
Seunagan Timur	Cot Punti	6	0.7090	0.291	1.746	Prioritas 23
Seunagan Timur	Cot Diruy	0	0.6176	0.3824	-	Prioritas 33
Seunagan Timur	Cot Mayang	4	0.6176	0.3824	1.530	Prioritas 27
Seunagan Timur	Blang Bayu	6	0.6405	0.3595	2.157	Prioritas 22
Seunagan Timur	Lhok Mesjid	29	0.6740	0.326	9.454	Prioritas 9
Seunagan Timur	Keude Linteung	5	0.6571	0.3429	1.715	Prioritas 24
Seunagan Timur	Sapeng	0	0.6684	0.3316	-	Prioritas 33
Seunagan Timur	Kandeh	14	0.6083	0.3917	5.484	Prioritas 13

Seunagan Timur	Cot Teuku Dek	4	0.6025	0.3975	1.590	Prioritas 25
Seunagan Timur	Peuleukung	3	0.6383	0.3617	1.085	Prioritas 30
Seunagan Timur	Paya	2	0.6363	0.3637	0.727	Prioritas 31
Seunagan Timur	Kila	8	0.4759	0.5241	4.193	Prioritas 15
Seunagan Timur	Blang Panyang	55	0.6230	0.377	20.735	Prioritas 1
Seunagan Timur	Kabu Baroh	4	0.6490	0.351	1.404	Prioritas 28
Seunagan Timur	Cod Gud	19	0.7097	0.2903	5.516	Prioritas 12
Seunagan Timur	Kabu Tunong	48	0.6811	0.3189	15.307	Prioritas 4
Seunagan Timur	Uteun Pulo	30	0.6775	0.3225	9.675	Prioritas 8
Seunagan Timur	Meurandeh Suak	31	0.6787	0.3213	9.960	Prioritas 6
Seunagan Timur	Pulo Teungoh	4	0.6175	0.3825	1.530	Prioritas 26
Seunagan Timur	Krueng Kulu	51	0.6127	0.3873	19.752	Prioritas 2
Seunagan Timur	Blang Ara Kmp	16	0.6495	0.3505	5.608	Prioritas 11
Seunagan Timur	Ie Beudoh	4	0.6835	0.3165	1.266	Prioritas 29
Seunagan Timur	Blang Preh	10	0.6103	0.3897	3.897	Prioritas 17
Seunagan Timur	Suak Perbong	11	0.6452	0.3548	3.903	Prioritas 16
Seunagan Timur	Mon Bateung	16	0.6816	0.3184	5.094	Prioritas 14
Seunagan Timur	Blang Teungku	5	0.5652	0.4348	2.174	Prioritas 21
Seunagan Timur	Blang Geudong	25	0.6122	0.3878	9.695	Prioritas 7
Seunagan Timur	Blang Lango	1	0.5787	0.4213	0.421	Prioritas 32
Seunagan Timur	Sawang Mane	23	0.6190	0.381	8.763	Prioritas 10
Seunagan Timur	Tuwi Meuleusong	6	0.5451	0.4549	2.729	Prioritas 19
Seunagan Timur	Meugat Meuh	9	0.6871	0.3129	2.816	Prioritas 18
Seunagan Timur	Lhok Pange	54	0.6854	0.3146	16.988	Prioritas 3
Seunagan Timur	Keude Neulop	37	0.6270	0.373	13.801	Prioritas 5

Gambar 5.8 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Seunagan Timur



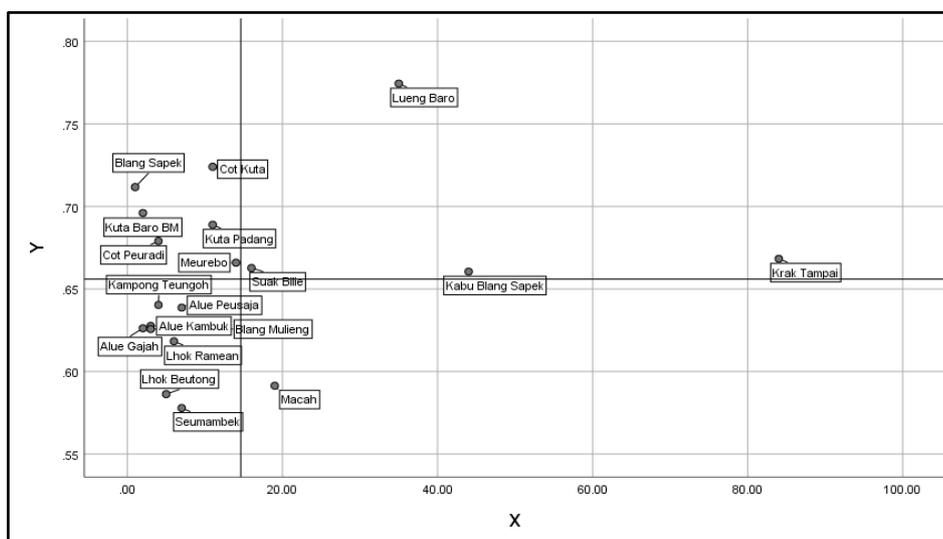
5.2.8. Kecamatan Suka Makmue

Kecamatan Suka Makmue memiliki 19 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.10

Tabel 5.9 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Suka Makmue

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Suka Makmue	Macah	19	0.5914	0.4086	7.763	Prioritas 4
Suka Makmue	Seumambek	7	0.5779	0.4221	2.955	Prioritas 9
Suka Makmue	Alue Kambuk	3	0.6276	0.3724	1.117	Prioritas 16
Suka Makmue	Kuta Padang	11	0.6889	0.3111	3.422	Prioritas 7
Suka Makmue	Cot Kuta	11	0.7240	0.276	3.036	Prioritas 8
Suka Makmue	Suak Bilie	16	0.6627	0.3373	5.397	Prioritas 5
Suka Makmue	Lueng Baro	35	0.7744	0.2256	7.896	Prioritas 3
Suka Makmue	Kabu Blang Sapek	44	0.6605	0.3395	14.938	Prioritas 2
Suka Makmue	Blang Sapek	1	0.7117	0.2883	0.288	Prioritas 19
Suka Makmue	Lhok Ramean	6	0.6183	0.3817	2.290	Prioritas 11
Suka Makmue	Cot Peuradi	4	0.6790	0.321	1.284	Prioritas 14
Suka Makmue	Kampong Teungoh	4	0.6403	0.3597	1.439	Prioritas 13
Suka Makmue	Lhok Beutong	5	0.5863	0.4137	2.069	Prioritas 12
Suka Makmue	Alue Gajah	2	0.6262	0.3738	0.748	Prioritas 17
Suka Makmue	Kuta Baro BM	2	0.6960	0.304	0.608	Prioritas 18
Suka Makmue	Meurebo	14	0.6659	0.3341	4.677	Prioritas 6
Suka Makmue	Blang Mulieng	3	0.6257	0.3743	1.123	Prioritas 15
Suka Makmue	Krak Tampai	84	0.6683	0.3317	27.863	Prioritas 1
Suka Makmue	Alue Peusaja	7	0.6387	0.3613	2.529	Prioritas 10

Gambar 5.9 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Suka Makmue



5.2.9. Kecamatan Tadu Raya

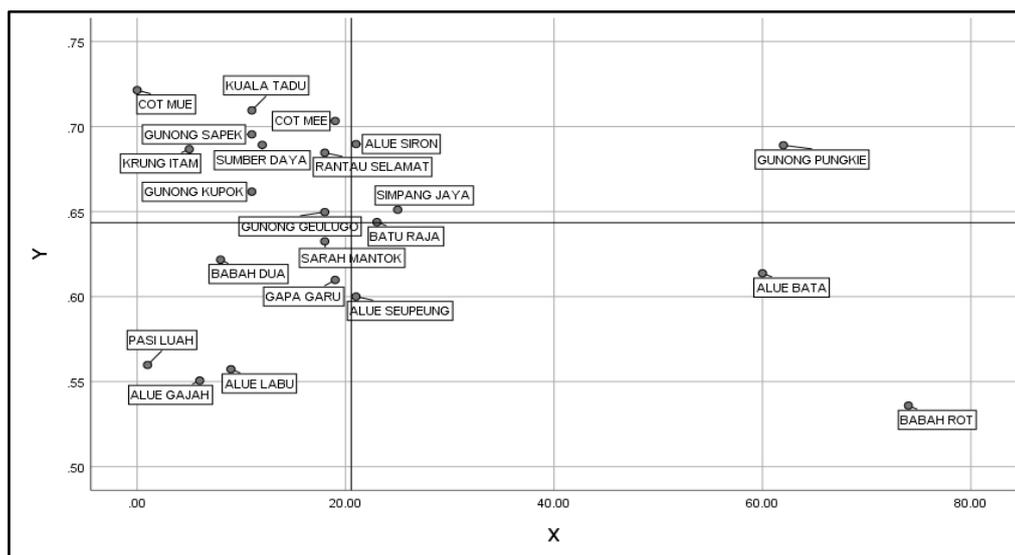
Kecamatan Tadu Raya memiliki 22 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.11.

Tabel 5.10 Tabel Penentuan Desa Prioritas Di Kecamatan Tadu Raya

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Tadu Raya	Alue Bata	60	0.6137	0.3863	23.178	Prioritas 2
Tadu Raya	Alue Gajah	6	0.5506	0.4494	2.696	Prioritas 19
Tadu Raya	Alue Labu	9	0.5573	0.4427	3.984	Prioritas 13
Tadu Raya	Alue Seupeung	21	0.6000	0.4	8.400	Prioritas 5
Tadu Raya	Alue Siron	21	0.6897	0.3103	6.516	Prioritas 9
Tadu Raya	Babah Dua	8	0.6217	0.3783	3.026	Prioritas 18
Tadu Raya	Babah Rot	74	0.5359	0.4641	34.343	Prioritas 1
Tadu Raya	Batu Raja	23	0.6438	0.3562	8.193	Prioritas 6
Tadu Raya	Cot Mee	19	0.7033	0.2967	5.637	Prioritas 12

Tadu Raya	Cot Mue	0	0.7214	0.2786	-	Prioritas 22
Tadu Raya	Gapa Garu	19	0.6098	0.3902	7.414	Prioritas 7
Tadu Raya	Gunong Geulugo	18	0.6497	0.3503	6.305	Prioritas 10
Tadu Raya	Gunong Kupok	11	0.6617	0.3383	3.721	Prioritas 15
Tadu Raya	Gunong Pungkie	62	0.6890	0.311	19.282	Prioritas 3
Tadu Raya	Gunong Sapek	11	0.6954	0.3046	3.351	Prioritas 16
Tadu Raya	Krung Itam	5	0.6867	0.3133	1.567	Prioritas 20
Tadu Raya	Kuala Tadu	11	0.7095	0.2905	3.196	Prioritas 17
Tadu Raya	Pasi Luah	1	0.5598	0.4402	0.440	Prioritas 21
Tadu Raya	Rantau Selamat	18	0.6846	0.3154	5.677	Prioritas 11
Tadu Raya	Sarah Mantok	18	0.6325	0.3675	6.615	Prioritas 8
Tadu Raya	Simpang Jaya	25	0.6511	0.3489	8.723	Prioritas 4
Tadu Raya	Sumber Daya	12	0.6892	0.3108	3.730	Prioritas 14

Gambar 5.10 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Tadu Raya



5.2.10. Kecamatan Tripa Makmur

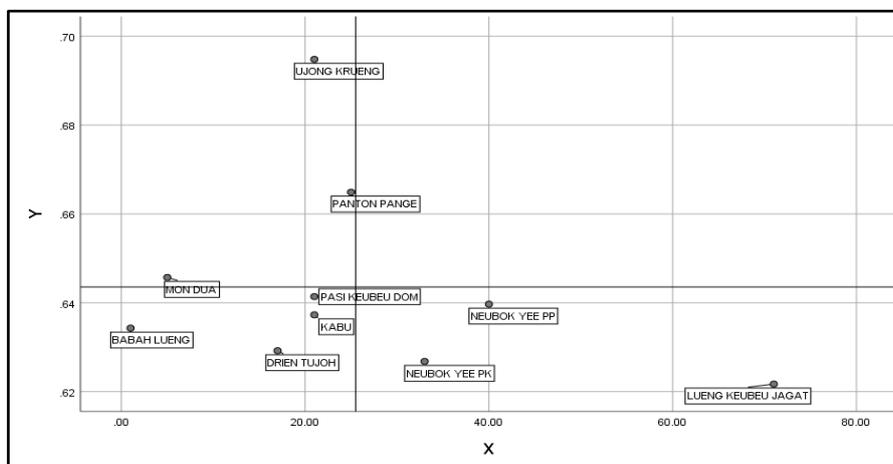
Kecamatan Tripa Makmur memiliki 10 desa. Penentuan prioritas mengikuti perhitungan menggunakan data jumlah D1 dan nilai selisih rata-rata rasio IDM/IKM. Perkalian data D1 dan nilai selisih akan menghasilkan nilai prioritas. Kemudian hasil perkalian diurutkan untuk menentukan tingkat prioritas. Hasil perkalian yang paling tinggi menjadi prioritas pertama, kemudian diikuti nilai yang

lebih rendah menjadi prioritas kedua dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Prioritas desa disajikan selengkapnya pada Tabel 5.11.

Gambar 5.11 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Tripa Makmur

Kecamatan	Desa	Jumlah D1	Nilai Idm/Ikm	1- Nilai IDM	Jumlah D1 X (1- Nilai IDM)	Keterangan
Tripa Makmur	Babah Lueng	1	0.6343	0.3657	0.366	Prioritas 10
Tripa Makmur	Drien Tujoh	17	0.6292	0.3708	6.304	Prioritas 8
Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	71	0.6217	0.3783	26.859	Prioritas 1
Tripa Makmur	Kabu	21	0.6373	0.3627	7.617	Prioritas 5
Tripa Makmur	Pasi Keubeu Dom	21	0.6414	0.3586	7.531	Prioritas 6
Tripa Makmur	Neubok Yee Pk	33	0.6268	0.3732	12.316	Prioritas 3
Tripa Makmur	Neubok Yee Pp	40	0.6397	0.3603	14.412	Prioritas 2
Tripa Makmur	Mon Dua	5	0.6457	0.3543	1.772	Prioritas 9
Tripa Makmur	Ujong Krueng	21	0.6948	0.3052	6.409	Prioritas 7
Tripa Makmur	Panton Pange	25	0.6649	0.3351	8.378	Prioritas 4

Gambar 5.11 Pemetaan Desa Prioritas Di Kecamatan Tripa Makmur



Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026
BAB VI

PENUTUP

RPKD KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022-2026



BAB VI

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2026 disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem daerah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan peningkatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan kelompok masyarakat lainnya, guna mendorong pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya, serta mendorong keberlanjutan keberhasilan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dimana pada tahun 2030 diharapkan dapat mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2026 ini harus dapat diintegrasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintahan Nagan Raya baik dokumen rencana perencaanaan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD). Untuk mewujudkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini dibutuhkan dukungan dan kerjasama lintas sektor, antar perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Hal ini penting mengingat masalah kemiskinan bersifat multidimensi dimana penanggulangannya tidak mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan unidimensi karena tidak ada satu layanan pun yang dapat

merespon dengan baik kebutuhan masyarakat yang beragam. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang harus melibatkan lintas sektor, multidisiplin ilmu dan yang melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan dapat menciptakan akselerasi dalam penanggulangan dan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8).
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S. (2013). Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty. In *The Many Dimensions of Poverty* (pp. 89–119). Palgrave Macmillan UK.
https://doi.org/10.1057/9780230592407_6
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2013). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2296819>
- Badan Pusat Statistik Indonesia berbagai edisi
- Bellinger, W. K. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon
- Chimhowu, A. O. (2009). Poverty. In *International Encyclopedia of Human Geography*. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00116-4>
- Friedman, B. M. (2002). Globalization and Its Discontents by Joseph E. Stiglitz Norton, The most pressing economic problem of our time is that so. *New York Review of Books*
- Gordon, D. (2009). The international measurement of poverty and anti-poverty policies. In *The Global Social Policy Reader*.
<https://doi.org/10.46692/9781847425560.004>
- Goodin, R. E., Headey, B., Muffels, R., & Dirven, H.-J. (1999). The Real Worlds of Welfare Capitalism. In *The Real Worlds of Welfare Capitalism*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511490927>
- Hagenaars, A. J. M. (2017). The definition and measurement of poverty. In *Economic Inequality and Poverty: International Perspectives*. <https://doi.org/10.4324/9781315179193>

- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Handbook Poverty and Inequality. In *The World Bank*.
- Hulme, D., & Shepherd, A. (2003). Conceptualizing chronic poverty. *World Development*, 31(3). [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00222-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00222-X)
- Jalan, J., & Ravallion, M. (1999). Are the poor less well insured? Evidence on vulnerability to income risk in rural China. *Journal of Development Economics*, 58(1). [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00103-5](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00103-5)
- Laderchi, C. R., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches. *Oxford Development Studies*, 31(3). <https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>
- Morduch, J. (1994). Poverty and vulnerability. *American Economic Review*, 84(2).
- Bradshaw, T. K. (2020). Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development. In *50 Years of Community Development*. <https://doi.org/10.4324/9781003103066-7>
- Nogami, H. (2008). Defining Poverty in the Developing World - Edited by Frances Stewart, Ruhi Saith, and Barbara Harriss-White . *The Developing Economies*, 46(4). https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2008.073_2.x
- Pritchett, L., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2000). Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure, with Application to Indonesia. In *SMERU Working Paper* (Issue May).
- Ravallion, M. (1988). Expected Poverty Under Risk-Induced Welfare Variability. *The Economic Journal*, 98(393). <https://doi.org/10.2307/2233725>
- Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. *Journal of Human Development*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/146498805200034266>
- Sen, A. K. (1999). Introduction - Development as Freedom. *Development as Freedom*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*, Twelfth edn. *Pearson Addison Wesley, Boston*.

World Bank. (2000). *World Development Report 2000 / 1 Attacking Poverty*. In *Oxford University Press*.

World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity: Reversals of fortune*. In *Lecture Notes in Computer Sains: Vol. 3678 LNBI*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*, Twelfth edn. *Pearson Addison Wesley, Boston*.

Yunus, M. (2007). *Creating World Without Poverty*. *Public Affairs Book*.

Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Nagan Raya
Tahun 2022-2026
LAMPIRAN

LAMPIRAN



MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Menurunkan Angka Kemiskinan			Angka Kemiskinan (%)								18,00%	237.120.672.559	17,80%	246.566.427.028	17,50%	244.244.100.432	17,00%	245.818.659.432	
1.	Bidang Tenaga Kerja	Peningkatan daya saing dan peluang usaha	Meningkatnya Kompetensi dan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun-n	Kab. Nagan Raya	100 orang	1.000.000.000	60	658.892.000	100 orang	1.000.000.000	100 orang	1.000.000.000	Disnakertrans
									Pengadaan Sarana Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (unit)	Kab. Nagan Raya	50 unit	1.000.000.000	Disnakertrans						
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab. Nagan Raya	10 orang	100.000.000	3 orang	21.820.004	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	Disnakertrans
					Program Hubungan Industrial	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Nagan Raya	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	23.346.084	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	Disnakertrans
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah dan yang Diselesaikan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Nagan Raya	10 perkara	30.000.000	6 perkara	3.044.750	10 perkara	30.000.000	10 perkara	30.000.000	Disnakertrans
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Satu-satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Nagan Raya	25 KK	100.000.000	Disnakertrans						
									Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Nagan Raya	4 Satuan Permukiman	50.000.000	4 Satuan Permukiman	13.423.212	4 Satuan Permukiman	50.000.000	4 Satuan Permukiman	50.000.000	Disnakertrans
2.	Bidang Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah/Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kabupaten Nagan Raya	4 unit	279.664.000	4 unit	400.000.000	4 unit	400.000.000	4 unit	400.000.000	Disdik
									Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kabupaten Nagan Raya	3 unit	244.608.000	Disdik						
									Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (paket)	Kabupaten Nagan Raya	4 unit	700.000.000	Disdik						

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												2023		2024		2025			2026	
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
									Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah yang Mengelola Dana BOS	Kab. Nagan Raya	41 Sekolah	8.000.000.000	41 Sekolah	8.000.000.000	41 Sekolah	8.000.000.000	41 Sekolah	8.000.000.000	Disdik
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tercapainya Kebutuhan Satuan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Nagan Raya	30 Unit	1.500.000.000	30 Unit	1.500.000.000	30 Unit	1.500.000.000	30 Unit	1.500.000.000	Disdik
									Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Nagan Raya	20 Unit	1.000.000.000	20 Unit	1.000.000.000	20 Unit	1.000.000.000	20 Unit	1.000.000.000	Disdik
									Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Nagan Raya	15 unit	1.000.000.000	15 unit	1.000.000.000	15 unit	1.000.000.000	15 unit	1.000.000.000	Disdik
									Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Nagan Raya	30 Unit	500.000.000	30 Unit	500.000.000	30 Unit	500.000.000	30 Unit	500.000.000	Disdik
									Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Nagan Raya	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	Disdik
									Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Nagan Raya	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	Disdik
									Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kab. Nagan Raya	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	Disdik
									Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Nagan Raya	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000	Disdik
									Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Nagan Raya	1000 Peserta Didik	1.000.000.000	1000 Peserta Didik	1.000.000.000	1000 Peserta Didik	1.000.000.000	1000 Peserta Didik	1.000.000.000	Disdik
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Nagan Raya	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	Disdik
									Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Nagan Raya	169 PAUD	5.000.000.000	169 PAUD	5.000.000.000	169 PAUD	5.000.000.000	169 PAUD	5.000.000.000	Disdik
					Program Pengembangan Kurikulum	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah pelajaran muatan lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Disdik
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Guru di setiap Satuan Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Disdik

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												2023		2024		2025			2026	
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
									Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab. Nagan Raya	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	Disdik
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah/ Dasar	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terkendalinya Pendirian dan Operasional Satuan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	Disdik
							Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terkendalinya Pendirian dan Operasional Satuan	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	86.000.000	Disdik
3.	Bidang Kesehatan	Perbaikan Layanan Kesehatan dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (orang)	Kab. Nagan Raya	3	60.000.000	2	52.190.750	3	60.000.000	3	60.000.000	Dinkes
								Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Peningkatan kompetensi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (orang)	Kab. Nagan Raya	600	2.000.000.000	586	1.957.236.150	600	2.000.000.000	600	2.000.000.000	Dinkes
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satu penduduk	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes, Optik dan UMOT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	372.458.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Dinkes
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Promosi Kesehatan yang dilakukan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Nagan Raya	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	112.933.200	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	Dinkes
								Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Nagan Raya	1000 Keluarga	500.000.000	1000 Keluarga	500.000.000	1000 Keluarga	500.000.000	1000 Keluarga	500.000.000	Dinkes

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Stunting	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	3200 orang	2.272.822.350,00	3274 orang	2.272.822.350,00	3274 orang	2.272.822.350,00	3274 orang	2.272.822.350,00	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	3600 orang	265.118.000,00	3618 orang	265.118.000,00	3618 orang	265.118.000,00	3618 orang	265.118.000,00	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	2700 orang	167.029.500,00	2784 orang	167.029.500,00	2784 orang	167.029.500,00	2784 orang	167.029.500,00	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	13.908 orang	1.151.003.150,00	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	20.000 orang	1.307.537.200,00	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	2.300 orang	469.875.800	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	11.852	230.969.000,00	11.852	230.969.000,00	11.852	230.969.000,00	11.852	230.969.000,00	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	30.905	100.000.000	30.905	100.000.000	30.905	100.000.000	30.905	100.000.000	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	3.031	150.000.000	3.031	150.000.000	3.031	150.000.000	3.031	150.000.000	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	734	114.520.000,00	734	114.520.000,00	734	114.520.000,00	734	114.520.000,00	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	2.320	100.000.000	2.320	100.000.000	2.320	100.000.000	2.320	100.000.000	Dinkes
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	3.624	140.000.000	3.624	140.000.000	3.624	140.000.000	3.624	140.000.000	Dinkes

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Nagan Raya	17 Dokumen	318.740.000,00	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Nagan Raya	24 Dokumen	3.981.196.191	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Nagan Raya	88 dokumen	324.215.880,00	Dinkes						
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Nagan Raya	367 orang	71.260.000,00	Dinkes						
									Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Nagan Raya	13 Dokumen	2.493.954.866,00	Dinkes						
									Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Nagan Raya	17 Dokumen	3.500.000.000	Dinkes						
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase jumlah keluarga yang dibina Persentase jumlah keluarga yang dibina	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab. Nagan Raya	1 Kabupaten	100.000.000	DPMGP4						
									Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Nagan Raya	100 Orang	100.000.000	DPMGP4						
4.	Bidang Infrastruktur Dasar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Daerah guna mendukung konektivitas wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah Layak Huni	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Nagan Raya	-	-	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Dinas Perkim
									Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Kabupaten Nagan Raya	10 Unit	99.996.300	Dinas Perkim						
									Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kabupaten Nagan Raya	25 unit	2.500.000.000	10 Unit	2.310.000.000	25 unit	2.500.000.000	25 unit	2.500.000.000	Dinas Perkim
					Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Kecamatan	50 Unit	1.000.000.000	Dinas Perkim						

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												2023		2024		2025			2026	
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
									Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kabupaten Nagan Raya	8 Unit	685.888.619	10 Unit	1.367.500.000	8 Unit	685.888.619	8 Unit	685.888.619	Dinas Perkim
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	5 Kecamatan	100 SR	6.691.328.000	100 SR	6.691.328.000	100 SR	6.691.328.000	100 SR	6.691.328.000	Dinas Perkim
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)	Kab. Nagan Raya	100 SR	2.000.000.000	100 SR	1.537.104.215	100 SR	2.000.000.000	100 SR	2.000.000.000	Dinas Perkim
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	10 Kecamatan	350 Rumah Tangga	8.833.388.000	350 Rumah Tangga	8.833.388.000	350 Rumah Tangga	8.833.388.000	350 Rumah Tangga	8.833.388.000	Dinas Perkim
									Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun		360 M3/Hari	1.300.000.000	360 M3/Hari	1.300.000.000	360 M3/Hari	2.980.054.542	360 M3/Hari	2.980.054.542	Dinas Perkim
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit	329.812.675	1 Unit	329.812.675	1 Unit	329.812.675	1 Unit	329.812.675	Dinas Perkim
									Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		500 RumahTangga	6.208.657.000	500 RumahTangga	6.208.657.000	500 RumahTangga	6.078.657.000	500 RumahTangga	6.078.657.000	Dinas Perkim
5	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Normalisasi Saluran pembuang	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Kab. Nagan Raya	98 Paket	18.246.500.000	98 Paket	18.246.500.000	98 Paket	18.246.500.000	98 Paket	18.246.500.000	Dinas PUPR
								Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Tersebar)	Panjang Jaringan Irigasi yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Nagan Raya	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000	Dinas PUPR

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 Kecamatan	30 km	15.000.000.000	42 km	17.178.000.000	30 km	15.000.000.000	30 km	15.000.000.000	PUPR
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Kabupaten Nagan Raya	1,6 km	3.500.000.000	PUPR						
									Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kabupaten Nagan Raya	0,5 km	3.000.000.000	PUPR						
									Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kabupaten Nagan Raya	5 km	5.000.000.000	PUPR						
									Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kabupaten Nagan Raya	8 bendung	500.000.000	PUPR						
									Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Nagan Raya	16 KM	500.000.000	16 KM	800.000.000	16 KM	1.000.000.000	16 KM	1.000.000.000	PUPR
									Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Nagan Raya	1 titik	500.000.000	PUPR						
									Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Kabupaten Nagan Raya	DI	500.000.000	1 DI	300.056.265,00	1 DI	500.000.000	1 DI	500.000.000	PUPR
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	Kab. Nagan Raya	5 km	5.000.000.000	PUPR						
6.	Pertanian	Meningkatnya Produktifitas dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin yang bekerja di Sektor Pertanian	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Daging Ternak Besar (Sapi dan Kerbau) Produksi Sektor Pertanian Palawija Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten Nagan Raya	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Nagan Raya	4 Paket	1.707.244.170	4 Paket	3.648.750.000	4 Paket	3.831.188.000	4 Paket	4.022.747.000	Distannak
					Program Penyuluhan	Cakupan Bina Kelompok Petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nagan Raya	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Nagan Raya	5 unit	372.000.000	5 Paket	372.000.000	5 Paket	372.000.000	5 Paket	372.000.000	Distannak

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
									Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Nagan Raya	Unit	150.000.000	10 unit	140.132.846	10 unit	150.000.000	10 unit	150.000.000	Distannak
									Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Nagan Raya	10 unit	50.000.000	10 unit	42.420.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	Distannak
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dilakukan pembangunan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	2 unit	200.000.000	12 unit	2.213.005.890	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	Distannak
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	12 unit	6.400.000.000	Distannak						
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	4 unit	1.000.000.000	12 unit	5.843.973.019	4 unit	1.000.000.000	4 unit	1.000.000.000	Distannak
									Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	-	-	unit	-	2 unit	600.000.000	-	-	Distannak
									Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	-	-	10 unit	400.000.000	10 unit	400.000.000	10 unit	400.000.000	Distannak
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Kab. Nagan Raya	50 ha	214.800.000	Distannak						
			Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Populasi Ternak Besar (Sapi dan Kerbau) Populasi Ternak Kecil (Kambing dan Domba)	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pengadaan Obat-Obatan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Nagan Raya	1 Paket	260.015.282	Distannak						
			Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengenalan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Produktivitas Hasil Tangkapan Nelayan (%)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Nagan Raya	125 Paket	515.000.000	DKPP						
									Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Nagan Raya	2 Unit	555.000.000	DKPP						
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan Nelayan Kecil		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Nagan Raya	200	1.442.384.582	200	1.442.384.582	200	1.442.384.582	200	1.442.384.582	DKPP

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
									Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Nagan Raya	10 Kelompok	3.586.153	10 Kelompok	3.586.153	20 Kelompok	50.000.000	20 Kelompok	50.000.000	DKPP
					Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan yang di Bantu	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	15 unit	2.311.050.000	DKPP						
									Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	66 unit	957.528.630	DKPP						
									Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab. Nagan Raya	20 Kelompok	50.000.000	20 Kelompok	46.588.450	20 Kelompok	50.000.000	20 Kelompok	50.000.000	DKPP
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Bahan Baku dan Bahan Pendukung Pengolahan Di Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Nagan Raya	50 orang	100.000.000	DKPP						
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Nagan Raya	35 unit	1.808.358.000	35 unit	1.808.358.000	35 unit	648.400.000	10 unit	648.400.000	Disbun
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Perkebunan yang dibangun	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Nagan Raya	40 paket	14.744.880.000	Disbun						
7.	Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin	Meningkatnya keragaman konsumsi energi dan protein	Angka kecukupan gizi (AKG) Angka kecukupan protein (AKP) Angka kecukupan energi (AKE)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Total Cadangan Pangan kabupaten yang Dikelola	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	-	-	16 ton	192.000.000	17 ton	204.000.000	18 ton	216.000.000	DKPP
							Angka Ketersediaan Energi Perkapita	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Nagan Raya	120 Keluarga	120.000.000	120 Keluarga	120.000.000	120 Keluarga	120.000.000	120 Keluarga	120.000.000	DKPP	
								Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Nagan Raya	-	-	1 Dokumen	31.060.907	1 Dokumen	50.000.000	-	-	DKPP	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Nagan Raya	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	DKPP	

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Penyediaan Infrastruktur pangan dan infrastruktur pendukung Kemandirian pangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur pangan dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur pangan Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Nagan Raya	2 unit	600.000.000	DKPP						
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang Tahan Pangan/ Sangat Tahan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan	Persentase dukungan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan kabupaten yang disusun	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	25.000.000	DKPP						
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	DKPP	
8.	Bidang Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	13 Jiwa	29.893.230	50 Jiwa	20.014.510	13 Jiwa	29.893.230	13 Jiwa	29.893.230	Dinas Sosial
									Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	100 orang	50.000.000	30 orang	21.957.210	100 orang	50.000.000	100 orang	50.000.000	Dinas Sosial
									Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	25 orang	100.000.000	25 orang	99.035.310	25 orang	100.000.000	25 orang	100.000.000	Dinas Sosial
									Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10 orang	35.000.000	10 orang	32.067.640	10 orang	35.000.000	10 orang	35.000.000	Dinas Sosial
									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	50 orang	869.606.101	222 orang	160.840.639	50 orang	869.606.101	50 orang	869.606.101	Dinas Sosial

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
									Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	100 Orang	10.021.885	10 Orang	12.997.962	100 Orang	10.021.885	100 Orang	10.021.885	Dinas Sosial	
									Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Nagan Raya	10 orang	6.890.000	10 orang	6.890.000	10 orang	6.890.000	10 orang	6.890.000	Dinas Sosial	
									Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Nagan Raya	20 orang	106.132.452	20 orang	106.132.452	20 orang	106.132.452	20 orang	106.132.452	Dinas Sosial	
									Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Nagan Raya	222 orang	161.237.922	222 orang	161.237.922	222 orang	161.237.922	222 orang	161.237.922	Dinas Sosial	
									Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Nagan Raya	12 orang	35.737.065	12 orang	35.737.065	12 orang	35.737.065	12 orang	35.737.065	Dinas Sosial	
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Nagan Raya	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000	Dinas Sosial	
									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Nagan Raya	25 orang	319.127.800	25 orang	319.127.800	25 orang	319.127.800	25 orang	319.127.800	Dinas Sosial	
									Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Nagan Raya	50 orang	130.000.000	50 orang	130.000.000	50 orang	130.000.000	50 orang	130.000.000	Dinas Sosial	
									Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Nagan Raya	222 orang	121.066.424	222 orang	121.066.424	222 orang	130.000.000	222 orang	135.000.000	Dinas Sosial	
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Pemberdayaan (17,85%)	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Nagan Raya	50 orang	49.336.550	100 Keluarga	68.145.320	50 orang	49.336.550	50 orang	49.336.550	Dinas Sosial	

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	194 Jiwa	190.262.186	Dinas Sosial						
									Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10 Orang	18.383.338	Dinas Sosial						
									Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10 Lembaga	67.123.820	Dinas Sosial						
									Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	22 KK	42.873.786	21 KK	62.021.434	21 KK	42.873.786	21 KK	42.873.786	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Penduduk Miskin	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara	Penjangkauan Anak Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10 orang	25.000.000	10 orang	24.258.838	10 orang	24.258.838	10 orang	24.258.838	Dinas Sosial
									Rujukan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10 orang	25.000.000	10 orang	24.258.838	10 orang	24.258.838	10 orang	24.258.838	Dinas Sosial
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	6700 orang	100.000.000	6700 orang	93.086.280	6.700	100.000.000	6.700	100.000.000	Dinas Sosial
									Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Nagan Raya	25000 orang	80.000.000.00	Dinas Sosial						
									Fasilitasi Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	2500 KK	200.000.000	Dinas Sosial						
									Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	500 orang	100.000.000	Dinas Sosial						
					Program Penanganan Bencana	Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Kabupaten	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungungsi) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	1509 Jiwa	149.405.000	Dinas Sosial						

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
									Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	50 orang	50.000.000	50 orang	32.455.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	Dinas Sosial
									Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	4 Lokasi	400.000.000	Dinas Sosial						
									Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	10	30.000.000	5	29.364.000	10	30.000.000	10	30.000.000	Dinas Sosial
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	27 Orang	108.000.000	Dinas Sosial						
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	1.205.100.000	Setdakab						
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LPM)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Nagan Raya	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.268,00	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	DPMGP4
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan yang Berbagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Nagan Raya	1 Dokumen	300.000.000,00	DPMGP4						

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
9.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Program Pengembangan UMKM	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (76.86%)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemittaan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Nagan Raya	200 Unit usaha	5.329.516.561	200 unit usaha	5.500.000.000	200 unit usaha	5.500.000.000	200 unit usaha	5.500.000.000	Disperindakop
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	jumlah Koperasi Yang Dibina	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Nagan Raya	20 KK	100.000.000	Disperindakop						
10.	Bidang Perdagangan	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor perekonomian	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah Dalam Satu Tahun	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Nagan Raya	4 Laporan	1.200.000.000	Disperindakop						
11.	Bidang Kekhususan Aceh	Meningkatkan Keistimewaan Aceh	Meningkatnya Nilai Keislaman	Indeks Pembangunan Syariah	Program Baitul Mal	Jumlah Ziwaf yang dihimpun	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziwaf	Jumlah Penyaluran Ziwaf	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Kab. Nagan Raya	1870 orang	935.000.000	1539 orang	2.262.000.000	1539 orang	935.000.000	1870 orang	935.000.000	Baitul Mal
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Kab. Nagan Raya	1815 orang	2.718.000.000	1815 orang	750.000.000	1815 orang	2.718.000.000	1815 orang	2.718.000.000	Baitul Mal
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Kab. Nagan Raya	40 orang	750.000.000	Baitul Mal						
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Kab. Nagan Raya	50 orang	96.000.000	Baitul Mal						
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Kab. Nagan Raya	3 orang	12.000.000	Baitul Mal						
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Kab. Nagan Raya	100 orang	156.000.000	Baitul Mal						
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil	Kab. Nagan Raya	10 orang	6.000.000	Baitul Mal						
									Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Kab. Nagan Raya	500 orang	1.100.000.000	Baitul Mal						

No.	Tujuan/Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Kepmen	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Lokasi Prioritas	Target								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												2023		2024		2025		2026		
												Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Program Syariah Islam Aceh	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariah Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Pelatihan dan Pembinaan Syariah Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina (PE)	Kab. Nagan Raya	50 orang	200.000.000	DSI						